

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

ADAPTASI KEBIASAAN BARU



Edisi 18
Juni 2020



9 1772655 9933006

New Normal

KITA semua setuju bahwa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) melahirkan peradaban baru. Meski telah menelan ratusan ribu korban jiwa dan menular di 213 negara, virus ini membawa sesuatu yang positif, yakni “memaksa” manusia memasuki *new normal* dan beralih ke peradaban baru. Peradaban yang lebih menghargai kualitas hidup manusia, peradaban yang didominasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan peradaban yang lebih mencintai bumi.

Kita semua juga sepakat bahwa Pandemi COVID-19 mempercepat manusia memasuki era industri 4.0. Sebuah era yang ditandai oleh penggunaan teknologi digital secara masif. Dengan kewajiban tinggal di rumah (*Stay at Home*) untuk menghindari penularan, orang bekerja dan belajar di rumah dengan menggunakan jaringan internet. Wawancara, diskusi, seminar, kegiatan belajar-mengajar, konsultasi dokter, hingga doa dilakukan secara virtual menggunakan beragam platform digital.

Ketika catatan ini ditulis, Selasa (30/6/2020), kewajiban menjaga jarak, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan menghindari kerumunan sudah berjalan hampir empat bulan. Akibatnya, kegiatan bisnis menjadi terhenti. Ekonomi pun berkontraksi. Angka pengangguran meningkat dan kemiskinan juga melonjak.

Isu besar saat ini adalah pentingnya masyarakat kembali beraktivitas tanpa perlu menunggu kapan COVID-19 berakhir. Karena hingga pertengahan Juni 2020, belum ada vaksin yang ditemukan. WHO pun sudah menyatakan, vaksin belum tentu bisa ditemukan hingga dua tahun ke depan.

Berbagai kegiatan usaha perlu dibuka. Orang harus bekerja, berbelanja, dan berusaha agar ekonomi kembali hidup dan aktif. Namun, pola hidup dan cara kerja tidak lagi seperti era sebelum COVID-19. Inilah yang dimaksudkan dengan *new normal* atau normal baru atau adaptasi kebiasaan baru.

Hidup dengan normal baru artinya hidup dengan menerapkan

protokol kesehatan yang ketat karena virus masih menyebar. WHO menggunakan istilah *reproduction number* (R0) dan *effective reproduction number* (Rt). R0 adalah angka dasar saat pertama virus merebak, sedangkan Rt adalah angka penyebaran riil virus. Peningkatan atau penurunan COVID-19 sehari terakhir diukur dengan Rt. Karenanya saat ini, ketika hendak bepergian ke luar kota, salah satu protokol yang harus dijalankan adalah wajib melakukan *rapid test* atau *swab test*.

Ketika harus ke Flores pada Jumat (26/6/2020), saya pun melakukan *rapid test* di Klinik Pratama Kemkominfo. Selama transit di beberapa kota, pengecekan terhadap penumpang pun dilakukan secara ketat. Di dalam pesawat pun demikian. Tidak semua bangku pesawat terisi. Kementerian Perhubungan hanya mewajibkan 70 persen dari seluruh kursi yang boleh terisi. Maskapai yang biasa memberikan layanan berupa makan/minum selama penerbangan pun meniadakan layanan tersebut untuk mengurangi risiko penularan.

Memasuki *new normal*, berarti kita memasuki adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat Produktif dan Aman COVID-19. Produktif artinya kita semua kembali beraktivitas dan bekerja: PNS kembali masuk kantor dengan pembagian tertentu, sektor swasta kembali menghidupkan usahanya. Aman COVID-19 artinya meskipun kita beraktivitas, kita harus menerapkan protokol kesehatan agar kita semua aman dari paparan COVID-19. Artinya dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru, kita diharapkan tidak terpapar COVID-19 dan juga tidak terkapar karena kelaparan.

Dalam semangat itulah, Majalah Kominfo Next Edisi Juni 2020 kali ini mengangkat topik *New normal: Adaptasi Kebiasaan Baru*.

Selamat membaca

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

 @FSetu
  @FSetu
  FSetu TV

TIM REDAKSI

Pengarah:
Rosarita Niken
Widiastuti

Wakil Pengarah:
Philip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

Wakil Pimpinan Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

Wakil Redaktur Pelaksana:
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan,
M. Taufiq Hidayat,
Verawati

Reporter:
Patricia Samantha S.
Annisa Bonita P.,
Yusuf

Fotografer:
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamza Rachmattunisa,
Tommy Tirtawiguna

Produksi:
Fahmi Trihatin J.,



Daftar Isi

2 Surat dari MMB 9

4 Perspektif
Menteri

6 Arahan
Presiden

10 Liputan
Utama

28 Photo
Essay

36 Tren Konsumsi Media

42 Normal Baru dan Aparatur

48 Aksi Pemerintah

80 Layanan Publik
Kominfo

82 Opini

86 Adaptasi Ala
Stakeholder

110 KomEvent

Tiga Cerdas Digital

Akhir bulan Juni lalu saya mengunjungi Larantuka dan Adonara, kota-kota di ujung timur dan lepas pantai Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak panjang waktu kunjungan, namun sengaja saya sempatkan karena justru pada saat-saat krisis pandemi COVID-19 seperti ini, aksesibilitas daerah-daerah terpencil sangat krusial. Dibutuhkan perjalanan via helikopter agar dapat mencapai Desa Woloklibang di ketinggian Adonara Barat. Sementara moda transportasi darat harus menanjak bebukitan dan jalanan tanah berbatu-batu dan butuh waktu.

Desa Woloklibang ini viral karena kepala desanya diberitakan harus memanjat pohon kemiri agar dapat menjangkau sinyal untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Pemda terkait penanggulangan COVID-19. Saya mengunjungi wilayah tersebut, selain untuk meninjau akses internet yang dibangun oleh Kominfo melalui BAKTI, juga ingin menunjukkan bahwa untuk apapun yang berhubungan dengan penanggulangan COVID-19, pemerintah menaruh perhatian yang sangat, sangat, serius. Apalagi daerah-daerah seperti Adonara ini harus dipertahankan statusnya sebagai zona hijau.

Untuk mempertahankan atau mengembalikan suatu wilayah ke dalam zona hijau atau bebas dari penderita COVID-19, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai. TIK ini digunakan untuk melakukan pelacakan dan pendataan pergerakan dan transmisi penderita virus ini. Oleh sebab itu di titik-titik simpul pergerakan orang, kita melakukan pencatatan data dengan cermat. TIK telah banyak membantu urusan pelacakan transmisi penularan virus ini.

Maka meskipun harus melalui perjalanan yang cukup sulit ke Woloklibang, saya tetap tempuh agar dapat memberi semangat kepada saudara-saudara kita di pelosok Indonesia yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan data internet. Menyemangati mereka untuk pantang menyerah mengusahakan akses dan pengolahan data agar daerahnya terbebas dari virus COVID-19. Daerah yang masih dalam status zona hijau harus dibentengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat sekaligus pengelolaan data yang akurat agar dapat bertindak dengan tepat.

Bantuan akses internet di daerah terpencil juga menunjukkan bahwa kita harus beradu cepat dengan penyebaran virus ini. Virusnya tidak menunggu waktu untuk menyebar dan menjangkiti masyarakat, malah kadang lebih cepat mendahului sinyal seluler dan akses internet.

Namun demikian, kita di Kominfo memiliki rentang tugas yang sangat lebar dalam hal melayani sektor TIK ini. Kita tidak hanya melakukannya di titik hulu, melainkan juga sampai bermuara ke hilir. Kita membangun infrastruktur untuk akses sinyal dan internet, menjaga penegakan aturannya, sekaligus juga membina konten di dalamnya.

Kominfo menyediakan internet untuk kantor-kantor desa seperti di Woloklibang ini, dengan harapan akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan akurat. Internet yang cepat akan mendorong percepatan layanan pemerintah daerah dan pendidikan menjadi semakin kompetitif menuju

masyarakat digital. Namun demikian, selain saya sampaikan bahwa pemerintah sedang *ngebut* untuk membangun akses sinyal dan internet di pelosok, saya selalu sampaikan kepada masyarakat di daerah tersebut untuk “merawat” infrastruktur tersebut dengan baik. Jangan sampai kecanggihan, kemudahan, dan kenyamanan yang ditawarkan TIK justru menjadi “virus” baru yang mengerogoti masyarakat dari sisi sosial dan budaya.

Saya selalu sampaikan bahwa setidaknya ada “tiga cerdas” dalam menggunakan ruang digital yang harus menjadi bekal saat mereka terpapar dengan jaringan internet global.

1

Cerdas dalam memprioritaskan penggunaan untuk hal-hal yang penting dan yang memiliki skala prioritas tinggi.

Bagi akses yang disediakan di lembaga pendidikan, tolong gunakan akses internet ini hanya untuk mengakses bahan-bahan pelajaran dan penunjangnya. Maksimalkan untuk *tele-education*, pembelajaran jarak jauh, untuk *blended-learning*, bauran cara belajar. Bagi kantor pemerintahan, prioritaskan untuk koordinasi dan perbaikan layanan, tingkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena jika tidak bijaksana dalam hal prioritas ini, maka *bandwidth* akan terbuang untuk hal yang sia-sia dan pada saat yang sama menghambat kecepatan akses teman-teman kita lainnya yang lebih membutuhkan.

2

Cerdas untuk memiilih mendapatkan kesehatan jiwa dari internet dan media sosial. Cerdas spiritual.

Jangan sampai justru karena kehadiran internet, kita jadi mudah menyebar berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, atau juga pornografi. Jangan sampai kita menjadi konsumen informasi negatif dari internet dan media sosial, apalagi justru menjadi produsennya.

3

Cerdas untuk membuat inovasi melalui belajar dan praktik ilmu-ilmu bermanfaat yang berkebaruan di internet.

Akses internet yang digelar ini harus menjadi pemicu tumbuhnya inovasi-inovasi baru yang menjawab permasalahan sekitar kita. Kita membutuhkan banyak inventor, inovator, dan kreator baru untuk menguasai dunia digital. Tak tertutup kemungkinan akan muncul karya-karya atau aplikasi-aplikasi bermanfaat dari pelosok yang mendobrak stagnasi sosial dan ekonomi berkat terbukanya akses seluas-luasnya terhadap dunia melalui internet.

Kominfo harus datang dengan solusi yang berupa paket lengkap saat melayani saudara-saudara kita di seluruh penjuru Nusantara. Lengkap dari hulu infrastruktur, sampai menghadirkan konten positif di hilir. Lebih dari itu, imperatif tersebut juga masih ditambah pula dengan dimensi kecepatan dalam pelaksanaannya. Kita berpacu dengan waktu. Situasi seperti pandemi yang kita alami telah ikut menyadarkan kita akan hal itu.



5 Arahan Presiden terkait Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru

Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Saat meninjau kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, pada Rabu, 10 Juni 2020, Presiden Jokowi menyampaikan lima arahan terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19.

Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

"Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan sehingga disiplin memakai masker, jaga jarak

aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas saya kira perlu terus disampaikan kepada masyarakat," kata Presiden.

"Saya juga sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan," kata Presiden.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk

ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

“Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi terutama angka R_0^* dan R_t^* . Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan,” kata Presiden.

“Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan,” kata Presiden.

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas yang harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah dinilai Presiden sudah sangat baik.

“Sektor ekonomi, sektor dengan penularan COVID-19 yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua,” kata Presiden.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Ia juga meminta agar koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) diperkuat.

“Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini,” kata Presiden.

Kelima, Presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Menurutnya, keberhasilan pengendalian Covid ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

“Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” kata Presiden.

“Saya kira kita harus optimistis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali,” kata Presiden.

* R_0 : reproduction number
Rt: effective reproduction number



Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Kunjungan Kerja Presiden

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jawa Timur pada Kamis, 25 Juni 2020, merupakan kunjungan yang pertama kali dilakukan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan pihaknya telah melakukan persiapan khusus dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Heru menjelaskan, rombongan terbatas yang turut serta dalam kunjungan kerja ini telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan *rapid test* sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19.

"Sekretariat Presiden tentunya dengan jajarannya menerapkan secara disiplin hal ini (protokol kesehatan). Pertama, sebelum berangkat para pendamping Bapak Presiden, baik itu Menteri, Paspampres, dan perangkat lainnya akan dilakukan *rapid test*," tuturnya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kapasitas Pesawat Kepresidenan yang digunakan selama kunjungan kerja juga dibatasi hingga separuhnya mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Semula, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 bisa menampung hingga 55 penumpang dalam tiap kali perjalanan. Di tengah pandemi ini, kapasitas tersebut dikurangi hingga menjadi 25 penumpang saja.

"Protokol keamanan tetap kami terapkan, yaitu mereka (rombongan lain) akan berangkat lebih dulu sehingga isi dari pesawat hanya 50 persen," ujarnya.

Heru berharap agar kunjungan kerja pertama Presiden Joko Widodo di masa adaptasi kebiasaan baru ini dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada penerapan protokol kesehatan yang ada.

"Mudah-mudahan kunjungan Bapak Presiden pertama kali dalam kondisi *new normal* ini bisa diikuti dengan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak lepas dari pengetatan protokol kesehatan. Kami tentunya sangat berharap ini bisa berjalan dengan baik," tandasnya.

NEW NORMAL

New Normal, dua kata yang menjadi tren di masyarakat Indonesia saat ini, dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama jajarannya pada Rabu (27/5/2020). Begitu seringnya masyarakat menggunakan istilah ini di masa pandemi COVID-19 mendorong Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan padanan kata dari *new normal* menjadi kenormalan baru, yang diartikan sebagai keadaan normal yang baru (belum pernah ada sebelumnya).

Keadaan normal yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang harus dilakukan selama masa pandemi COVID-19, seperti memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di tempat ramai.

Dalam panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja, Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, istilah *new normal* merujuk pada upaya adaptasi melalui perubahan pola hidup pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, melaksanakan kegiatan secara produktif dan aman.

Namun penerapan kenormalan baru ini tentunya tidak bisa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah

Indonesia mengingat kondisi tingkat penularan COVID-19 yang berbeda-beda setiap daerah. Keputusannya diserahkan langsung ke masing-masing kepala daerah.

Saat ini, sudah ada 102 kabupaten di 23 provinsi yang diberikan kewenangan untuk menjalankan kenormalan baru, melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang berada di zona hijau penyebaran COVID-19.

Untuk memasuki kenormalan baru, setiap daerah harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu:

1. Laju penyebaran COVID-19 telah menurun 50% dari puncak kasus selama tiga pekan berturut-turut
2. Rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 harus menurun lebih dari 5% dari kasus yang sudah diperiksa
3. Kesiapan sistem kesehatan di daerah bersangkutan sebelum menerapkan kenormalan baru.

Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait apa saja yang harus dilakukan saat kenormalan baru, serta melakukan simulasi kenormalan baru sesuai dengan protokol kesehatan.

Sesuai dengan arti kata secara harfiah *New normal* atau Kenormalan Baru, yaitu kebiasaan baru yang dilakukan dalam rangka beradaptasi dengan kondisi tertentu.

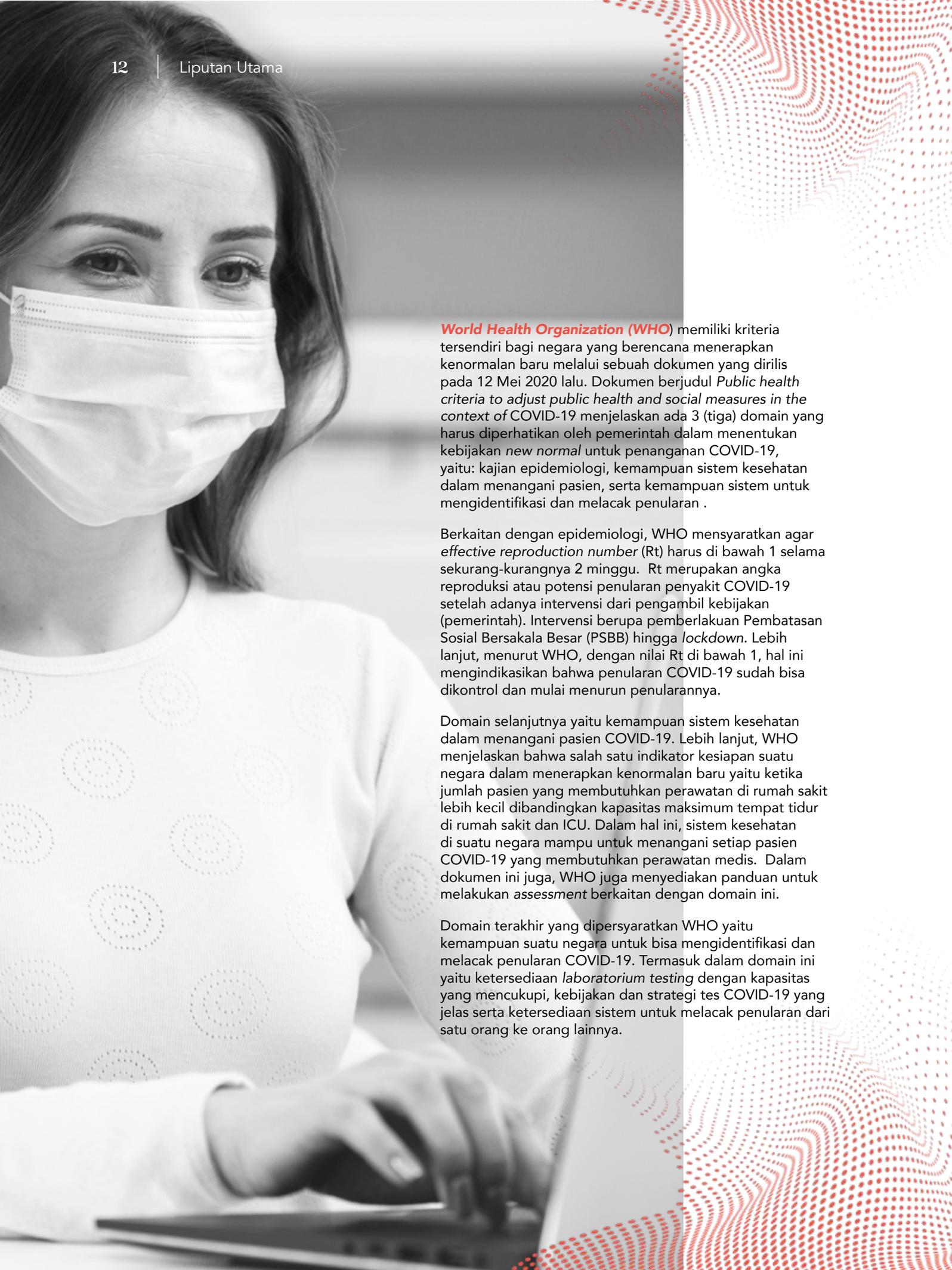
Kondisi tertentu dalam konteks ini yaitu masyarakat dunia yang harus berdampingan dengan kehadiran SARS-Cov-2, virus penyebab COVID-19. Hal yang sebelumnya terlihat berlebihan ataupun tidak biasa dilakukan, di masa kenormalan baru seakan menjadi

hal yang normal dan memang harus dijalankan. Kenormalan baru 'memaksa' masyarakat untuk bisa membiasakan diri dengan hal-hal seperti: mengenakan masker, membatasi interaksi sosial di tempat umum serta pola hidup bersih.

Masyarakat di ibu Kota dan sekitarnya (Jabodetabek) tentunya sudah tidak asing dengan selembar kain penutup hidung dan mulut bernama masker. Mengingat, tingkat polusi di ibu kota yang memang cukup tinggi, penggunaan masker pada awalnya ditujukan untuk melindungi dari bahaya polusi ketika berada di jalan. Era kenormalan baru memperluas pemanfaatan masker. Masyarakat menggunakan masker bahkan ketika berada di dalam ruangan maupun di tengah kerumunan. Tujuan penggunaan masker turut bergeser, tidak hanya untuk melindungi dari polusi tetapi juga untuk mencegah masuknya virus dan bakteri melalui hidung dan mulut. Secara khusus di masa pandemi, masker wajib dipakai masyarakat selama beraktivitas untuk mencegah penularan COVID-19.

Aktivitas sosial masyarakat di era kenormalan baru juga menjadi aspek yang harus disesuaikan. Ruang pribadi individu semakin lebar menjadi radius 1 – 1.5 meter, jabat tangan diganti dengan *elbow bump* maupun isyarat tangan. Perubahan ini tentunya dimaklumi oleh masyarakat, karena tujuannya agar virus tidak berpindah inang melalui jabat tangan dan sentuhan. Aspek pola hidup bersih berupa mencuci tangan pakai sabun serta menggunakan *hand sanitizer* juga menjadi kebiasaan yang harus diterapkan masyarakat di era saat ini. Bahkan, sabun cuci tangan dan *hand sanitizer* saat ini sudah menjadi salah satu barang bawaan wajib masyarakat ketika akan bepergian dan menjadi properti yang wajib ada di sarana perkantoran dan sarana publik.





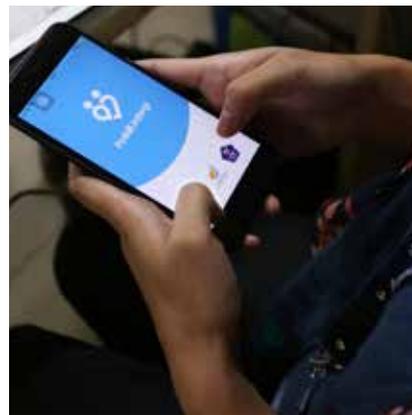
World Health Organization (WHO) memiliki kriteria tersendiri bagi negara yang berencana menerapkan kenormalan baru melalui sebuah dokumen yang dirilis pada 12 Mei 2020 lalu. Dokumen berjudul *Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19* menjelaskan ada 3 (tiga) domain yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan *new normal* untuk penanganan COVID-19, yaitu: kajian epidemiologi, kemampuan sistem kesehatan dalam menangani pasien, serta kemampuan sistem untuk mengidentifikasi dan melacak penularan .

Berkaitan dengan epidemiologi, WHO mensyaratkan agar *effective reproduction number* (R_t) harus di bawah 1 selama sekurang-kurangnya 2 minggu. R_t merupakan angka reproduksi atau potensi penularan penyakit COVID-19 setelah adanya intervensi dari pengambil kebijakan (pemerintah). Intervensi berupa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga *lockdown*. Lebih lanjut, menurut WHO, dengan nilai R_t di bawah 1, hal ini mengindikasikan bahwa penularan COVID-19 sudah bisa dikontrol dan mulai menurun penularannya.

Domain selanjutnya yaitu kemampuan sistem kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. Lebih lanjut, WHO menjelaskan bahwa salah satu indikator kesiapan suatu negara dalam menerapkan kenormalan baru yaitu ketika jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih kecil dibandingkan kapasitas maksimum tempat tidur di rumah sakit dan ICU. Dalam hal ini, sistem kesehatan di suatu negara mampu untuk menangani setiap pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan medis. Dalam dokumen ini juga, WHO juga menyediakan panduan untuk melakukan *assessment* berkaitan dengan domain ini.

Domain terakhir yang dipersyaratkan WHO yaitu kemampuan suatu negara untuk bisa mengidentifikasi dan melacak penularan COVID-19. Termasuk dalam domain ini yaitu ketersediaan *laboratorium testing* dengan kapasitas yang mencukupi, kebijakan dan strategi tes COVID-19 yang jelas serta ketersediaan sistem untuk melacak penularan dari satu orang ke orang lainnya.

Lebih lanjut, ketiga domain yang disarankan WHO tersebut merupakan satu kesatuan kriteria yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mulai dari aspek epidemiologi sampai dengan sistem kesehatan saling mendukung agar suatu negara bisa beralih dari status PSBB menuju ke *new normal*. Namun, satu hal yang tidak kalah penting dalam implementasi *new normal*, yaitu komitmen masyarakat untuk menjalankan protokol-protokol kesehatan yang telah digariskan pemerintah secara disiplin dan konsekuen. Tanpa adanya komitmen ini, upaya-upaya yang telah dilakukan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga lain akan menjadi mubazir.





Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru

*K*esehatan

Memasuki era adaptasi kebiasaan baru, Kementerian Kesehatan pada akhir Mei 2020 lalu menerbitkan Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Dunia usaha dan masyarakat pekerja dinilai memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan. Besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk, umumnya berpotensi memperluas penularan COVID-19, sehingga diperlukan protokol kesehatan agar masyarakat tetap produktif dan terlindungi dari COVID-19.

Protokol Kesehatan di Perkantoran dan Industri

1. Perusahaan wajib membentuk Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja.
2. Prosedur bagi pekerja untuk melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas).
3. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
4. Pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) dengan menentukan pekerja esensial yang perlu datang ke tempat kerja dan yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
5. Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk dengan menggunakan *thermogun*, dan sebelum masuk kerja terapkan *self-assessment* Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
6. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
7. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali).
8. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
9. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang *meeting*, pintu lift, dll).
10. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir). Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
11. Pengaturan jarak antar-pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dll).
12. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat shalat, alat makan, dan lain-lain.



Pindai di sini untuk akses lengkap
Protokol Kesehatan di Perkantoran
dan Industri

Protokol Kesehatan bagi Sektor Jasa dan Perdagangan

◀ Bagi pengurus atau pengelola tempat kerja:

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali)
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha
- c. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
- d. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker
- e. Memasang media informasi terkait ketentuan pembatasan jarak fisik, cuci tangan, dan kedisiplinan menggunakan masker
- f. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
- Memberikan tanda khusus di area padat pekerja seperti ruang ganti dan lift
 - Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
- g. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan
- Menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter kasir dan customer service
 - Mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai
- h. Mencegah kerumunan pelanggan dengan mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel, menerapkan sistem antrian di pintu masuk, menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang (*take away*)

◀ Bagi pekerja:

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
- b. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
- c. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- d. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.

◀ Bagi konsumen/pelanggan:

- a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan.
- c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing*



Pindai di sini untuk akses lengkap
Protokol Kesehatan bagi Sektor
Jasa dan Perdagangan



Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum

Tempat dan fasilitas umum yang diatur dalam protokol di antaranya pasar, mall/pertokoan, hotel/penginapan/*homestay*, rumah makan/restoran, sarana dan kegiatan olahraga, jasa ekonomi kreatif, hingga kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus memuat:

1. Pelindungan Kesehatan Individu, menekankan pada tindakan yang dapat mencegah masuknya virus SARS-CoV-2 melalui hidung, mulut, dan mata.

2. Pelindungan Kesehatan Masyarakat, menekankan pada peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk menerapkan unsur pencegahan (*prevent*), unsur penemuan kasus (*detect*), serta unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

3. Memperhatikan titik kritis penularan COVID-19, meliputi:

- Jenis dan karakteristik aktivitas
- Besarnya kegiatan
- Lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*)
- Lamanya kegiatan
- Jumlah orang yang terlibat
- Kelompok rentan (ibu hamil, balita, anak-anak, lansia)
- Penyandang disabilitas



Pindai di sini untuk akses lengkap
Protokol Kesehatan bagi
Masyarakat di Fasilitas Umum



T transportasi

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Menurut Menteri Perhubungan, dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi dalam masa adaptasi kebiasaan baru akan berdampak pada peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi.

Pengendalian transportasi dilakukan bagi seluruh wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), meliputi penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), transportasi laut, udara, dan perkeretaapian.

Berikut beberapa revisi dalam pasal-pasal yang diatur Permenhub 41/2020:

- ▶ Pembatasan jumlah penumpang yang akan diatur selanjutnya oleh Menhub melalui Surat Edaran. Misalnya, batas penumpang transportasi udara menjadi maksimal 70% dari total kapasitas tempat duduk
- ▶ Revisi terkait penggunaan sepeda motor yang membawa penumpang, dengan syarat antara lain melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika suhu badan di atas normal atau sakit.
- ▶ Pengendalian transportasi udara, terkait penyesuaian kapasitas (*slot time*) bandara berdasarkan evaluasi Kemenhub

Persyaratan

Perjalanan dalam negeri:

1. Wajib menunjukkan identitas KTP atau tanda pengenal yang sah
2. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji *Rapid test* dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan
3. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan *Rapid test*
4. Catatan, seluruh persyaratan perjalanan orang dalam negeri tersebut dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.

Perjalanan dari luar negeri:

1. Melakukan tes PCR pada saat tiba di tujuan.
2. Bila belum melaksanakan tes dan apabila tidak dapat menunjukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan
3. Pemeriksaan PCR dikecualikan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tidak memiliki peralatan PCR, digantikan dengan tes rapid dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas.

Sanksi

Pengenaan sanksi administratif akan dikenakan kepada para operator sarana/prasarana transportasi dan para pengelola angkutan barang yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.



Pindai di sini untuk akses lengkap
Protokol Kesehatan bagi Sektor
Jasa dan Perdagangan



*P*ariwisata
&
*E*konomi
*K*reatif

Protokol kesehatan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) mengacu pada Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Protokol ini disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama para pemangku kepentingan dan kementerian terkait.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, saat ini Kemenparekraf/Baparekraf sedang menyusun panduan teknis dalam bentuk *handbook*, antara lain untuk hotel, restoran dan rumah makan, daya tarik wisata, *homestay*, spa, usaha perjalanan wisata, kegiatan wisata minat khusus, MICE dan event, serta ekonomi kreatif.

Panduan teknis ini dibuat dengan memerhatikan indikator **kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.**

Protokol dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak, yakni kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum.

Sumber:

<https://www.kemkes.go.id/article/view/20052900002/satgas-COVID-19-dpr-kunjungi-kemenkes-terkait-protokol-new-normal.html>

<http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200526/5033964/begini-protokol-kesehatan-sektor-jasa-dan-perdagangan/>

<https://setkab.go.id/kemenhub-terbitkan-aturan-pengendalian-transportasi-masa-adaptasi-kebiasaan-baru/>

<https://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-pemerintah-resmi-sahkan-protokol-kesehatan-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>

FLEXIBLE WORKING SPACE

Budaya Kerja Baru

Selama Pandemi COVID-19 melanda seluruh penjuru negeri, seluruh karyawan di lingkungan pemerintah hingga swasta pun sudah menerapkan sistem kerja baru yaitu Working From Home (WFH). Selama kurang lebih 3 bulan sejak Maret hingga Mei tahun 2020, para pekerja kantor mau tidak mau harus menyesuaikan ruang privat mereka menjadi ruang bekerja agar semakin produktif dalam menyelesaikan tugas utamanya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah hingga sektor swasta pun mulai mencoba sistem kerja dengan istilah baru yaitu *Flexible Working Space*.

Apa sih *Flexible Working Space* itu? Dikutip dari rilis Kementerian Kominfo, FWS adalah pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode waktu tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi.

Namun, apabila kita coba telisik lebih dalam lagi, bagaimana istilah FWS ini bisa menjadi sebuah terobosan budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan?

Secara umum, konsep bekerja dari mana saja berarti membutuhkan orientasi kerja berbasis *output* dengan komitmen yang tinggi, berintegritas dan kemampuan bekerja secara mandiri.

Kementerian Kominfo melalui Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3 tahun 2020 sudah menentukan kriteria para pegawainya yang bisa melakukan kerja mandiri dari mana saja. Contohnya adalah pegawai dengan probabilitas terpapar COVID-19 lebih tinggi seperti pegawai dalam masa kehamilan maupun memiliki faktor komorbiditas, pegawai dari unit perumusan kebijakan atau rekomendasi kebijakan, pegawai yang aktivitas kerjanya tidak sering berhubungan dengan publik.

Dalam lingkungan Kementerian Kominfo sendiri, salah satu tujuan utama dari adanya budaya FWS ini adalah mengurangi jumlah pegawai yang bekerja di kantor selama masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Masing-masing satuan kerja maupun unit kerja diharapkan dapat membagi jadwal staf sesuai kebutuhan di kantor dan secara bergantian dapat merasakan penerapan konsep FWS yang hingga saat ini masih diimbau untuk dilaksanakan di rumah saja.

Pada kenyataannya, momentum pandemi COVID-19 yang sedang menuju adaptasi kebiasaan baru di Indonesia ini menjadi pemicu utama penerapan konsep FWS di lingkungan pemerintah pusat. Dikutip dari beritasatu.com, secara umum FWS erat kaitannya dengan bonus demografi, generasi milenial, dan generasi Z di sisi suplai, dan industrial 4.0 di sisi *demand* pasar tenaga kerja. Jadi, implementasi konsep budaya kerja dari mana saja ini memang erat kaitannya dengan perkembangan teknologi di Indonesia. Sehingga dengan adanya protokol yang ketat di tengah pandemi COVID-19, siapapun dapat tetap produktif tanpa batasan ruang dan waktu.

Begitu pula di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu lingkungan pemerintahan yang juga telah menggunakan konsep FWS sebagai budaya kerja baru. FWS yang merupakan salah satu *new thinking of work* ini dibuat dengan tujuan mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kemenkeu pun tetap mengunggulkan integritas sebagai pondasi utama para pegawai melakukan FWS. Pembagian sistem kerja FWS pun juga mempertimbangkan pemetaan jenis-jenis pekerjaan, mana yang dapat dilakukan secara *remote*, yang harus dilakukan di kantor, penyusunan proses bisnis, dan kalibrasi analisis beban kerja.

3 Aspek Utama

Flexible Working Space sendiri memiliki tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam penerapannya, yaitu area kerja, jam kerja, serta perangkat (aplikasi dan koneksi). Bicara tentang area kerja di kondisi pandemi saat ini, lingkungan kerja yang paling memungkinkan sebagai lokasi '*flexible space*' adalah rumah atau tempat tinggal para pegawai masing-masing.

Sementara terkait waktu kerja, ini adalah salah satu aspek yang paling sering menjadi keluhan bagi para pegawai kantoran. Sistem *Work from home* atau FWS from home ini menjadi *boomerang* akan jadwal kerja yang semakin tak menentu. Berbeda saat bekerja di kantor dengan waktu kerja yang jelas. Begitu pegawai sudah meninggalkan kantor untuk kembali ke rumah, maka waktu kerjanya dianggap selesai. Tidak dengan para pegawai yang bekerja dari rumah. Waktu kerja selama WFH menjadi blur, apalagi dengan jadwal *meeting* yang semakin beragam selama masa pandemi ini.

Namun Kementerian Kominfo sudah menerapkan sistem absensi *geotagging*, di mana ada batas presensi jam kerja yang ditetapkan secara resmi, pukul 05.00 WIB sebagai waktu paling awal presensi dan pukul 22.00 WIB sebagai waktu paling akhir presensi.

Aspek ketiga dalam FWS yaitu perangkat. Bisa dikatakan saat ini 'jam kerja tanpa batas' salah satunya disebabkan masifnya perkembangan teknologi saat ini. Sebut saja aplikasi *chatting* Whatsapp yang memungkinkan sesama rekan kerja berdiskusi mengenai tugas masing-masing melalui Whatsapp *group* tanpa mengenal waktu. Begitu pula dengan aplikasi *video conference* seperti Zoom, Google Meets, Blue Jeans, dsb. Aplikasi ini sangat menunjang efektivitas kerja pegawai melalui rapat internal maupun eksternal. Namun, mudahnya penggunaan aplikasi ini membuat jadwal rapat para pegawai bisa tak menentu.

Berbagai kemudahan teknologi menjadi sebuah '*privilege*' bagi penerapan budaya kerja FWS ini. Namun, tetap harus diingat bahwa kunci

keberhasilan dari seorang pegawai melakukan kerja dari mana saja sesungguhnya bukan hanya dilihat dari 3 aspek FWS, namun juga melalui integritas dan komitmen bekerja mandiri dan bertanggung jawab.

Kondisi pandemi memang bisa menjadi peluang bagi para pekerja yang ingin memangkas alokasi waktu mereka pulang pergi ke kantor dengan menerapkan sistem kerja FWS. Namun, budaya kerja baru ini pun akan sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya hasil produktivitas pegawai, sesuai dengan komitmen dan *time management* bagi masing-masing pegawai dalam menyelesaikan tugasnya.





Memasuki Juni 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan Pelaksanaan Kerja di Kantor dan Fleksibilitas Tempat Bekerja atau *Flexible Working Space* (FWS) bagi pegawainya. Penerapan sistem kerja ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru. Kebijakan FWS menjadi salah satu upaya Kementerian Kominfo memasuki adaptasi kebiasaan baru di lingkungan kerja.

Rabu (24/06/2020) lalu, tim KominfoNext berkesempatan berbincang dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken

Penerapan FWS di Kemkominfo

Widiastuti. Dari ruang kerjanya, Sekjen Niken menjelaskan proses hingga evaluasi penerapan FWS yang telah memasuki minggu ketiga sejak diterapkan pada 04 Juni 2020 lalu.

Perbincangan diawali dengan pembahasan tentang dasar penerapan kebijakan FWS, setelah sebelumnya Kementerian Kominfo menerapkan sistem *full Work from home* (WFH) selama tiga bulan terakhir sejak Maret 2020. Menurut Sekjen Niken, kebijakan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja pegawai agar tetap produktif dan aman selama pandemi COVID-19.

“Kementerian Kominfo ingin mengubah pola pikir juga budaya kerja dari seluruh karyawan, dan proses bisnis yang bisa berlangsung dalam situasi adaptasi tatanan

baru. Dengan penerapan ini, pegawai tetap bisa bekerja di kantor dengan memperhatikan protokol pelaksanaan kerja, juga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena sekarang bekerjanya berbasis digital, seluruh pegawai harus meningkatkan kapasitasnya di bidang TIK,” jelasnya.

Pegawai yang bekerja di kantor dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total seluruh Pegawai dalam 1 (satu) unit organisasi eselon I selama 2 (dua) minggu berturut-turut, dilanjutkan dengan pelaksanaan FWS selama 2 (dua) minggu.

“Diatur oleh pimpinan satuan kerja masing-masing, siapa yang masuk dan siapa yang bekerja di rumah. Kriteria WFH adalah yang bisa bekerja mandiri, bertanggung jawab, menggunakan teknologi dan informasi, berkomunikasi efektif, responsif. Kami juga memperhatikan SDM dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya sedang hamil, orang yang mempunyai penyakit penyerta,





seperti diabetes, gangguan paru, ginjal, hipertensi, auto-imun. Mereka (dengan kriteria ini, red) bekerja di rumah,” jelas Sekjen Niken.

Kembangkan Sistem Absen Geotagging

Salah satu perubahan yang dilakukan Kementerian Kominfo sejak awal penerapan sistem kerja *work from home* adalah sistem absensi *geotagging*. Pegawai dapat mengakses portal absensi melalui ponselnya masing-masing untuk mengisi daftar kehadiran sesuai jam kerja harian, melalui fitur *Check in* dan *Check out*.

Begitu penerapan FWS berlaku, sistem absensi ditambahkan fitur pilihan Kantor maupun Luar Kantor. Pilihan Kantor berlaku bagi pegawai yang mendapat jadwal bekerja dari kantor (WFO). “Sekarang ini kita menerapkan absen digital, e-absensi, jadi kita absen bisa di mana saja. Ini mempermudah pegawai, juga untuk pimpinan agar bisa

memantau kehadiran kinerja dari SDM yang ada di bawah koordinasinya.

Lebih lanjut Sekjen Niken menyampaikan, Kementerian Kominfo akan segera melakukan perubahan dalam aturan FWS untuk periode berikutnya, mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang diterbitkan pada 14 Juni lalu.

“Dari Gugus Tugas baru saja mengeluarkan surat edaran baru mengenai jumlah yang masuk kantor, kita akan melakukan revisi. Semula kita kan 50%, dan yang 50% itu pun ada *shiftnya*, ada yang



berangkat pagi ada yang berangkat agak siang. Revisi akan disesuaikan dengan SE terakhir dari Gugus Tugas itu," paparnya.

Dari Rapid Test hingga Jalur Khusus

Kementerian Kominfo turut melakukan langkah-langkah *preventif* memasuki penerapan FWS. Salah satunya dengan menggelar *rapid test* bagi seluruh pegawai yang mendapat jadwal bekerja dari kantor.

"Ketika hari-hari pertama masuk, 50% pegawai yang masuk langsung kita *rapid test*. Jadi tahap pertama kita *rapid* kurang lebih 1000 orang. Dari 1000 orang itu ada 7 orang yang reaktif. Tapi setelah kita tindaklanjuti dengan tes yang lebih dalam melalui *swab test*, kita sangat bersyukur dari 7 orang itu semua dinyatakan negatif (COVID-19)," jelas Sekjen Niken.

Selain itu tindakan juga dilakukan lingkungan tempat pegawai tersebut bekerja. "Kalau ada pegawai yang reaktif, lalu tempat kerja mereka di lantai 2 misalnya, maka langsung lantai itu sementara kita tutup, kita semprot dulu disinfektan."

Menurut Sekjen Niken, penyemprotan disinfektan di tiap ruang kerja dan ruang rapat dilakukan secara rutin setiap hari libur Kementerian Kominfo. "Secara regular ini setiap hari libur kita semprot ya. Tapi begitu ada kasus seperti itu, kita tutup di lantai itu semua WFO. Dan yang bersangkutan langsung kita test lebih lanjut dengan *swab test*," jelasnya.

Kesiapan dari sisi sarana prasarana pun turut dilakukan, mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku. "Mulai masuk tangga, kita sudah kasih



tanda. Setiap tapak, langkah, diatur. Jarak untuk naik tangga juga kita atur. Yang naik dan yang turun punya jalur sendiri. Sampai di atas, sesuai protokol kesehatan, kita deteksi suhu badan, juga harus ada hand sanitizer” papar Sekjen Niken.

Pengaturan jarak pun berlaku di dalam lift. “Lift hanya untuk 4 orang dan sudah ada posisinya di mana dia harus berdiri. Setelah itu, ketika sudah masuk ke ruang kantor, ruang kantor hanya digunakan oleh 50% orang. Jadi

sekarang sih belum ada, jangan sampai ada juga,” harapnya.

Harus Komunikatif dan Responsif

Membahas tentang evaluasi kinerja pegawai selama diberlakukannya sistem kerja FWS, Sekjen Niken memuji kemampuan adaptasi pegawai Kominfo untuk tetap produktif dalam bekerja meski tidak berada di kantor. “Menurut saya adaptasi (pegawai) sangat bagus ya. Kita sekarang kan komunikasi rapat-rapat menggunakan media daring. Menggunakan Zoom, atau UmeetMe, seperti itu. Jadi kita menjadi fleksibel dalam bekerja. Karena kita tidak perlu perjalanan, kita sehari itu jadi sangat-sangat optimal bekerja.”

Namun ia kembali menegaskan, pentingnya pegawai untuk responsif akan arahan pimpinan. “Sambil penyesuaian dengan SE dari Gugus Tugas, kita evaluasi efektivitas pegawai yang bekerja di kantor maupun di rumah. Yang di rumah, apa saja yang dilakukan, responsif atau tidak, harus sampai pada *outputnya* apa. Kalau sudah bekerja dari rumah, tapi arahan dari pimpinan tidak segera direspon, ngga bisa seperti itu,” tegasnya.

Mengenai sistem kerja *shift* per 14 hari yang saat ini berlangsung, akan terus dilanjutkan hingga keluarnya peraturan baru. “Sepanjang belum ada SE dari PermenPANRB untuk mengubah SE Kemenpan, *shift* 14 hari ini akan tetap berlangsung. Nanti kalau sudah ada pengumuman PSBB selesai ataupun diperpanjang, akan kita sesuaikan,” tutur Sekjen Niken mengakhiri perbincangan siang itu.



setiap tempat duduk harus ada jarak. Itulah kenapa kita yang di rumah 50%, supaya kantor yang biasanya padat, penuh sesak, bisa lebih longgar,” jelasnya.

Menurut Sekjen Niken, protokol kesehatan ini juga berlaku bagi tamu luar yang berkunjung ke Kominfo. “Kalau ada tamu, yang suhu badannya di atas 37,3, maka yang bersangkutan langsung kita bawa ke Klinik Pertama. Dilakukan kembali *rapid test*, dan kita tindaklanjuti ke rumah sakit yang lebih besar apabila ada indikasi yang mengarah kepada gejala-gejala COVID-19. Tapi sampai

Kisah Lensa

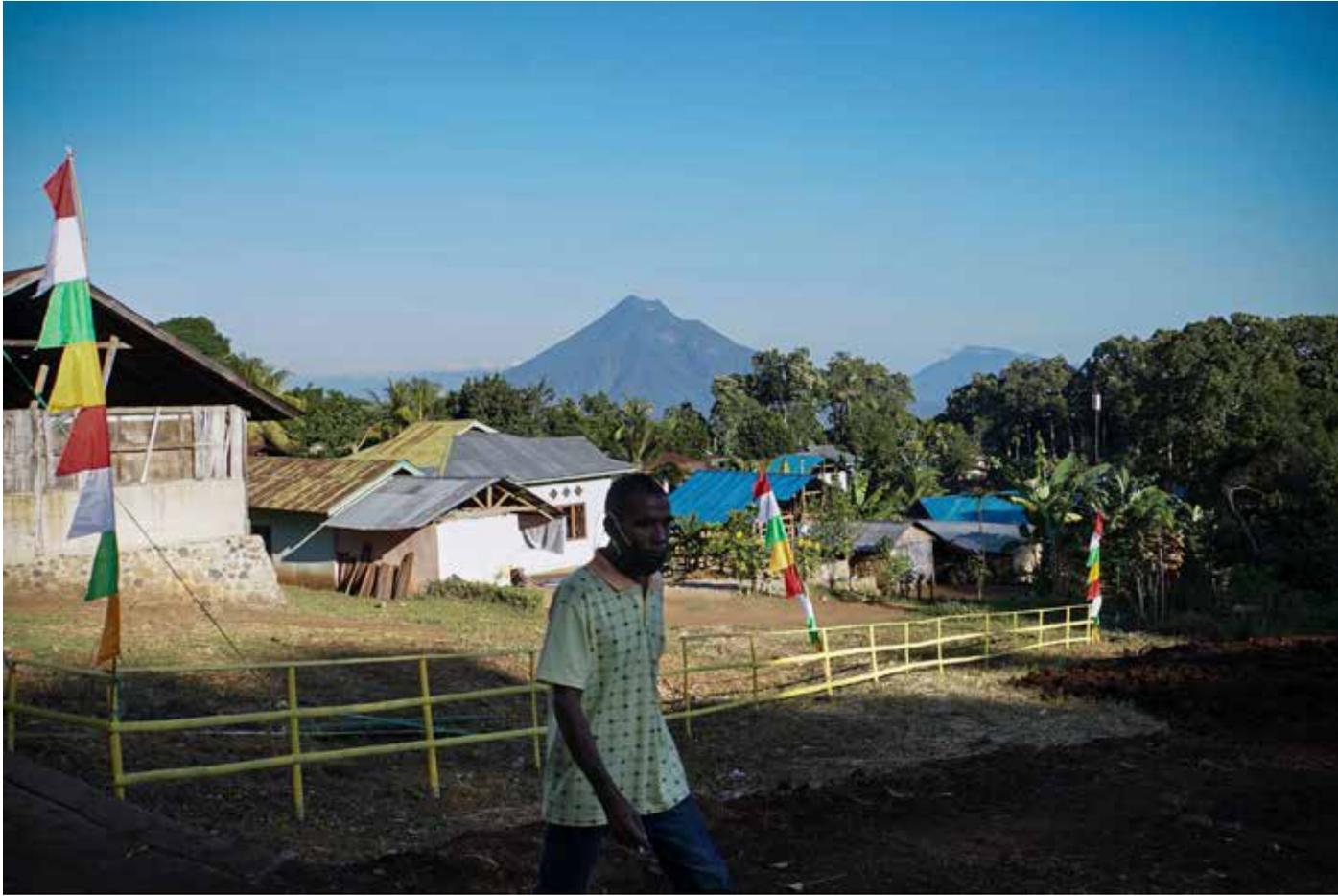
Pesawat kami bergerak pelan mendekati Bandara Gewayantana di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari pesawat, terlihat perkampungan-perkampungan warga di Pulau Adonara yang dipisahkan satu sama lain oleh lembah dan jurang terjal. Seketika terbayang di benak kami, bagaimana warga antar kampung saling berkomunikasi dengan kontur wilayah yang seperti itu. Pulau Adonara merupakan salah satu dari sekian wilayah di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang memiliki keterbatasan akses internet. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pemkab Flores Timur tahun 2017, Kabupaten Flores Timur berpenduduk 250.611 jiwa dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Secara geografi, Kabupaten Flores Timur didominasi oleh bukit dan gunung dengan rata-rata tingkat kemiringan 12-40% yang termasuk dalam kategori curam.





Kondisi geografis tersebut menimbulkan permasalahan dalam hal ketersediaan sarana telekomunikasi bagi penduduk di wilayah Flores Timur. Hanya ada sinyal dari satu operator seluler yang coveragenya tidak merata di beberapa wilayah kecamatan seperti Adonara Tengah, Adonara Barat serta Demon Pagong. Bahkan terkadang untuk mendapatkan sinyal, masyarakat di Kabupaten Flores Timur harus memanjat pohon kemiri hanya untuk sekedar mengirimkan *Short Messaging Services* (SMS) atau melakukan panggilan telepon.







Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kominfo) bertugas untuk menghadirkan layanan telekomunikasi di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Salah satu program dari BAKTI Kominfo yang menasar daerah 3T yaitu penyediaan akses internet. Hingga Juni 2020, akses internet yang dibangun BAKTI telah menjangkau lebih dari 7.764 lokasi di seluruh Indonesia, dengan 753 diantaranya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khusus untuk Kabupaten Flores Timur, saat ini sudah ada 38 lokasi akses internet yang ditempatkan di sekolah, puskesmas, kantor desa, kantor layanan publik dan lokasi wisata.







Puskesmas Demon Pagong sebagai salah satu penerima bantuan akses internet dari BAKTI Kominfo, memanfaatkan hadirnya internet ini untuk meningkatkan layanan operasional puskesmas, baik untuk mengirimkan *data update* BPJS, konsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan, mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, yang semuanya berbasis daring dan *real time*.

Foto: Indra Kusuma

Caption: Helmi Fajar Andrianto

Masyarakat Digital di Balik Tren Konsumsi Media



Selama masa *Work from Home* (WFH) akibat pandemi COVID-19, berapa jam waktu yang kita butuhkan dalam sehari menggenggam *gadget/handphone*, mengakses sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dll? Berapa jam pula waktu yang kita habiskan menonton TV, mendengar siaran radio, atau memantau perkembangan pandemi COVID-19 dengan mengunjungi situs-situs media online? Menghabiskan separuh waktu mengakses informasi seputar COVID-19 mungkin tak pernah kita pikirkan, hanya menjalaninya saja setiap saat. Bisa dikatakan, kita adalah masyarakat digital yang tengah dilema pandemi. Namun di sisi lain, kita ikut mendorong lajunya transformasi digital itu sendiri.

Semua aktivitas yang kita jalani itu tentunya demi mencegah risiko persebaran wabah Corona, hanya dengan berdiam diri di rumah. Menerapkan WFH dan *social distancing* untuk menghindari kerumunan. Dalam situasi ini, layar kaca televisi utamanya, seakan menjadi 'teman' selama menjalani masa-masa kedaruratan. Kita berbondong-bondong mencari informasi seputar COVID-19; entah kapan pandeminya berakhir, berapa jumlah pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), orang tanpa gejala (OTG) hingga berapa jumlah pasien yang meninggal dunia setiap harinya. Setidaknya, beragam informasi ini yang jadi asupan sejak Indonesia terkonfirmasi positif Corona pada awal Maret lalu.

Terlepas dari keinginan mendapatkan informasi tentang pandemi, tanpa disadari wabah COVID-19 memberikan dampak lain dalam beberapa sektor kehidupan manusia, salah satunya pada industri media massa, khususnya penyiaran (televisi dan radio). Jauh sebelum COVID-19, telah terjadi dinamika, carut-marutnya atau fluktuasi yang dirasakan oleh industri media massa lawas ini karena terancam punah, kondisi ini bahkan hampir dirasakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berkembangnya teknologi digital menyusul lahirnya fitur-fitur terbaru dari *platform* media sosial, menjadi salah satu alasan kuat semakin kurangnya minat orang mengonsumsi industri penyiaran di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Sejumlah media sosial menghadirkan layanan yang lebih efektif, mudah dijangkau kapan saja dan di mana saja hanya melalui telepon genggam. YouTube, Instagram dan Facebook misalnya, kita dengan mudah menyaksikan berbagai tayangan layaknya menonton TV di rumah. Bahkan, menyaksikan siaran langsung program acara televisi pun bisa melalui media sosial. Perkembangan teknologi digital inilah yang kemudian secara perlahan menggeser eksistensi lembaga penyiaran di mata pemirsa. Oleh karena itu, kita melihat juga hampir semua stasiun televisi swasta ikut bermigrasi ke *platform* media sosial dengan membuat kanal lembaganya untuk kembali mendapatkan perhatian pemirsa. Mungkin saja, industri penyiaran harus menggali lubang yang lebih dalam lagi untuk bersaing dengan *platform* digital yang tengah berkembang.

Ramai-ramai Nonton TV

Ancaman terhadap industri penyiaran yang mulai ditinggal masyarakat/pemirsa berdasarkan prediksi beberapa tahun lalu, rupanya tidak sepenuhnya menjadi kenyataan. Sebab, di masa pandemi COVID-19, di mana masyarakat dituntut untuk berdiam diri di rumah selama kurang lebih empat bulan terakhir, dengan sendirinya menjembatani lembaga penyiaran untuk tetap berkiprah, kembali bangkit dari keterpurukan atas ancaman kepunahan dan menunjukkan eksistensi betapa masih dibutuhkannya program televisi yang bisa disaksikan bersama keluarga di rumah selama masa COVID-19. Meskipun di tubuh industri penyiaran sendiri terjadi pergeseran dari TV analog ke digital, dari radio analog vs radio digital. Namun terlepas dari transformasinya, lembaga penyiaran harus tetap hadir di tengah masyarakat bahkan ketika pandemi ini berakhir.

Berdasarkan hasil riset dari Nielsen Television Audience Measurement (TAM) yang dirilis tanggal 23 Maret 2020, penelitian yang dilakukan di 11 kota menunjukkan rata-rata kepemirsaaan TV mulai meningkat dalam seminggu paska Indonesia dikonfirmasi positif COVID-19. Dari rata-rata rating 12% di tanggal 11 Maret meningkat menjadi 13,8% di tanggal 18 Maret, atau setara dengan penambahan sekitar 1 juta pemirsa. Artinya, dalam kurun waktu satu minggu saja, jumlah pemirsa stasiun televisi meningkat cukup drastis. Nielsen juga melakukan riset melalui durasi menonton TV yang juga mengalami lonjakan lebih dari 40 menit. Dari rata-rata 4 jam 48 menit di tanggal 11 Maret, naik menjadi 5 jam 29 menit di tanggal 18 Maret.

Dalam penelitian tersebut, Nielsen mengategorikan tiga unsur yang mengalami kenaikan. Dari tingkat kepemirsaaan TV program berita naik 25%, kepemirsaaan untuk penonton anak mencapai rating tertinggi yakni 16,2 persen, serta produk vitamin dan suplemen

Riset dari Nielsen Television Audience Measurement (TAM) yang dirilis tanggal 23 Maret 2020.



Rata-rata kepemirsaaan TV mulai meningkat dalam seminggu paska Indonesia dikonfirmasi positif COVID-19

11 Maret 2020

12%

4 jam 48 menit

18 Maret 2020

13,8%

5 jam 29 menit

meningkat 1 Juta Pemirsa dalam 1 Minggu



menyumbang total belanja iklan digital lebih dari 20 Miliar. (Sumber: *Press Releases Nielsen*, Maret 2020. <https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/COVID-19-dan-dampaknya-pada-tren-konsumsi-media/>)

Mengacu pada tiga kategori hasil riset Nielsen di atas, rata-rata peningkatan jumlah pemirsa baik untuk kategori program berita TV, program tayangan untuk anak-anak serta produk periklanan untuk kebutuhan kesehatan, semuanya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Masyarakat yang menerapkan *Work from Home*, ditemani dengan *update* informasi terkini seputar wabah Corona melalui program berita pagi, berita siang, berita petang, hingga berita malam. Selain itu, berita TV lainnya juga dikemas dengan berbagai program seperti dialog interaktif yang menghadirkan narasumber, kabar terkini, *breaking news* dan program-program lainnya.

Sedangkan untuk program tayangan untuk anak, seperti yang kita ketahui adanya kerja sama antara TVRI Nasional dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menghadirkan program Belajar Dari Rumah. Program-program tersebut sebagai pengganti larangan aktivitas belajar di sekolah selama musim pandemi COVID-19. Demikian halnya dengan produk vitamin dan suplemen yang mengalami peningkatan periklanan. Jika semakin banyak masyarakat mengkonsumsi program televisi, semakin tinggi juga belanja iklan. Contoh sederhananya seperti di *platform* digital, seorang YouTuber yang memiliki jutaan *subscriber* dan penonton, maka semakin tinggi pemasukan yang didapatkan, salah satunya dari jasa iklan.

Masyarakat Digital dan Perangkatnya

Ketika media konvensional seperti televisi dan radio memerlukan proses panjang agar bisa bangkit dari keterpurukan karena terancam punah, berbeda dengan media-media elektronik yang tetap eksis di hadapan masyarakat digital. Secara populasi, riset dari *We Are Social*, pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 175,4 juta atau sekitar 64 persen dari hampir total populasi 260 juta lebih penduduk. Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet membuat Indonesia siap menghadapi transformasi digital, disamping menyiapkan infrastruktur telekomunikasi sebagai pelengkap.

Era transformasi digital adalah era persaingan ekonomi-ekonomi global yang juga sangat bergantung pada perkembangan teknologi suatu negara. Sebab, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dinafikan bahwa hampir semua sektor kehidupan manusia saat ini bergantung pada teknologi, terutama dalam sektor ekonomi berbasis digital. Jika dalam suatu negara memiliki teknologi digital yang memadai, namun secara populasi penduduk yang memanfaatkannya dibawah rata-rata, tentu itu menjadi persoalan. Demikian juga dengan negara yang memiliki tingkat populasipenduduk terbanyak tapi kurang memasifkan industri teknologi, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sektor pertumbuhan sosial lainnya pun terhambat.

Dari 64 persen pengguna internet di Indonesia dan diprediksi akan terus meningkat, ini menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai negara terbesar ke-4 di dunia untuk terus mengejar transformasi

digital. Artinya bahwa secara populasi penduduk dan pengguna internet terbanyak, negara ini siap mengambil peluang di era transformasi digital, bahkan dalam hal ini siap untuk menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Oleh karena itu, selain infrastruktur teknologi yang harus disiapkan, literasi dan perilaku juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai masyarakat digital.

Riset dari *MarkPlus.Inc* tentang program siaran, TV berbayar dan perspektif media bertujuan untuk mengetahui peningkatan penggunaan media atau platform digital sebelum dan selama masa darurat COVID-19. Riset itu mengkategorikan tiga hal. Pertama, untuk mengetahui perubahan perilaku publik terhadap penggunaan media. Kedua, untuk mengetahui preferensi publik terkait konten media, dan ketiga untuk mendapatkan wawasan tentang harapan publik untuk pengembangan industri media lebih lanjut. Riset tersebut melibatkan 110 responden untuk individu dan umum yang terdiri dari karyawan swasta, pengusaha, ibu rumah tangga dan karyawan BUMN. Dari total responden, 49 persen berasal dari Jabodetabek dan 51 persen non Jabodetabek dengan rata-rata usia untuk responden 36-45 tahun, 25-35 tahun, di atas 45 tahun dan di bawah 25 tahun.

Selama
COVID-
19



82,7%

Facebook, Instagram dll

51,8%

TV dan radio

48.2%

YouTube

22,7%

TV berbayar

10%

Paid Online Streaming



Sebelum
COVID-
19

79,1%

Facebook, Instagram dll

56,4%

TV dan radio

42.7%

YouTube

26,7%

TV berbayar

20,9%

Paid Online Streaming

Hasil riset tersebut menunjukkan, *platform* digital yang sering diakses sebelum COVID-19 adalah Facebook, Instagram dan lain-lain sebesar 82,7%, TV dan radio 51,8%, YouTube 48.2%, TV berbayar 22,7%, *paid online streaming* seperti Netflix dan Iflix 10,0%. Sedangkan perubahan preferensi publik terkait konten media dari *platform-platform* digital tersebut selama COVID-19 yakni sosial media Facebook, Instagram dan lain-lain menjadi 79,1%, TV dan radio naik menjadi 56,4%, YouTube 42.7%, TV berbayar 26,4%, *paid online streaming* seperti Netflix dan Iflix 20,9%.

selama masa pandemi COVID-19 ini industri penyiaran TV dan Radio memiliki peningkatan kepemirsaaan dibanding sebelum wabah COVID-19 karena lebih efektif dan tidak berbayar

Dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini industri penyiaran TV dan Radio memiliki peningkatan kepemirsaaan dibanding sebelum wabah COVID-19 karena lebih efektif dan tidak berbayar. Berbeda dengan media sosial Facebook dan Instagram yang justru mengalami sedikit penurunan karena selama masa COVID-19, ada pergeseran dari sekedar mengakses media sosial ke *platform paid online streaming* atau *streaming online* berbayar dan TV berbayar. Hal ini karena masyarakat ingin mencari rutinitas baru agar tidak bosan selama menjalani karantina, WFH maupun PSBB. Masyarakat yang tadinya malas menonton TV jadi lebih sering di depan layar kaca guna mengetahui perkembangan terbaru seputar pandemi COVID-19. Juga yang tadinya sekedar mengakses media sosial yang lumrah dilakukan, menjadi bergeser ke *platform* digital berbayar.

Konsep *Three Ways Strategy*

Media massa pada hakikatnya memiliki banyak fungsi. Menurut McQuail dalam Teori Komunikasi Massa (1994), media massa berfungsi sebagai pusat informasi, kesinambungan, korelasi, dan hiburan. Media massa sebagai pusat informasi yang berperan sebagai penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai macam peristiwa, kejadian, realitas, dan banyak hal-hal lain yang terjadi di tengah masyarakat. Fungsi kesinambungan menekankan pada peran penting media massa dalam mengakui, mengekspresikan dan mendukung adanya budaya dominan dan budaya khusus yang ada di masyarakat. Fungsi korelasi untuk menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Fungsi media massa lainnya adalah untuk memberikan hiburan kepada audiens atau pembaca sebagai sarana relaksasi dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat. Demikian juga dalam aspek pendidikan, media massa berfungsi untuk merubah perilaku, karakter dan ilmu pengetahuan.

Berangkat dari beberapa fungsi media massa di atas, sedikit menggambarkan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini seluruh saluran komunikasi sangatlah penting menjadi

bagian dari kebutuhan masyarakat, sebagaimana data survey yang memetakan antara kebutuhan, perilaku konsumtif, harapan dan eksistensi media massa itu sendiri. Ada jenis media konvensional yang terancam punah, ada juga media modern yang justru hadir melengkapi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi disamping itu, meskipun berdampak baik di tengah pandemi COVID-19, tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman di dalam internal ekosistem perusahaan media juga berdampak, di mana ada PHK karyawan yang beberapa waktu terakhir sempat viral. Lantas, bagaimana media massa mampu bertahan di tengah pandemi?

Philip Kotler dalam bukunya Manajemen Pemasaran (2002) tentang strategi promosi menggunakan konsep *Three Ways Strategy*, yaitu *Push strategy* (Strategi Dorong), *Pull strategy* (Strategi Tarik) dan *Pass strategy* (Strategi Mempengaruhi).

Push strategy adalah strategi yang berusaha untuk merangsang sesuatu dalam memberikan nilai kepuasan, *Pull strategy* lebih kepada cara mengeluarkan sejumlah uang untuk iklan dan promosi konsumen untuk menciptakan permintaan dari konsumen. Jika efektif, konsumen minta produk tersebut kepada pihak pembuat

iklan atau langsung pada produsen. Sedangkan *Pass strategy* untuk menciptakan citra publik yang ditimbulkan melalui kegiatan dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat atau sosial. serta kepeduliannya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kondisi sosial dan lingkungan hidup.

Dalam kaitannya dengan tren konsumsi media di tengah pandemi COVID-19, tiga strategi tersebut yang paling relevan saat ini adalah *pass strategy* atau strategi mempengaruhi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas karena merasa jenuh dengan berdiam diri di rumah, tentunya ingin mencari hal-hal baru. Oleh karena itu, media massa perlu menghadirkan konten-konten dan program yang lebih kreatif, edukatif dan persuasif untuk mempengaruhi khalayak atau masyarakat. Jika kejenuhan itu berganti menjadi aktivitas yang mendatangkan kreativitas, edukasi dan secara persuasi mampu mengambil hati khalayak, maka peran media massa tidak hanya menyoal peningkatan tren konsumen, tetapi juga ikut mewujudkan kehadiran masyarakat digital, dan yang lebih terpenting adalah berperan memutus rantai COVID-19 atas sukseksi merubah perilaku masyarakat.

BEDAH FITUR TERKINI APLIKASI PeduliLindungi



Tahukah Kamu?

Aplikasi PeduliLindungi sudah diunduh lebih dari 3,9 juta pengguna ponsel pintar di Indonesia

(data per 12 Juni 2020)

Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi resmi Pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Saat ini, aplikasi **PeduliLindungi** terus dikembangkan untuk menyempurnakan aplikasi tersebut dengan tambahan fitur-fitur baru.

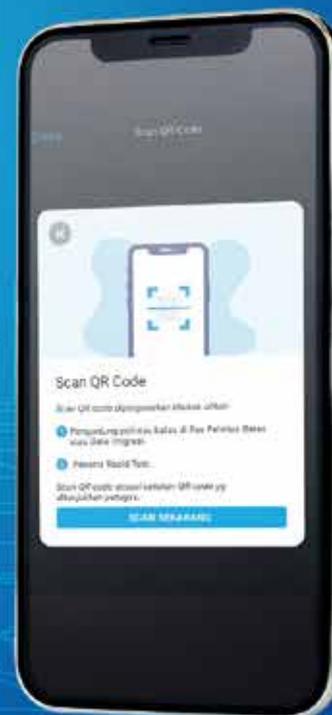
Bulan Juni ini ada tambahan fitur **Digital Diary** untuk melacak dan mencatat mobilitas user melalui **QR Code** dengan mengadopsi **GPS System**.



[Komin.fyi/iOS-PL](https://komin.fyi/iOS-PL)



[Komin.fyi/Android-PL](https://komin.fyi/Android-PL)



Adaptasi Kebiasaan Baru, Apa Kata Para Aparatur?

Memasuki bulan Juni 2020, para Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai memberlakukan tatanan kebiasaan baru dalam menjalani aktivitas pekerjaannya. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, ASN diminta untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara produktif.

Secara umum, SE tersebut menjelaskan bahwa kantor pemerintahan dapat menerapkan sistem *Work From Office (WFO)* dengan maksimal 50% kehadiran pegawai dalam satu kantor. Bagi setiap ASN yang bekerja dari kantor diwajibkan menggunakan masker, menyesuaikan jarak tempat duduk sejauh 1,5 hingga 2 meter, menjaga jarak atau *social/physical distancing* saat melakukan pertemuan, hingga mengurangi kunjungan kerja dengan melakukan rapat secara daring.

Namun, aturan yang ditetapkan pada 29 Mei 2020 ini mencantumkan penyesuaian aktivitas aparatur mengikuti situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing, termasuk lingkungan kantor dan kondisi pegawai.

Lalu, seperti apa penerapannya? Berikut adalah cerita singkat dari para ASN yang sudah menjalani tatanan adaptasi kebiasaan baru di kementerian/lembaganya masing-masing.



Elisabeth, Pegawai KPK

Penerapan BDR (Bekerja di Rumah) "memaksa" pegawai untuk lihai dalam memakai aplikasi daring. Melaksanakan kegiatan yang selama ini dilakukan secara langsung, misalnya rapat, *sharing* dokumen, dll. Namun, tidak semua kegiatan bisa diakomodasi secara daring, misalnya kunjungan lapangan dalam rangka audit. Oleh karena itu, ada baiknya jika instansi mengeluarkan kebijakan untuk penyesuaian target kinerja.

Sisi positif dari penerapan BDR adalah tren yang meningkat dari instansi dalam mengadakan *webinar/live Youtube* yang sedikit banyak meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan, dan juga sebagai sarana untuk berbagi ilmu serta belajar.

Saya pribadi awalnya cukup kesulitan dalam mengelola fokus dan menjaga produktivitas, tapi memang kelebihan dari BDR adalah waktu yang fleksibel sehingga ada baiknya untuk dimanfaatkan dengan maksimal. Yang Saya lakukan adalah menetapkan target harian untuk dipenuhi, sementara waktu untuk mengerjakannya lebih fleksibel (tidak harus di jam kerja). Saya sendiri justru lebih fokus bekerja di malam hari saat minim distraksi.

Saat ini Saya sudah mulai BDK (Bekerja di Kantor) dengan jadwal selang-seling seminggu. Instansi Saya menerapkan agar pegawai yang BDK maksimal 50% dari total pegawai. Langkah-langkah pencegahan juga sudah diambil, seperti rapid test yang sudah dilaksanakan sebanyak dua kali, penyemprotan desinfektan di lingkungan kantor secara rutin, dan penyediaan masker, *hand sanitizer*, dsb untuk seluruh pegawai.



Rayyan K.A., PNS Kementerian PPN/Bappenas

Penerapan kebijakan WFH/WFO *new normal* bukanlah kendala bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas untuk tetap produktif dan berkarya. Adanya sistem *Integrated Digital Workspace* sejak akhir tahun 2019 telah mempersiapkan pegawai Kementerian PPN/Bappenas untuk siap bekerja di manapun dan kapanpun.

Di Kementerian PPN/Bappenas, pegawai yang melaksanakan WFO diberi fasilitas *healthy kit* (vitamin, masker, *hand sanitizer*) dengan ketentuan jumlah maksimum 30-40% pegawai dari setiap unit kerja untuk menjaga kesehatan para pegawai.

Sejak penerapan WFO *new normal*, Kementerian PPN/Bappenas menambah armada antar-jemput pegawai sebagai langkah melindungi ASN dari paparan virus COVID-19 di tempat umum. Pembatasan jumlah pegawai yang diperbolehkan dalam lift justru menimbulkan semangat bagi sebagian pegawai untuk berolahraga menggunakan tangga darurat.



Winda Cattleya, PNS Kemendagri

Secara pribadi mungkin banyak hal yang bahkan sudah di persiapkan sebelum sistem kerja baru ini di terapkan. Mulai dari starter pack wajib ASN *new normal* seperti *hand sanitizer*, masker, tisu, sabun sampai dengan alat makan dan peralatan ibadah. Kedua dan yang utama kesiapan lahir batin untuk tetap ingat bahwa saat ini bekerja masih dalam keadaan harus memperhatikan *physical distancing* dan *social distancing*.

Selama kurun waktu +/- 4 bulan bekerja dengan kondisi hal yang paling sulit di rasakan justru berhubungan dengan hal-hal yang di luar kendali. Seperti Aplikasi untuk Rapat Virtual yang kadang belum sempurna, kendala internet yang sejak wabah selalu saja mengganggu di saat rapat-rapat penting, SPBE yang masih belum terimplementasi secara terintegrasi.

Sedangkan, yang menjadi tantangan baru dan cukup mengasyikkan untuk terus digali buat Saya pribadi adalah kemampuan *leadership* memajemen tim untuk selalu bekerja dalam dengan performa yang baik tanpa melupakan hambatan dan tantangan masing-masing anggota tim dalam situasi saat ini.



M. Ammar Hanif, PNS KemenPAN-RB

Pelaksanaan WFO di Kementerian PAN RB cukup disiplin sesuai dengan SE *New Normal* yang telah diedarkan. Pegawai diberikan Jadwal piket serta *shift* jam masuk untuk tetap dapat menjaga *social distancing* meski harus bekerja bersama di kantor. Selain itu, Kementerian PAN RB juga memfasilitasi dengan memberikan *hand sanitizer* dibanyak tempat, seperti dekat lift, ruang masuk, *lobby* dan tempat-tempat lainnya.

Kewajiban memakai masker pun ditetapkan kepada seluruh pegawai Kementerian PAN RB tanpa terkecuali dan kantor pun turut memfasilitasi dengan memberikan masker, *hand sanitizer*, serta vitamin kepada seluruh pegawainya. Apabila pegawai mengalami gejala sakit (batuk/pilek/demam) maka dapat tidak mengikuti jadwal WFO yang telah ditetapkan dan menggantinya dengan WFH untuk mencegah adanya penularan penyakit. Kebijakannya sudah sangat baik, namun masih ditemukan beberapa pegawai yang terkadang menurunkan maskernya saat berbicara/batuk/tertawa atau hal lainnya. Menurut saya seharusnya tidak diperbolehkan karena hal-hal seperti itu dapat terjadi penularan.

Terkait dengan pekerjaan, di unit pekerjaannya lebih banyak rapat dan koordinasi dengan instansi lain. Kegiatan ini dapat dilaksanakan tanpa kendala meski harus WFH. Dengan telah diedarkannya SE *New Normal*, seluruh pegawai mendapatkan jadwal piket yang dibagi kembali menjadi *shift* 1 dan 2, WFO sendiri menjadi nilai tambah karena membuat kita lebih fokus bekerja karena kalau di rumah bekerjanya jadi mudah teralihkan.



Rizki Rachman, ASN KLHK

New Normal versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat WFO unit kerjaku cuma 10 orang dan tempat kerja kami berjarak min 1 meter antara 1 pegawai dengan pegawai yang lain jadi sudah menerapkan *physical distancing* juga. Kita pun semua sudah aware dengan memakai masker tapi masih ada keluhan karena pemakaian masker kain yang terlalu lama kan membuat kelembaban jadi kami akhirnya memutuskan untuk memakai 3 masker kain setiap hari agar tidak terlalu engap.

Kalau lagi kerja juga kami menghadap komputer masing-masing sih memang dicopot, tapi kalau memang ada keperluan berbicara dengan rekan kantor kami semua sudah aware dengan otomatis memakai masker.

Hand sanitizer sendiri sudah tersedia di setiap sudut ruangan. Begitu pun dengan pemakaian lift, meski sudah dikurangi dari kapasitas per lift untuk menampung 15 orang menjadi 5 orang saja. Tetapi karena memang yang WFO tidak begitu banyak jadi lift tetap *accessible*.

Minggu lalu juga masih dapet supply asupan tambahan gizi dan vitamin, tapi mulai minggu ini sudah tidak ada. Sedangkan, di kantin pun tidak semua bisa berdagang jadi para pedagangnya diselang-seling saja biar ada jarak dan tidak terlalu padat di kantin. Teman-teman *Office Boy* juga sudah diinstruksikan untuk sering membersihkan *handle* dengan disinfektan.

Penerapan protokol kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR sudah cukup lengkap. Setiap pegawai diberikan madu, vitamin, susu beruang setiap bulannya. Para pegawai KemenPUPR juga diberikan masker dan sudah diimbau bagi yang bekerja di kantor untuk membawa alat makan dan minum masing-masing hingga peralatan salad sendiri. Setiap ruangan pegawai dibatasi dengan diberikan jarak antar pegawai dan ruangnya selalu dibersihkan hingga meja kantor. Kami pun sudah diberikan beberapa kali pengecekan kesehatan melalui rapid test, suntik vaksin flu dan ada rencana vaksin pnenumonia.

Memasuki minggu ke-3 Juni 2020, Ditjen Bina Marga (DJBM PUPR) pun sudah mulai menerapkan pembagian jadwal kerja bagi pegawai di lingkungan DJBM melalui 3 skema, yakni *Work From Office*, *Work From Co-Working Space*, dan *Working From Home*. Langkah ini ditempuh untuk menjaga efektivitas kinerja organisasi sekaligus mematuhi anjuran Pemerintah terkait protokol *new normal* di masa pandemi. Untuk membatasi jumlah pegawai di satu lokasi (kantor), saat ini ada empat *co-working spaces* yang telah dimanfaatkan untuk pegawai yang berada pada satu kawasan sesuai domisili. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis mengingat ini pertama kalinya dilaksanakan, namun kami merasa DJBM telah memikirkan dengan baik agar ada keseimbangan antara kepentingan kantor dan kesehatan pribadi dan keluarga pegawai (*work-life balance*) dengan menyebar pegawai ke beberapa lokasi kerja. Kami berharap sejalan dengan waktu, teknis pelaksanaan *work from co-working space* dapat disempurnakan.

Hussein Heykal, PNS KemenPUPR





dr. Tri Danu Warsito, PNS Kemenkes

Sebenarnya seperti apa sih penerapan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Apakah sudah sesuai dengan Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/328/2020? Sebagai pegawai di Kementerian Kesehatan, saya akan berbagi cerita sedikit.

Setiap pegawai yang WFO harus menerapkan protokol kesehatan dari rumah, selama di perjalanan dan setelah sampai di kantor, Untuk sistem kerja, pegawai yang WFO maksimal 50% dari jumlah pegawai di setiap satuan kerja, kemudian dibagi lagi menjadi 2 shift untuk membatasi jumlah orang yang berada dalam 1 ruangan.

Untuk pegawai yang WFO, wajib menggunakan masker, dan di pintu masuk gedung dilakukan pengecekan suhu tubuh saat memasuki ruangan. Pegawai dengan suhu di bawah 37.3 derajat akan diberikan stiker hijau sebagai penanda bahwa pegawai tersebut sehat. Trus bagaimana jika ditemukan ada pegawai dengan suhu lebih dari 37.3 derajat? Pegawai tersebut akan diminta ke poliklinik kementerian untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

Saat masuki lift, sudah disediakan *hand sanitizer* yang ditempel di sebelah lift dan ada di semua lantai. Di dalam lift pun sudah diberikan penanda untuk jumlah orang dan arah berdiri masing-masing orang.

Petugas kebersihan selalu melakukan pembersihan tombol lift, *railing* tangga, handel pintu, atau benda-benda yang dipegang orang banyak. Dan dipastikan berulang kali selama sehari agar semua benda tersebut tetap bersih.

Banyak juga media sosialisasi dan edukasi terkait wajib pakai masker, etika batuk, cuci tangan pakai sabun yang di tempel di setiap ruang publik seperti lift, toilet, ruang tunggu dan lokasi yang dilalui banyak orang sebagai pengingat. Sedangkan untuk kebersihan area kerja seperti meja kerja menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai untuk secara rutin membersihkannya.

Untuk tetap menjaga *physical distancing* antar pegawai dengan tamu, sudah dilakukan pemasangan pembatas atau tabir kaca pada meja resepsionis.

Di masing-masing ruang kerja yang memiliki ruang kerja cukup luas sudah diatur jarak antar meja (pengaturan tempat duduk) sedangkan yang ruang kerja terbatas diberikan seperti mika atau benda penyekat untuk mengurangi interaksi yang terlalu dekat antar pegawai.

Kegiatan rutin lainya sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan di kantor kami adalah diadakan olahraga bersama setiap jumat yang dipandu oleh instruktur senam yang dapat diikuti secara langsung di kantor maupun disaksikan melalui *livestreaming* melalui media sosial.

So over all, mudah-mudahan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Kemenkes bisa mencegah terjadinya episenter baru untuk penularan COVID-19.

Asti Indah, PNS Kemendikbud



Bersyukur sekali *New Normal* di Kemendikbud sangat mempertimbangkan berbagai aspek untuk memilih siapa yang harus memulai WFO siapa yang WFH. Contohnya seperti aku, dikarenakan dari Citayam harus naik KRL dan MRT setiap hari dikasih kesempatan untuk *full WFH*. Apalagi melihat tren penyebaran yang makin meningkat, kebijakan seperti ini seharusnya diterapkan bagi semua yang menggunakan transportasi umum. Harapannya semoga tren penyebaran COVID-19 ini segera menurun. Aamiin.

Imam Suryanto, Kemendag



Penerapan WFH dan WFO di Kemendag sudah berjalan dengan baik. Pegawai sudah melakukan WFO dengan anjuran mengikuti protokol kesehatan dan protokol saat berada di kantor. Pegawai bekerja dengan sistem *shifting* sehingga tidak terjadi penumpukan saat di kantor.

Kalau situasi WFO sendiri di kantor hanya sekitar 25% yang masuk. Pokoknya setiap bidang ada perwakilan staf yang masuk hanya 1-2 orang saja.

Untuk protokol kesehatan di Kemendag juga sekarang sudah ada *disinfectant box* di setiap pintu masuk gedung. Ada sensor digital untuk cek suhu tubuh dan di setiap pintu masuk ada *hand sanitizers*.

Oh ya, *disinfectant box* juga ada di pintu masjid, jadi pas sholat Jumat juga aman. Ada cek suhu juga sebelum memasuki masjid dan di kasih jarak setiap syaf.

Gunawan Wicaksono, PNS Kemenkeu



Di Kemenkeu sendiri sudah ada Keputusan Menteri Keuangan tentang FWS dan kajian tentang FWS sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2019. Jadi istilahnya kami sudah ada persiapan kalau dari segi layanan *e-office* dan semacamnya hanya jadinya implementasi dipercepat.

Namun, di unit saya sudah sejak bulan Maret diberlakukan pembagian WFO dan WFH jadi gak ada yang berbeda pada saat penerapan *new normal* ini, memang sejak bulan Maret sampai Mei itu unit saya, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, yang rutin masuk kantor setiap hari. Karena memang jenis pekerjaannya yang mengurus administrasi persuratan Menteri dan perlu tanda tangan basah Menteri sampai mendukung kegiatan rapat *online* Menteri/Wamen.

Beruntung saya punya tim kerja yang sangat *fully support* dalam menyelesaikan pekerjaan secara *online* walaupun sedang WFH. Sehingga beban kerja bagi yang WFO pun tidak terlalu berat, ya rasanya hampir sama seperti saat normal cuma bedanya ada yang di rumah ada yang di kantor :)

Buat yang WFO di Kemenkeu ada kriteria tidak boleh pake kendaraan umum dan harus isi *asesment* kesehatan secara *online* sebelum berangkat kerja sehari sebelumnya. Menurut saya, penerapan *new normal* di Kemenkeu cukup mengikuti anjuran pemerintah, tempat cuci tangan portabel banyak disediakan, sosialisasi lewat medsos juga masif untuk pegawai, dasar aturan juga jelas, fasilitas penunjang seperti *hand sanitizer* tersebar di tiap lantai dan penyemprotan disinfektan juga rutin dilakukan.



**Menteri Komunikasi dan Informatika
Johnny G. Plate**
dalam Program Indonesia Bicara TVRI Kamis,
18 Juni 2020

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia:

I Love Indonesian Made

“Pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk berkreasi. Keterbatasan justru mendorong kita untuk tetap berinovasi, bertransformasi, menggali potensi diri dan menciptakan peluang-peluang. Banyak lagi produk-produk Indonesia yang membanggakan, produk-produk industri kreatif dalam negeri yang tidak kalah bagus, desain dan kualitasnya pun tidak kalah dengan produk-produk luar negeri.”

Presiden Joko Widodo dalam Peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia | Kamis, 14 Mei 2020

Saya menggarisbawahi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Saat ini PDB (Produk Domestik Bruto) nasional kita ditopang oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 60%. Jadi, kekuatan ekonomi kita bertumpu pada UMKM.

Untuk diketahui, ada 64 juta UMKM di Indonesia, 9,4 juta di antaranya sudah *Go Online*. Ini yang kemudian menjadi tantangan bersama agar kita, khususnya UMKM, berjaya di dalam ruang digital kita sendiri.

Sejak tahun 2017 Kementerian Kominfo sudah membangun satu Gerakan, *UMKM Go Online*, yang sejalan dengan gagasan Bapak Presiden di mana saat sebelum pandemi COVID-19, ingin menjadikan Indonesia sebagai Digital Hub Asia. Kominfo kemudian bergerak di sektor tersebut untuk memanfaatkan ruang digital dan *marketplace*.

Inilah yang menjadi tantangan kita bersama di saat era COVID-19, digital atau elektronik ekonomi (*e-commerce*) menjadi tulang punggung ekonomi, termasuk untuk keperluan UMKM. Sehingga transformasi digital harus juga diisi dengan migrasinya UMKM *offline* ke *online*. Potensinya begitu besar dan harus kita dukung bersama-sama.

Program Gerakan Nasional *UMKM Go Online* mengajak UMKM untuk bertransformasi ke *online*, memudahkan mereka bertemu dengan *merchant*, menjual produknya secara *online* di *platform* digital, bekerja sama dengan *platform* digital nasional seperti Bukalapak dan Tokopedia.

Berbeda dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia adalah gerakan di sektor produksi, bagaimana kita memproduksi buatan Indonesia yang memenuhi standar kualitas, daya jangkauan harga, dan *delivery* yang cepat serta kualitas produk yang cocok dengan kebutuhan kita untuk dibawa ke *marketplace* dalam memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia.



Gerakan Bersama Pemerintah dan Komponen Masyarakat

Indonesian
Made

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia adalah satu gerakan gotong royong yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar kebutuhan konsumsi atau permintaan dalam negeri kita juga diisi dengan *supply* dari dalam negeri. Kalau tidak akan diisi oleh *supply* atau barang-barang UMKM produksi bangsa-bangsa lain. Itu sangat berbahaya untuk fondasi perekonomian nasional kita yang 60%-nya didukung oleh UMKM. Jadi, kalau ditanya, Bangga Buatan Indonesia adalah satu gerakan nasional untuk mendorong sisi produksi yang dilakukan oleh UMKM untuk memenuhi kualitas yang baik, standar *delivery* yang cepat dan untuk memenuhi daya saing harga yang kompetitif, bersaing dengan produk-produk dari bangsa lain guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri sendiri. Setidaknya, ini akan mendorong substitusi impor dan menghemat devisa kita, karena devisa kita tidak keluar dan itu digunakan untuk kepentingan perekonomian di dalam negeri.

Produksi dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional UMKM Go Online juga harus kita tingkatkan. Dengan demikian UMKM akan mengisi ekonomi digital di dalam negeri sendiri. Sangat penting dilakukan diseminasi, mendorong dan menyampaikan kepada rakyat untuk berpindah dari *offline* ke *online* dengan penggelaran teknologi informasi ke seluruh Nusantara. Waktunya sekarang teknologi informasi kita diisi oleh UMKM atau produksi-produksi buatan dalam negeri sendiri.

Jadi, dapat saya sampaikan bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia juga adalah gerakan masyarakat, tidak saja pemerintah tapi keseluruhan komponen masyarakat. Inilah gerakan kegotong-royongan nasional.

Dari sisi pemerintah, ada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, dan semua Kementerian/lembaga terlibat di dalamnya. Tetapi tidak cukup hanya pemerintah, dia harus menjadi gerakan masyarakat dalam kegotong-royongan bersama-sama.

Nah, untuk itu masyarakat secara keseluruhan tidak saja UMKM yang bergerak, tetapi konsumennya juga harus mencintai produk dalam negeri. Itu yang paling penting, **I love Indonesian Made**. Suka, senang dan cinta buatan Indonesia sebagai satu gerakan kegotong-royongan bersama-sama lintas kementerian, lintas lembaga, lintas hirarki pemerintahan pusat dan daerah, juga di lintas komponen masyarakat. Seluruh simpul spiral kekuatan negara harus bisa mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia, karena ini gerakan yang mendukung mulai dari sisi yang hulu (produksi) sampai yang hilir (konsumsi).

Langkah Strategis Kominfo, Latih Talenta Digital

Langkah-langkah strategis tentu dilakukan oleh seluruh komponen, termasuk lintas Kementerian/Lembaga masing-masing. Kementerian Keuangan memberikan intensif di sisi keuangan, kredit, perpajakan. Kementerian Perdagangan bagaimana memfasilitasi perdagangannya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mendorong jenis-jenis kreativitas yang dibangun, termasuk Kementerian Kominfo di dalamnya untuk memastikan infrastruktur digital tersedia dengan baik, ruang digitalnya digunakan dengan baik, dan harus menghasilkan talenta digital melalui program-program talenta digital.

Salah satu program besar Kominfo untuk tingkat bawah disebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital atau Siberkreasi. Selain itu, untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil menengah, melalui pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) yang dilakukan secara terus-menerus. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, pelatihan DTS yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, saat ini kita lakukan melalui program pelatihan online (Online Academy).

Untuk diketahui, angkatan pertama program DTS di tahun 2020 sudah berjalan, Saya kira akhir bulan ini berakhir. Saat ini kita sudah masuk di angkatan kedua yang jumlahnya untuk tahun ini sekurang-kurangnya sekitar 50 ribu peserta. Mereka nantinya akan menjadi talenta-talenta digital untuk mendorong UMKM bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Siberkreasi sebagai gerakan literasi digital yang (secara besar-besaran dilakukan menjangkau masyarakat, para petani, nelayan, peternak, ultra mikro dan UMKM itu sendiri.

Dari sisi kebutuhan *digital talent*, dalam 15 tahun ke depan Indonesia setidaknya membutuhkan 9 juta *digital talent*, dan itu berarti sekitar 600.000 per tahunnya. Ini tantangan bersama-sama, di mana Kominfo melakukan stimulus dengan menghasilkan 50-60 ribu, sedangkan sisanya akan dihasilkan oleh ekosistem *global company* dan mitra-mitra kerja. Tetapi kalau kita lihat dari sisi peran e-commerce atau digital ekonomi, maka pandemi COVID-19 ini justru mendorong lebih cepatnya transformasi digital dan mendorong ekonomi digital itu sendiri. Dari sisi jumlah partisipasi atau transaksi yang masuk kepada ekonomi digital meningkat sangat tajam. Menjadi tantangan kemudian adalah peningkatan jumlah itu harus juga sejalan dengan peningkatan nilai transaksi.

Kita melihat bahwa belum *nyambung* antara peningkatan jumlah yang ikut serta di dalam ekonomi digital dengan peningkatan volume serta nilai transaksi. Hal ini sebetulnya memberikan gambaran bahwa memang benar terjadi kontraksi perekonomian di dalam negeri, sebagaimana kontraksi ekonomi global. Nah, kontraksi ekonomi global sendiri menurut Bank Dunia terjadi negatif 5%, dan memberikan dampak juga terhadap kontraksi ekonomi dalam negeri. Sehingga Bapak Presiden dalam hal ini mendorong di setiap sektor pemerintahan dan sektor dunia usaha melakukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary decision*), kebijakan dan kecepatannya mengambil keputusan-keputusan di sektor ekonomi agar mendorong ekonomi kita bisa bertahan di situasi COVID-19, sekaligus

mengajak peran serta dari UMKM dan ekonomi digital secara keseluruhannya untuk mengambil bagian dan bertumbuh, agar kita tidak terjebak ke dalam kontraksi ekonomi dunia yang berdampak pada kontraksi ekonomi di dalam negeri, dan tumpuannya ada di ekonomi digital.

Karenanya, ekonomi digital harus menjadi perhatian lintas kementerian/lembaga dan ekosistemnya, baik pemerintah bersama dengan platform-platform digital, *marketplace*, juga dalam hal ini belanja pemerintah. Tidak saja belanja di sektor privat, tapi bagaimana menggunakan stimulus dari belanja pemerintah atau belanja APBN, maka di situ juga terlibat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk menampung belanja kebutuhan-kebutuhan pemerintah dengan menyerap produk-produk buatan dalam negeri.

Sekali lagi, ini penting sekali agar ekonomi di situasi COVID-19 ini, kontraksi ekonomi tidak diisi oleh produk-produk dari bangsa lain, tapi produk hasil karya anak bangsa sendiri. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini luar biasa, sejak di-*launching* oleh Bapak Presiden pada 14 Mei yang lalu, maka transformasi atau migrasi dari *offline* ke *online* begitu besar, sudah ratusan ribu UMKM yang bergabung ke ekonomi digital dalam sebulan terakhir sejak di-*launching*.

Kita harapkan gerakan ini terus meningkat, mengingat dari 64 juta UMKM baru 9,4 juta yang masuk ke *online*. Kalau dalam sebulan ini sudah lebih dari 100.000 UMKM yang masuk ke *online* bisnis kita, maka begitu akan luar biasa jadinya apabila gerakan ini betul-betul menjadi gerakan kegotong-royongan untuk semuanya bermigrasi ke ekonomi digital, mengisi *e-commerce*, *marketplace* dan semuanya akan bertumbuh dan berkembang. Kekuatan nasional ini penting sekali kita lakukan.

Saya sangat mendorong di masa COVID-19 ini transformasi digital, ekonomi digital secara masif harus kita gerakkan, karena COVID-19 kita jadikan momentum penting bersama-sama untuk mendorong dan mengkampanyekan ekonomi digital yang digunakan oleh bangsa sendiri, oleh pengusaha-pengusaha kita sendiri, dan menghasilkan satu gerakan Bangga Buatan Indonesia dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional sebagaimana ekonomi bangsa-bangsa lain.

Sumber Foto :

Antara Foto | Unsplash

Mengenal Kendala dan Upaya Migrasi UMKM *Go Online*

Ketika berbicara mengenai cara merubah paradigma UMKM untuk bermigrasi dari *offline* ke *online*, ada tiga kendala yang dihadapi. Pertama, dari sisi **Produksi**. Memang selama ini sisi produksi menjadi tantangan kita agar bisa menghasilkan produk-produk yang secara kualitasnya baik dan bisa bersaing di pasar. Kita juga perlu memastikan kontinuitas atau kelangsungan daripada produksi itu sendiri. Jadi, kalau sudah memenuhi standar kualitas, secara kontinuitas berlangsung terus menerus produksinya bisa berjalan. Ini tantangan kita di sisi produksi di mana juga ada *supply* bahan baku, proses produksi yang harus menjadi perhatian kita.

Kendala kedua di sisi **Distribusi**. Pertanyaannya, bagaimana barang atau hasil produksi bisa di *delivery* (pengiriman) yang tepat waktu, karena masyarakat butuh ketepatan dan kecepatan. Saat ini logistik dalam negeri kita tentu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga akan memudahkan pergerakan barang dari satu titik ke titik yang lain. Ketiga, dari sisi **Konsumsi**. Jika dulu orang

suka *branded* (bermerek) karena asosiasi produksi dari luar negeri, sekarang ini *branded* punya kendala sendiri di negara masing-masing. Tetapi saat ini justru harus menjadi kekuatan kita, gerakan masyarakat kita untuk merubah *mindset*-nya, merubah cara berpikirnya bahwa *branded* itu bukan produksi asing, *branded* adalah produksi lokal yang harus kita banggakan dengan produksi lokal. Ini kendala dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi.

Kita juga mempunyai kendala yang lain, misalnya dari sisi finansial dan insentif. Pemerintah melalui otoritas fiskal memberikan insentif fiskal yang banyak, juga menyediakan insentif-insentif pembiayaan yang bisa langsung kepada masyarakat. Nah, kecepatan di dalam penyaluran insentif-insentif juga kita butuhkan, karena masyarakat khususnya para petani, nelayan, peternak, usaha rumah tangga yang bergerak di sektor UMKM belum terbiasa dengan persyaratan-persyaratan dan dokumen-dokumen kredit perbankan yang rumit. Persoalan ini harus kita bantu agar mereka lebih cepat mendapatkan insentif dan fasilitas pembiayaan dari stimulus-stimulus fiskal dan pembelian kredit dari perbankan.

(Mengatasi) Berbagai kendala yang disebutkan di atas, tentu pemerintah telah menghadirkan berbagai upaya, salah satunya melalui tersedianya akses internet yang baik kepada masyarakat (*quality of service*).

Dalam kaitan dengan itu, *backbone* untuk internet disediakan oleh operator selular. Kementerian Kominfo bekerjasama dan memonitor terus-menerus dengan operator selular untuk memastikan infrastruktur telekomunikasi dalam keadaan baik dan bisa menjangkau masyarakat. Bagi wilayah 3T di mana memang secara komersial belum tercover untuk perusahaan operator selular, Kominfo melalui Badan Layanan Umum yaitu

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengambil bagiannya. Hingga saat ini ada sekitar 7.634 titik di mana internet disediakan yang tersebar di wilayah 3T untuk mendukung kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi digital masyarakat di desa-desa.

Tidak saja itu, masih banyak lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan penggelaran infrastruktur digital bisa merata secara nasional. Indonesia sebagai negara besar dan luas sudah membangun berbagai jenis infrastruktur digital, mulai dari jaringan *broadband fiber optic*, BTS, menggunakan satelit dan *microwave link*. Tetapi karena begitu besarnya Indonesia, masih banyak yang harus kita selesaikan. Tentu pemerintah khususnya Kominfo bersama-sama ekosistemnya akan terus melengkapi kebutuhan infrastruktur digital, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini semuanya membutuhkan internet.

Memang pekerjaannya tidak gampang dan tidak mudah, tetapi untuk kepentingan Indonesia, seluruh spiral kekuatan nasional kita gerakkan energi positifnya. Kita meyakini akan sukses untuk mempercepat transformasi digital, mengajak UMKM bertransformasi dan migrasi dari *offline* ke *online*, dari pasar fisik ke pasar-pasar digital, dan *e-commerce* bertumbuh dengan baik karena memang saatnya adalah era digital. Jadi, COVID-19 mendorong kita semuanya secara cepat masuk ke era *digital society* atau masyarakat digital.

Sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional, UMKM Jangan Dipersulit

Menyoal peran strategis Bangsa Buatan Indonesia, sebagai gambaran ada wilayah-wilayah yang memang hingga saat ini sedang saya siapkan untuk memastikan yang belum ada internet 4G harus bisa cepat dibangun infrastruktur 4G. Karena tanpa tersedianya 4G tentu tidak tersedia internet. Kalau internet tidak tersedia, UMKM digital tidak bisa kita lakukan. Kita sedang menyusun dan menyiapkannya di samping berkejaran waktu dengan COVID-19, tapi pemetaan keseluruhan sudah dilakukan. Kita tahu titik-titik mana yang harus segera disiapkan, hanya tentu pada saat yang sama bahwa ada tekanan kontraksi ekonomi seperti yang sudah saya jelaskan.

Dengan cara demikian, kita mendorong agar fondasi utama perekonomian kita yaitu UMKM tetap bisa hidup dan bisa bergerak, tidak saja yang *online* tapi banyak juga UMKM yang tidak *online*. Maka sesuai dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang kita miliki harus secara bersamaan kita dorong. Di sinilah peran strategis dari Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia, karena menyerap hasil produksi di dalam negeri sendiri. Jadi, perputaran ekonomi di saat di mana terjadi krisis kesehatan COVID-19 yang membatasi ruang gerak lintas batas negara, justru harus diisi dengan ekonomi domestik dan kekuatan di dalam negeri.



Ekosistem digital berarti secara menyeluruh komponennya, mulai dari yang paling hulu infrastruktur teknologi komunikasi dan sampai ke hilir yaitu *over the top business* atau *marketplace*. Bahkan ini semuanya harus kita dorong secara bersama-sama. Tetapi begitu kita sebut Bangsa Buatan Indonesia, itu artinya satu gerakan bersama kegotongroyongan, gerakan masyarakat, gerakan yang sifatnya partisipatif seluruh komponennya harus ikut bersama-sama. Itulah ekosistemnya.

Ekosistem yang kita bangun ini harus juga bersifat komprehensif, mulai dari legislasi dan aturan-aturannya. Jangan sampai ada aturan-aturan yang menghambat, baik dari tingkat Undang-Undang di pemerintah pusat sampai di peraturan tingkat daerah. Sekali lagi, Jangan sampai menghambat ekonomi digital, menghambat UMKM kita bermigrasi ke online.

Berbagai Peraturan yang terkait dengan sektor pembiayaan, apakah aturan-aturan di perbankan secara mikro, kegiatan perbankan maupun regulasinya di OJK juga diatur agar UMKM ini bisa mendapatkan pembiayaannya dengan cepat tanpa dibebani dengan terlalu banyak persyaratan yang membuat mereka rumit.

Harus disadari bahwa UMKM kita ditopang oleh ekonomi yang berbasis sangat kerakyatan, para petani, peternak, nelayan, industri rumah tangga yang tentu tidak ingin disibukkan dengan terlalu banyaknya persyaratan-persyaratan administratif. Demikian halnya dalam membuka ruang mereka agar pada saat masuk ke ruang digital atau ekonomi digital di *e-commerce* jangan sampai juga diperhambat dengan terlalu banyak syarat-syarat yang membuat mereka sulit, itu juga menjadi perhatian kita.

UMKM

Pada saat di mana kita mengajak mereka untuk masuk di dalam ekosistem, kenyamanan berusaha itu harus ada, kepastian perusahaannya harus ada dan kendala-kendala yang mereka hadapi harus kita mitigasi dan harus kita atasi. Di sinilah tentu peran pemerintah daerah, secara khusus pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa karena berhubungan langsung dengan mereka. Saya mengetahui betul bagaimana Menteri Desa mempunyai komitmen yang kuat untuk mendorong sektor ekonomi pedesaan. Menteri Koperasi dan UKM juga mempunyai komitmen yang kuat mendorong agar UMKM menjadi soko guru ekonomi betul-betul bisa bertumbuh di saat COVID-19 ini. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga yang selama ini kita lakukan melalui rapat-rapat untuk memastikan bahwa UMKM justru harus menjadi tonggak penting, karena mereka adalah penyumbang 60% lebih dari GDP dan justru yang menjadi penyelamat ekonomi negara pada saat krisis. Ini sudah beberapa kali terbukti.

Oleh sebab itu, sekarang momennya semua fasilitas infrastruktur digital yang disediakan menghasilkan ekonomi digital yang begitu besar untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan perekonomian nasional yang paling utama. Waktunya kita mengajak masyarakat untuk bergerak bersama, partisipasi masyarakat melalui tindakan-tindakan nyata, langkah-langkah nyata, membeli produk-produk bangsa buatan Indonesia secara nyata tidak boleh hanya sekedar slogan. Ini adalah satu gerakan masyarakat, gerakan kita bersama.

Kita meyakini bahwa dengan semangat gotong royong dan melalui Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia, Indonesia akan berhasil untuk mengatasi tekanan demi tekanan, termasuk tekanan ekonomi, kontraksi-kontraksi ekonomi di saat di mana terjadinya wabah pandemi COVID-19. Marilah secara bersama-sama kita bangun ekonomi nasional kita melalui Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia.

an Nasional

Bangsa Buatan Indonesia

AKSI KEMENDIKBUD

Kemendikbud Terbitkan Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang menyampaikan Surat Edaran Nomor 15 ini untuk memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease* (COVID-19).

“Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sekjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat COVID-19,” disampaikan Chatarina pada Bincang Sore secara daring, di Jakarta, pada Kamis (28/05/2020).

Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

“Pilihannya saat ini yang utama adalah memutus mata rantai COVID-19 dengan kondisi yang ada semaksimal mungkin, dengan tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan. Prinsipnya keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga satuan pendidikan adalah menjadi pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah,” ungkap Chatarina.

Sumber Berita : kemdikbud.go.id

Sumber Foto : antarafoto

Kembali, Chatarina mengingatkan bahwa kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum serta difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. "Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik," katanya.

Chatarina menambahkan aktivitas dan penugasan BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. "Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif, serta mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua," terangnya.

Tahun Ajaran Baru Tidak Harus Tatap Muka

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad menerangkan bahwa lazimnya, kalender pendidikan untuk jenjang PAUD Dikdasmen ditentukan pada minggu ketiga di bulan Juli. Ditegaskan Hamid, mengingat saat ini

“

Ketika tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah menggunakan PJJ, maka ini yang akan diperkuat. Kami akan support melalui Rumah Belajar, TV Edukasi, kerja sama dengan TVRI akan diperpanjang, kemudian penyediaan kuota murah oleh para penyedia telekomunikasi

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad

tengah terjadi pandemi COVID-19, tahun ajaran baru tidak sama dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah.

Metode dan media pelaksanaan BDR dilaksanakan dengan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi kedalam dua pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (*daring*) dan luar jaringan (*luring*). "PJJ ada yang *daring*, ada yang *semi daring*, dan ada yang *luring*," kata Hamid.

Untuk media pembelajaran jarak jauh *daring*, Kemendikbud merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar. Selain itu, warga satuan pendidikan juga dapat memperoleh informasi mengenai COVID-19 di <https://covid19.go.id> serta di laman <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id>.

Kemudian, untuk metode pembelajaran jarak jauh secara *luring*, warga satuan pendidikan khususnya peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikbud antara lain program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.



PEDOMAN PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH SELAMA DARURAT COVID-19 DI INDONESIA

Surat Edaran Sekretaris Jenderal No.15 Tahun 2020



1

Langkah-langkah pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama masa darurat bencana penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



2

Pelaksanaan pedoman ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan dukungan dari berbagai pihak.



3

Sebagai acuan oleh Kemendikbud dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BDR, serta oleh Satuan Pendidikan, Guru, Peserta Didik dan Orang tua dalam melaksanakan BDR.



4

Pedoman lengkap dapat diperoleh melalui



<https://bersamahadapikorona.go.id>

METODE PELAKSANAAN BDR



DARING

Pembelajaran jarak jauh Dalam Jaringan/online (Daring), menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring



LURING

Pembelajaran jarak jauh Luar Jaringan/offline (Luring), menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar



PERAN: PENDIDIK

Pendidik memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.



Pendidik – Pembelajaran Daring, harus:

- ✓ Membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua/ wali dan peserta didik.
- ✓ Membuat RPP yang sesuai minat dan kondisi anak
- ✓ Menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik
- ✓ Memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar:
 - a. Memastikan persiapan untuk peserta didik
 - b. Melakukan refleksi dengan peserta didik
 - c. Menjelaskan materi yang akan diajarkan
 - d. Memfasilitasi tanya jawab
- ✓ Bila tanpa tatap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orangtua/ wali untuk penugasan belajar
- ✓ Mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati
- ✓ Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional dan ajakan melakukan olah raga/ kegiatan fisik

“Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota **dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis.** Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, peserta didik **melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh.**”

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim.

PERAN: PESERTA DIDIK

**Peserta Didik – Pembelajaran Daring dan Luring**

- ✓ Siapkan perangkat pembelajaran (buku, alat tulis, dan media lainnya)
- ✓ Pastikan peserta didik dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru
- ✓ Ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran
- ✓ Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar
- ✓ Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran
- ✓ Aktif dalam diskusi dengan guru
- ✓ Selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua
- ✓ Mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran (jika ada)
- ✓ Sampaikan ke guru atau orangtua jika ada kesulitan saat kegiatan belajar hari ini
- ✓ Tuliskan rencana kegiatan sesudah belajar hari ini

PERAN: ORANG TUA

Orang Tua/ Wali peserta didik Pembelajaran Daring, harus:

- ✓ Menyetujui cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah
- ✓ Mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi anak didik
- ✓ Menyiapkan perangkat pembelajaran
- ✓ Memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran
- ✓ Menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring
- ✓ Mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran
- ✓ Orang tua/ wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian
- ✓ Mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari
- ✓ Secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring
- ✓ Memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman

Orang Tua/ Wali peserta didik - Pertimbangan khusus untuk Pembelajaran Luring perlu:

- 1 Mengambil bahan ajar ke sekolah sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
- 2 Lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya



AKSI KEMENPANRB

Kementerian PANRB dan Adaptasi Birokrasi di Tengah Pandemi

Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) menunjukkan perlunya para penyelenggara negara untuk keluar dari rutinitas, serta menerapkan pola baru yang lebih adaptif. Dibutuhkan adaptasi yang cepat untuk mewujudkan sistem kerja dan manajemen SDM yang efektif dan efisien agar kinerja birokrasi tidak terganggu selama masa pandemi. Hal ini relevan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo tentang pentingnya perubahan birokrasi agar memiliki kemampuan adaptasi dengan berbagai kondisi, termasuk pandemi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai perumus kebijakan terkait manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) pun dituntut untuk melahirkan kebijakan yang aktual dan relevan dengan situasi saat ini.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengungkapkan langkah penting untuk menciptakan ASN yang unggul pasca-pandemi. Pertama, adalah merumuskan manajemen ASN di era tatanan normal baru yang lebih menekankan pada sistem digital. "ASN akan banyak bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ASN juga dapat bekerja di berbagai lokasi, dan waktu, dengan dokumen-dokumen berbentuk digital," jelas Menteri Tjahjo.

Langkah kedua, mengubah sistem perencanaan dan pengadaan ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Rekrutmen ASN kedepannya, harus mencakup kebutuhan ASN untuk membangun *digital government*, ASN yang memiliki literasi teknologi informasi, serta penguatan kompetensi sesuai perkembangan organisasi," pungkasnya.

Langkah berikutnya adalah mengubah sistem pengembangan pegawai. Mengiringi perkembangan dunia digital, sistem pendidikan bagi ASN juga harus beradaptasi. “Apakah harus ada di dalam kelas, dilakukan *online*, magang, atau pembelajaran langsung ke di tempat kerja,” ucap Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo menuturkan, Pemerintah juga akan menerapkan manajemen talenta. Melalui manajemen talenta, sejak awal rekrutmen potensi pegawai akan terus dimonitor. Mereka diberikan pengembangan, penugasan yang menantang, penugasan magang, dan tugas kepemimpinan. Dengan begitu, akan mendapatkan informasi tentang potensi yang bisa dimanfaatkan bagi perkembangan organisasi.

Di masa depan, sistem kerja ASN juga akan lebih fleksibel. Terbukti saat pandemi COVID-19 menerpa Indonesia, sejumlah jabatan sudah bisa melaksanakan tugasnya tidak dari kantor. ASN unggul, ungkap Menteri Tjahjo, perlu didukung sistem kerja yang mendorong potensi terbaik setiap individu. Oleh karenanya pemerintah juga harus mengembangkan sistem kerja yang fleksibel.

Senada dengan Menteri Tjahjo, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KemenPANRB, Sri Rejeki Nawangsasih menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga akan dikuatkan pada sistem kerja pemerintahan.

Menurut Sri, seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah memerlukan aplikasi layanan administrasi berbasis elektronik, seperti *e-office*, sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, hingga sistem informasi kepegawaian.

ASN Produktif, Pelopor Tatanan Normal Baru

Menteri Tjahjo turut mengharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan Tatanan Normal Baru di Indonesia. Aktivitas para ASN pun harus mengikuti kebijakan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. “ASN harus memberi contoh masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam tatanan normal baru,” ujarnya.

Meskipun di tengah pandemi COVID ini terdapat pembatasan aktivitas, namun ASN dituntut tetap produktif utamanya dalam memberikan pelayanan. Jam layanan dan kualitas layanan instansi pemerintah diyakini bisa memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kinerja birokrasi juga harus tetap terjaga untuk memastikan program-program pemerintah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat beberapa langkah pemerintah agar ASN dapat bekerja secara produktif di era *new normal*. **Pertama**, membagi lokasi bekerja, baik di rumah maupun di kantor, sebagai bagian dari pengaturan *flexible working arrangement*. **Kedua**, menyusun kembali proses kerja yang lebih fleksibel sehingga strategi dan cara kerja baru menjadi acuan. **Ketiga**, penerapan SPBE menjadi semakin membaik karena layanan berpindah ke *online*. **Keempat**, waktu kerja yang semakin fleksibel, baik melalui mekanisme *shift*, maupun



disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Kelima, tempat kerja yang telah diatur dengan mematuhi protokol kesehatan.

Gelar Tes Serologi

Tatanan normal baru turut diterapkan di KemenPANRB sejak 5 Juni 2020. Sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian PANRB, para pejabat dan pegawai mengikuti tes serologi virus corona (SARS-CoV-2), Kamis (25/06/2020). "Ini merupakan kewajiban Kementerian PANRB untuk memastikan setiap pejabat dan pegawai dalam kondisi sehat selama menjalankan tugas kedinasan di kantor," jelas Sri.

Para pegawai turut serta menyambut baik digelarnya tes serologi. Salah satunya ialah Agus Prapta Adiyasa, Analis Pemerintah Daerah pada

Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. Menurut Agus, pelaksanaan tes serologi virus Corona ini memastikan bahwa setiap pegawai yang bekerja di kantor dalam kondisi sehat.

"Langkah tersebut pastinya bisa memberikan ketenangan bagi setiap pegawai yang masuk untuk mengetahui kesehatan dari masing-masing rekan kerjanya sendiri sehingga setiap kita melaksanakan koordinasi pun itu akan lebih efektif dan efisien," urainya.

Tes serologi virus Corona yang bekerja sama dengan RS Siloam TB Simatupang ini merupakan tahap kedua dari *rapid test* yang telah digelar pada 5 Mei 2020 dan *Polymerase Chain Reaction (PCR) swab test* COVID-19 pada 17 Juni 2020. Sebanyak 331 pejabat dan pegawai yang belum

berpartisipasi pada dua tes sebelumnya, turut serta pada kegiatan ini.

Dalam menjalankan protokol kesehatan, Kementerian PANRB melakukan beragam upaya di samping menyelenggarakan *rapid test*. Beberapa di antaranya adalah penyediaan wastafel cuci tangan di berbagai tempat, penyediaan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk ruangan, penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan dan fasilitas gedung, serta menerapkan *physical distancing* dengan membatasi jumlah pengguna elevator.

"Ada juga fasilitas yang diberikan berupa asupan nutrisi, vitamin, susu, dan juga madu sebagai penambah daya tahan tubuh kita sehingga pencegahan dari luar secara fisik dan juga pencegahan dari dalam dengan meningkatkan imunitas tubuh kita," papar Agus.



Sumber :

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menju-birokrasi-adaptif-pasca-pandemi>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-mendengar-upaya-wujudkan-manajemen-sdm-efektif-dan-efisien-pada-tatanan-normal-baru>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/budaya-digital-dibutuhkan-dalam-sistem-kerja-fleksibel>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/asn-harus-jadi-pelopor-tatanan-normal-baru>

Sumber Foto : antarafoto | Unsplash

AKSI KEMKOMINFO

Percepat Digitalisasi Nasional, Kominfo Siapkan 5 Program Prioritas Tahun 2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan lima program prioritas untuk percepatan transformasi digital menuju masyarakat digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate merinci lima program tersebut, yaitu Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.

“Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp16.82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru,” paparnya dalam Rapat Kerja Menteri Kominfo dengan Komisi I DPR RI, Senin (22/06/2020).

Menteri Kominfo memaparkan anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.

Sumber Berita : https://kominfo.go.id/content/detail/27295/siaran-pers-no-78hmkominfo062020-tentang-percepat-digitalisasi-nasional-kominfo-siapkan-5-program-prioritas-tahun-2021/0/siaran_pers

“Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi COVID-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, pandemi COVID-19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional. “Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp. 2,33 Triliun untuk percepatan infrastruktur seperti *Base Transceiver Station* (BTS) dan akses internet di wilayah non komersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020,” ungkapnya.

Percepat Digitalisasi Nasional

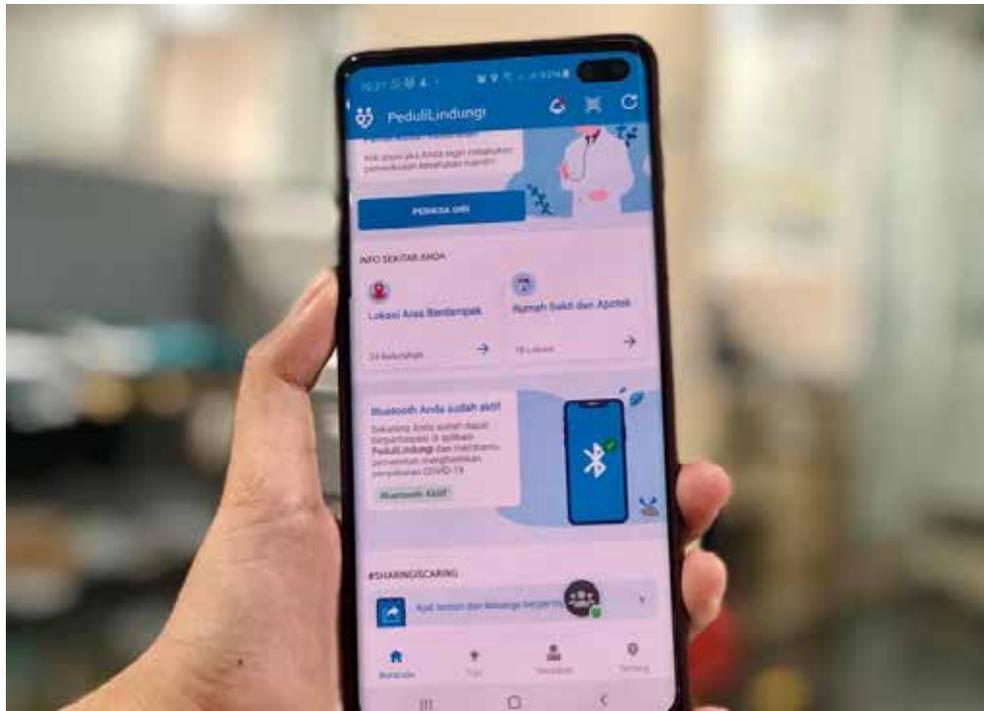
Dalam rapat kerja itu, Menteri memaparkan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi bergerak seluler sebagai pondasi digitalisasi nasional.

“Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% (jaringan) 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan non-3T,” jelasnya.

Menteri Kominfo menyatakan pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan tahun 2022 oleh BAKTI. “Sedangkan 3.435 Desa/Kelurahan di wilayah non-3T pembangunan seluler 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler,” ungkapnya.

Menurut Menteri Kominfo, beberapa inisiatif telah ditempuh agar pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Mengurangi penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau mitra kerja Kementerian Kominfo. Salah satu contohnya adalah aplikasi PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom,” ungkapnya.



Lebih **4** juta Pengguna dari

Dalam rapat kerja, Menteri Johnny memaparkan jumlah pengguna aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi yang digunakan untuk pencegahan sekaligus *alert-system* guna menghentikan penyebaran COVID-19 memiliki penetrasi adopsi sebesar 5%.

“Total pengguna aplikasi PeduliLindungi adalah 4.025.861 jiwa atau sekitar 5% dari total pengguna *smartphone* Indonesia. Target pengguna adalah 25% dari total pengguna *smartphone* di Indonesia, yakni sebanyak 78 juta pengguna,” jelasnya.

Selain aplikasi PeduliLindungi, bersama pemangku kepentingan, Kementerian Kominfo turut memberikan layanan diseminasi informasi COVID-19 melalui *chatbot* berbasis WhatsApp melalui nomor 0813-3339-9000. Saat ini total pengguna *Chatbot* WA sebanyak 2.644.163 pengguna.

Bersama Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kementerian BUMN memfasilitasi *sms blast* harian oleh operator seluler

untuk diseminasi informasi terkait COVID-19. Total SMS terkirim sampai dengan 31 Mei 2020 sebanyak 2,052 miliar SMS.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, Kementerian Kominfo melakukan edukasi terhadap masyarakat. Menteri Kominfo menilai sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan untuk mencegah peredaran informasi tidak benar yang mudah memecah belah bangsa.

“Sosialisasi akan dilakukan dengan berbagai bentuk dan menyesuaikan karakteristik masyarakat, baik melalui forum tatap muka hingga diseminasi informasi konten di media sosial. Tujuan sosialisasi untuk menjaga kualitas demokrasi yang substansial; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 hingga 77,5% dan mewujudkan Pilkada yang sukses dan aman dari COVID-19,” paparnya.



Dukungan Komisi I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan Komisi I dapat menerima penjelasan Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2021.

“Pagu yang terbagi dalam 5 program prioritas serta Pagu untuk Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers. Berkenaan dengan itu, Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut,” tutur Bambang Kristiono.

Bahkan, Komisi I DPR RI juga mendukung peningkatan kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo sesuai usulan kebutuhan tambahan tahun anggaran 2021.

“Anggaran yang akan digunakan untuk percepatan Digitalisasi Nasional mencakup antara lain: Percepatan Infrastruktur TIK, Pembangunan Pusat Data Nasional, Refarming Spektrum Frekuensi Radio, SDM Talenta Digital, Pengembangan Ekonomi Digital, dan Program Legislasi Nasional Tahun 2021,” jelas Wakil Ketua Komisi I membacakan hasil kesimpulan rapat.

Menurut Bambang Kristiono, Komisi I DPR RI juga memberikan apresiasi atas upaya dan dukungan yang telah dilakukan Kementerian Kominfo, KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers dalam upaya membantu penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo, KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers untuk mensosialisasikan Kebijakan Tatahan Kehidupan Baru (New Normal) sesuai tupoksinya, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dengan benar,” tuturnya.

Dalam rapat itu, Menteri Kominfo didampingi oleh seluruh pejabat tinggi madya, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti; Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli; Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo; Kepala Badan Litbang SDM, Basuki Yusuf Iskandar; Inspektur Jenderal Doddy Setiadji; dan Dirut BAKTI Anang Latief. Selain itu hadir pejabat pimpinan tinggi pratama dan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Pusat, dan Anggota Dewan Pers.



Geliat Balmon SDPPI

di tengah Pandemi COVID-19

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital, baik dari sisi masyarakat, dunia usaha, dan tidak terkecuali pemerintahan. Percepatan transformasi digital tersebut juga dituntut komitmen pengelolaan organisasi dan kinerja pemerintah melalui berbagai terobosan dan inisiatif.

Oleh karena itu, guna mendukung penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang sempat tertunda dikarenakan Pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) melalui tiga unit kerjanya yakni Balai monitoring Balai Monitor (Balmon) Spektrum

Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Surabaya, Balmon Kelas II Padang, Balmon Denpasar, menggelar kegiatan tersebut di Era *New Normal*.

Semula, pada Maret 2020, layanan perizinan amatir radio secara regular sempat tertunda dikarenakan pandemi COVID-19. Namun, melihat antusiasme masyarakat yang sedemikian besar, Kepala Balmon Denpasar Supriadi menjelaskan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan. Para peserta dan pengawas ujian diwajibkan memakai masker, dipindai suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak.

“Ruang ujian diatur sedemikian rupa, sehingga antarpeserta ada jarak sekitar 1-2 meter untuk menghindari kontak



langsung,” jelasnya melalui keterangan rilis tertulis sebagaimana dikutip pada laman www.postel.go.id, Minggu (07/06/2020).

Terapkan Protokol Kesehatan

Senada dengan Supriadi, Kepala Loka Monitor Pangkalpinang Bobby Satriyo menjelaskan walaupun pelaksanaan UNAR CAT sempat tertunda di awal pandemi COVID-19 beberapa bulan lalu, namun kegiatan dapat kembali berjalan. Setiap panitia dan peserta wajib memakai masker, sarung tangan, dan diperiksa suhu tubuhnya. Pengaturan kedatangan peserta juga dibagi berdasarkan jadwal, dimana hanya peserta ujian yang boleh memasuki lokasi ujian.

“Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen SDPPPI Kominfo, Loka Pangkalpinang memiliki tugas memberikan layanan sejumlah perizinan,” paparnya usai menggelar UNAR berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang pertama bulan ini di Kantor Loka Pangkalpinang, Sabtu (13/06/2020).

Bobby menuturkan, UPT dituntut kreatif dalam melayani masyarakat, khususnya terkait penyelenggaraan UNAR CAT. Oleh karena itu, setiap panitia di UPT maupun SDPPPI Pusat dapat ikut memantau jalannya ujian melalui aplikasi.

“Antara lain pemanfaatan aplikasi *video conference* dan *meeting* sebagai media untuk mengawasi pelaksanaan ujian. Penggunaan aplikasi ini juga menjadi acuan dalam pengembangan e-UNAR yang lebih fleksibel, efisien, dan transparan,” kata Bobby.

Sementara itu, Kepala Balmon Padang Zainullah Manan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Padang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) *Non Reguler* berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), pihaknya menerapkan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).

“Awalnya akan dilaksanakan pada April 2020, tetapi ditunda. Namun, melihat besarnya animo masyarakat penggiat amatir radio, UNAR CAT bisa dilaksanakan Juni ini,” ungkapnya di sela-sela ujian yang memanfaatkan tiga ruangan Laboratorium Komputer SMAN 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Lebih lanjut, Zainullah menerangkan, SOP pelaksanaan UNAR CAT tersebut dituliskan dalam spanduk yang dipajang pada pintu masuk utama lokasi ujian. Dalam spanduk itu dituliskan bahwa sebelum memasuki areal ujian, setiap peserta dan panitia diwajibkan memakai masker, pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak. Kemudian, ruang ujian ditata agar antara peserta ada jarak 1 hingga 2 meter.

Zainullah menambahkan, jumlah peserta dibatasi dengan hanya mengisi setengah dari kapasitas ruangan. Sedangkan saat menunggu giliran ujian, peserta ditempatkan di ruang tunggu yang jaraknya juga diatur agar tidak terjadi kontak langsung antar mereka.

“Pelaksanaan UNAR CAT dibagi dengan sistem *shift*, sehingga bagi mereka yang sudah selesai ujian diharuskan meninggalkan lokasi sebelum peserta berikutnya masuk,” tuturnya.

Deklarasi New Normal Bersama ORARI

Di tempat terpisah, Kabupaten Tulungagung menjadi tempat penyelenggaraan UNAR) metode CAT pertama tahun ini di Era New Normal untuk wilayah Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Kepala Balmon Surabaya Sensilau Dore ketika mengajak ORARI Daerah Jawa Timur melakukan Deklarasi Era New Normal.

“Ini menandai kesiapan kedua pihak untuk memasuki Era *New Normal*. Balai Monitor Kelas I Surabaya, sebagai pelaksana UNAR menerapkan protokol kesehatan guna mencegah wabah korona sepanjang ujian berlangsung,” ujarnya pada Rabu (24/06/2020).

Adapun isi deklarasi bersama tersebut, kata Sensilaus **pertama** adalah berperan aktif dalam mencapai suksesnya Era *New Normal* dan perlawanan terhadap COVID-19. **Kedua**, menerapkan protokol kesehatan dalam semua kegiatan. **Ketiga**, mensosialisasikan Era *New Normal* dan protokol kesehatan pada masyarakat. Dan **keempat**, mengajak masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya dari virus ini dalam semua aktivitas sehari-hari.

Saat ini, tercatat hampir seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur terdampak COVID-19. Menurut Sensilaus, dipilihnya Tulungagung sebagai lokasi pelaksanaan UNAR CAT karena kabupaten tersebut masih dalam *Zone Orange* atau memiliki risiko sedang. Sementara itu, untuk wilayah Surabaya dan kota/kabupaten di sekitarnya masih masuk dalam *Zone Merah*.

Meski demikian, penyelenggara UNAR tetap menjaga ketat kepatuhan terhadap protokol kesehatan mulai dari meminta semua peserta mencuci tangan, mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, sarung tangan, dan *face shield*. Lalu, menyediakan formulir *self assesment* kesehatan, mengatur jarak tempat ujian dan mengimbau peserta menghindari kerumunan.

Guna menciptakan suasana santai, di sela-sela ujian, panitia menyiapkan *Quiz Session*. Diharapkan, melalui kemeriahan kuis, para peserta dapat mengurangi ketegangan mereka menghadapi ujian di Era *New Normal*.

Saat membuka acara, Kepala Balmon Surabaya menjelaskan tentang peningkatan cara atau metode pelaksanaan UNAR dari manual menjadi *full CAT*. Ia mengajak masyarakat Jawa Timur untuk beradaptasi dan bersahabat dengan perkembangan teknologi. "Tentunya ini akan membantu kegiatan kita sehari-hari," imbuhnya.

Pembagian Sesi Ujian Berdasarkan Kategori

Pada UNAR kali ini, Balmon Surabaya menerima 21 peserta. Dari 11 peserta yang terdaftar di Tingkat Siaga, hadir 10 orang. Kesemuanya lulus. Peserta di Tingkat Penggalang ada tujuh orang dan juga lulus seluruhnya. Demikian pula dengan keberhasilan tiga peserta dari Tingkat Penegak.

"Ini 95 persen peserta berasal dari masyarakat lokal Tulungagung," katanya.

Sejak awal UNAR dilaksanakan di Jawa Timur pada 2009, animo penggiat amatir radio untuk mendapatkan izin sangat tinggi. Rata-rata pertahun 500 peserta. Bahkan, pada 2019 sebagai tahun terakhir diadakannya UNAR manual, peserta mencapai 956 orang.

Tahun ini, tambah Sensi, UNAR mulai menggunakan metode CAT dan dilaksanakan di tengah Pandemi COVID-19. "Antusiasme peserta tetap tinggi, dilihat dari kuota peserta yang tetap *full booked*," bebarnya.

Berbeda dengan CAT Balmon Surabaya, untuk jadwal pelaksanaan UNAR berikutnya di wilayah Pangkalpinang adalah tanggal 19,20 dan 29 Juni 2020. Setiap ujian tetap dibagi dalam dua sesi. Pemecahan jadwal dan pembagian sesi ujian dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam protokol kesehatan COVID-19 tentang pembatasan jarak peserta. Kemudian, untuk jumlah peserta sebanyak 17 orang yang dibagi dalam dua sesi.

Terkait UNAR CAT Balmon Padang di Kota Agam, Padang, diikuti 134 peserta dengan rincian 100 Tingkat Siaga, 31 Penggalang, dan tiga Penegak. Selanjutnya, untuk kota Denpasar, ujian UNAR CAT dibagi tiga shift dengan jumlah peserta maksimal 11 orang tiap shiftnya diikuti oleh 33 peserta dengan rincian 23 orang tingkat Siaga, delapan Penggalang, dan dua Penegak, (hm.ys)





New Normal Balmon Daerah

Bandung

Pegawai Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, Jawa Barat kembali menjalani keseharian aktivitas kerjanya di tengah masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pengukuran suhu di pintu masuk hingga pemasangan partisi kaca di loket layanan dilakukan untuk mengurangi potensi penularan COVID-19.





Batam

Kesiapan pemulihan aktivitas kerja di masa adaptasi kebiasaan baru juga terlihat pada aktivitas di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Kepulauan Riau. Mulai dari proses *Distress Alert*, inspeksi validasi data, hingga saat menangani gangguan frekuensi 375.025 MHz, pegawai Balmon tetap mematuhi protokol kesehatan dengan penggunaan masker dan *face shield*.

New Normal Balmon Daerah

Kendari

Pegawai Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kendari, Sulawesi Tenggara bersiap memulai aktivitas kerja di masa adaptasi kebiasaan baru dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.



Mataram



Suasana apel pagi di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terlihat pegawai berbaris rapi dengan tetap menjaga jarak (*physical distancing*) sesuai protokol kesehatan.

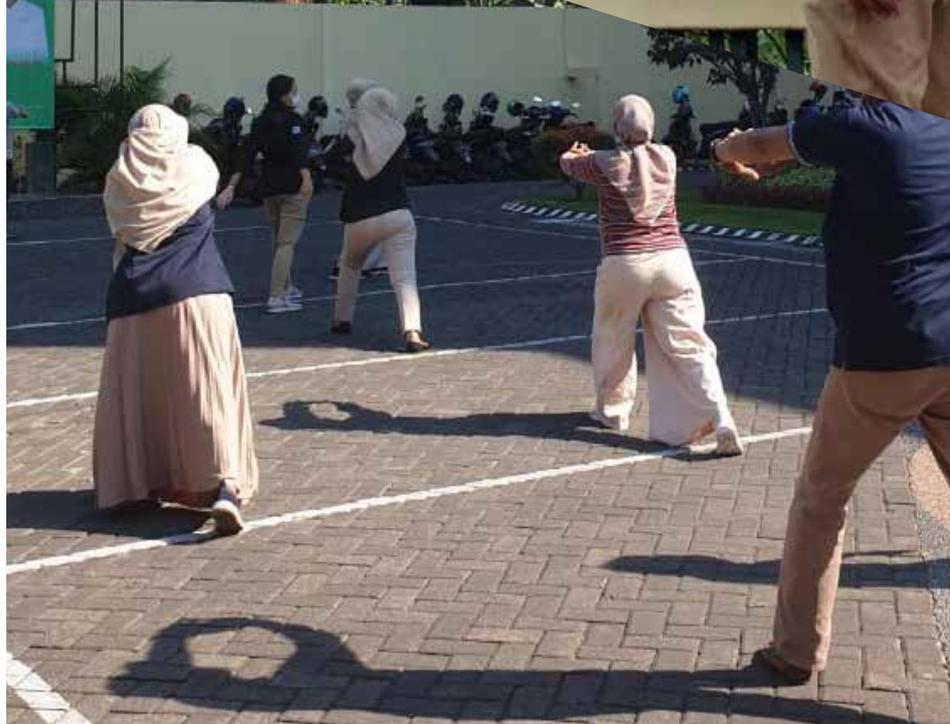


Saat turun lapangan melakukan observasi dan monitoring pun, Pegawai Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram tetap disiplin menggunakan masker dan *face shield* untuk melindungi diri dari potensi penularan COVID-19

Surabaya



Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya, Jawa Timur secara optimal menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor, menyambut kembali normalnya aktivitas perkantoran di Surabaya. Dari pemasangan partisi kaca di loket pelayanan dan ruang rapat, penggunaan masker dan *face shield* saat proses monitoring frekuensi, hingga aktivitas olahraga yang tetap menerapkan prinsip *physical distancing*.



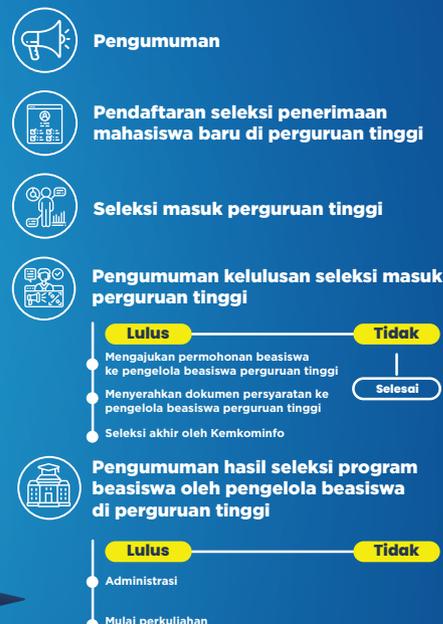
Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo

Bersama

**Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM)
Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
Konsentrasi Transformasi Digital Sektor Publik**

Prosedur pendaftaran

- 01 **Cek persyaratan dokumen di link berikut**
https://kominfo/persyaratan_UGM
- 02 **Membuat akun pendaftaran di laman** um.ugm.ac.id;
- 03 **Melakukan pendaftaran secara online pada tautan berikut**
<https://um.ugm.ac.id/admisi/index.php/akun/auth/login/>;
- 04 **Mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru UGM;**
- 05 _____
Peserta yang telah lulus seleksi masuk UGM selanjutnya menghubungi panitia pengelola beasiswa di Sekolah Pascasarjana UGM untuk pendaftaran jalur Program Beasiswa Kementerian Kominfo;
- 06 _____
Menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kemenkominfo kepada panitia pengelola beasiswa di Sekolah Pascasarjana UGM.
- 07 _____
Melihat hasil seleksi tahap akhir oleh Kementerian Kominfo secara resmi melalui situs Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.



Persyaratan Umum Program Beasiswa Kementerian Kominfo:

1. Masa kerja minimum 2 tahun;
2. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
3. Persyaratan lainnya mengikuti persyaratan Perguruan Tinggi;
4. Pendaftar beasiswa hanya diperkenankan untuk mendaftar pada kelas reguler.

Persyaratan Khusus bagi Masyarakat Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia maksimum pelamar 33 tahun pada saat mendaftarkan diri;
3. Latar belakang pekerjaan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/atau pelaku start-up (perusahaan rintisan) lokal;
4. Memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
5. Tidak ditujukan bagi peserta dari instansi sektor pendidikan;
6. Mendapatkan izin dari pimpinan yang berwenang untuk menjalani pendidikan;
7. Menyertakan surat keterangan anjuran atau surat rekomendasi dari pimpinan, dosen atau tokoh lain yang memiliki kredibilitas; dan
8. Persyaratan standar IPK paling sedikit 2,90.

Persyaratan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah (kecuali dosen dan PNS pada instansi sektor pendidikan), anggota TNI/POLRI berstatus aktif;
2. Berusia paling tinggi 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;
3. Berusia maksimum 42 tahun bagi PNS di daerah terpencil, tertinggal, terluar sesuai Surat Edaran Menpan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar (kominfo/DaftarDaerah3T)
4. Memiliki masa kerja minimum 2 tahun;
5. Mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (paling rendah pimpinan instansi setingkat Eselon II) di instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
6. Persyaratan standar IPK minimal 2,90; dan
7. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi adalah tugas dan fungsinya terkait dengan pembuatan kebijakan.

kominfo/DaftarDaerah3T



**Badan Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110

E-mail

beasiswaadn@kominfo.go.id

+62 857 6000 8994



Layanan Klinik Pratama Tetap Prima

Klinik Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu unit layanan yang dibutuhkan untuk tetap memberikan layanannya secara optimal seiring penerapan sistem kerja *flexible working space* di lingkungan Kementerian Kominfo saat ini.

Guna memberikan pelayanan terbaik kepada pegawai, Klinik Pratama memberikan dua opsi penawaran bagi pasien yang ingin berobat. "Kita tawarkan dua opsi, yaitu bisa berkonsultasi langsung dengan Dokter melalui *Telemedicine* melalui nomor Whatsapp yang dicantumkan di depan klinik. Bagi pegawai yang ingin berobat langsung dengan dokter, akan dilakukan *screening* oleh Satpam," ujar Dokter Lutfi Oscar ketika ditemui di ruang praktiknya, Senin (22/06/2020).

Setelah dilakukan proses *screening*, pada tahapan berikutnya pasien yang berkunjung ke Klinik Pratama Kominfo harus mengisi beberapa pertanyaan yang tersedia pada selembarnya *self-assessment*. "Hal ini bertujuan untuk mengecek pasien, apakah dia memiliki gejala seperti batuk/pilek, demam. Lalu, dilakukan pengecekan suhu badan apakah melebihi 37,3. Jika terdapat gejala-gejala dimaksud maka pasien dibawa ke ruang isolasi," urainya.

Terkait jam layanan, Dokter Lutfi menyebutkan, Klinik Pratama melayani konsultasi berobat yang dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan fitur *chat* melalui WhatsApp sesuai dengan jam kantor, yaitu mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB.

Sementara untuk penerapan *Rapid test*, kata Dokter Lutfi, Klinik Pratama memfasilitasi uji kesehatan COVID-19 tersebut berdasarkan atas keinginan dari para pegawai Kominfo. "Kita fasilitasi bekerja sama dengan Rumah Sakit Abdi Waluyo," tuturnya.

Jika terdapat gejala-gejala terpapar virus corona setelah melakukan *rapid test*, maka para tenaga medis meminta pegawai dimaksud untuk melakukan uji *swab* di Laboratorium Kominfo.





Berkaitan dengan pertanyaan mana yang lebih efektif antara *rapid test* maupun *swab test*, Dokter Lutfi memaparkan, walaupun hasil akurasi dari *rapid test* ini tidak begitu maksimal tetapi memiliki keunggulan. Selain harganya relatif murah, pegawai Kominfo juga bisa menghemat waktunya untuk mendapatkan hasil tes.

“Kalau PCR Test/Swab harganya bisa jutaan, namun untuk *rapid test* hanya kisaran 200 ribu. Setelah ikuti uji *rapid*, pegawai juga bisa mengetahui hasilnya dalam waktu kira-kira 10 menit,” jelas Dokter Lutfi. Sementara, untuk mengetahui hasil dari uji *swab* memakan waktu yang lebih lama dengan batas minimal 4 hari dari waktu pelaksanaan tes.

Klinik Pratama turut menyesuaikan sistem pelayanan bagi pengobatan umum yang tidak berkaitan dengan COVID-19, dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan penerapan *physical distancing*.

Dokter Lutfi menjelaskan, jika sebelum pandemi, pasien dapat mengambil langsung datang berobat ke Klinik Pratama, maka saat ini pasien diberi kemudahan untuk melakukan registrasi melalui aplikasi Kesehatan. Selanjutnya akan dilakukan

proses tanya jawab terlebih dahulu untuk nantinya diberikan resep obat yang tepat.

“Untuk pengambilan obat, pasien bisa mengambilnya di Klinik Pratama Kominfo. Kami juga melayani Pasien yang ingin berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Mereka juga kami berikan proteksi agar tidak tertular/terinfeksi wabah ini,” terang Dokter Lutfi.

Adapun tenaga medis di Klinik Pratama Kominfo dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) pada saat memeriksa Pasien. Hal ini ditujukan demi menjaga keselamatan bersama.

Sebagai penutup, Dokter Lutfi menyampaikan bahwa Klinik Pratama turut memberikan edukasi bagi pegawai Kominfo agar lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan. “Edukasi yang diberikan berupa penyampaian informasi seperti sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, membuka pintu dengan siku dan sebagainya,” ungkapnya. (hm.ys)

Era Penyiaran Perseorangan

Andre menjual mobil ke Raffi. Lantas Raffi hendak menjualnya ke Baim dengan margin keuntungan yang lumayan untuk hitungan beberapa hari “doang”. Bahkan Gading juga tergiur untuk memilikinya, tetapi ternyata didahului oleh Denny yang langsung transfer duit tanda jadi.

Sementara Andre justru hendak membeli mobil dari Irfan untuk anaknya, Kenzy. Di lain hari mobil Kenzy dijual ke Raffi namun diambil kembali karena masih merasa sayang. Dalam hubungan jual beli dengan Raffi ini, Sutisna marah kepada anaknya, Rizky, karena tanpa izin menjual lebih murah motor milik ayahnya itu kepada Raffi.

Istri Raffi marah-marah karena suaminya bela-beli mobil melulu. Bahkan mobil Tesla punya Andre juga mau dibeli. Namun ternyata kalah duluan sama Anang. Malah Raffi juga menjual tas milik Nagita, istrinya, terlalu murah kepada Andre. Tapi soal jual kapal milik suaminya kepada Rudy, Nagita setuju.

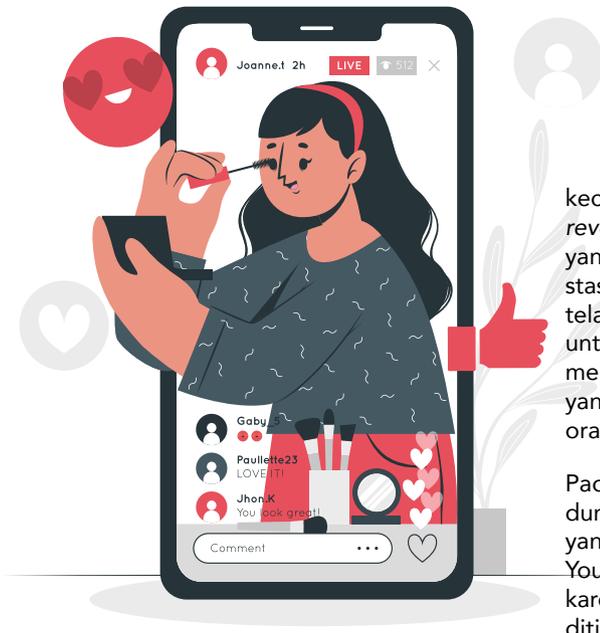
Dalam soal mobil ini, Andre jadi pusat pusaran karena koleksinya puluhan. Pernah Andre di-*prank* dicolong mobil dan motornya oleh Sutisna dan Ari. Tapi skor satu sama karena Sutisna juga di-*prank* dicolong mobilnya oleh Andre. Puncaknya, bukan cuma mobil, namun Kenzy, anak Andre, juga diculik dibawa ke rumah Sutisna. Tentu saja itu hanya *prank*. Sama dengan *prank* Baim yang tanpa sepengetahuan Kenzy membeli koleksi Fiat-nya dari tangan Andre.

Baim juga kena *prank*. *Prank* kelas sultan. Sengaja Raffi memberi hadiah ulang tahun mobil kepada Rafathar yang disamain dengan mobil Baim. Konon Baim pernah bilang kalau tidak terlalu suka mobilnya “disama-samain”.

Tak puas belanja mobil, Andre sempat pernah mau bayarin pesawat milik Vincent. Juga mobil mewah punya teman Gading. Semua ingin dibeli olah para sultan ini sampai-sampai Ari pernah marah karena koleksinya hendak dibeli juga.

Gara-gara *prank*, Andre juga pernah marah kepada Ari. Ari minta maaf namun malah gantian marah kepada Andre akibat perbuatan Sutisna. Bahkan Ari juga marah kepada Rigen. Terpaksa Rigen minta bantuan Sutisna untuk mendekati Ari agar bisa dimaafkan.

Itu semua adalah konten-konten di Youtube yang ditonton oleh jutaan orang sampai memuncaki daftar-daftar *trending*. Seperti itulah “keruwetan” *setting* dan skenario yang diciptakan dunia hiburan baru Tanah Air yang berpusat di Youtube dan media sosial. Ajaibnya, *settingan* skenario semacam itu digenari oleh penonton kita. Konten-konten yang mempertontonkan mimpi dan *prank* semacam itu umumnya merajai blantika *trending* Youtube.



Selamat datang di era "personal broadcasting"!

Kini jagad penyiaran tak lagi dikuasai oleh perusahaan media besar yang punya segalanya: alat dan infrastruktur. Perseorangan dengan peralatan minimalis semacam ponsel cerdas pun dengan gampang bisa memasuki medan pertarungan ini. Hanya saja dibutuhkan kiat khusus yang umumnya berupa kemampuan untuk mengolah konten yang meliputi: pemilihan *niche* bidang bahasan, pengemasan bahan, proses produksi, *gimmick*, persistensi, dan kemampuan *content marketing*. Bisa pula dimasukkan unsur hoki.

Di awal-awal *booming* penyiaran di Youtube, tampil nama-nama dan wajah-wajah yang tidak terduga. Mereka yang merajai dunia tersebut bukan nama-nama entertainer yang kondang. Siapa yang sebelumnya kenal Atta, Ria, atau Arief yang memuncaki blantika Youtube dengan pengikut fanatiknya yang jutaan, terbesar di Asia Tenggara?

Begitu mereka naik daun, orang terkesima oleh pendapatan mereka dari Youtube, dari iklan, serta dari "endorse-an" yang menakjubkan untuk ukuran perseorangan. Konten yang dibuat oleh perseorangan, yang baru belakangan melibatkan tim

kecil, bisa mengalahkan *revenue* dari konten yang diproduksi oleh stasiun televisi yang telah menghabiskan duit untuk merancang dan mengeksekusi program yang melibatkan puluhan orang dan sumber daya.

Pada saat yang sama dunia penyiaran internet yang multimedia seperti Youtube juga naik daun karena akses yang fleksibel, ditingkah dengan jaringan internet yang makin bagus dan merata. Media konvensional seperti televisi mulai ditinggalkan. Industri televisi memasuki era senjakala.

Gebyar yang ditampilkan panggung televisi tak bisa menyembunyikan kekeroposannya. Bahkan, dengan tak berpikir akan gengsi lagi, televisi sampai harus memohon-mohon agar audiensnya menonton di layar kaca dengan mode teresterial, alih-alih mengaksesnya dari rekaman acara tersebut di Youtube. Tanpa akses teresterial konvensional, acara mereka tidak tercatat dalam hitungan pencatat rating. Tanpa rating bagus, "no fulus".

Coba simak nama-nama *youtuber* yang hadir dengan konten "keribetan" di atas. Ke mana Atta dan Ria? Masih ada, namun mulai tertutup pamornya. Daftar *trending* dipuncaki oleh pendatang-pendatang baru yang umumnya ertong alias artis.

Para artis tersebut sepertinya sudah merasakan senjakala televisi dan oleh sebab itu sadar untuk harus segera hijrah untuk berebut audiens di Youtube dan media lain seperti *podcast* (yang akhirnya di-youtube-kan juga). Malah beberapa di antara mereka telah mencicipi manisnya madu *revenue* dari platform digital yang mereka bangun sendiri. Tak heran masing-masing memiliki pasukan konten yang mulai dimanajementi secara rapi sebagaimana halnya berlaku di industri televisi. Ada RANS Entertainment, KUY Entertainment, TaulanyTV, Sule Channel, Denny Cagur TV, deHakims Channel, dan sebagainya.

Maka, jika saat ini ada *youtuber* yang berani memberi *giveaway* yang jumlah dan wujudnya aduhai melebihi yang bisa diberikan oleh televisi, salah satu sebabnya mungkin bisa dirunut ke sini: *cost* untuk menjalankan dan memproduksi konten secara *personal broadcasting* masih jauh lebih murah dibanding perusahaan televisi atau media yang sudah terlalu terbebani oleh biaya pokok dan *overhead cost*. Padahal pada saat yang sama: *cuan di Youtube lebih kotos-kotos!*



Opini oleh:

**FX
BAMBANG
IRAWAN**

Suasana “new normal” di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bekasi menjadi salah satu kota yang pertama kali dikunjungi Presiden Joko Widodo dalam rangka meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru di sarana publik.

(kiri)

Penumpang memadati KRL Commuterline tujuan Bekasi.

(tengah)

Pengunjung terlihat bersantai di sebuah kafe di kawasan Bekasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak (*physical distancing*).

(atas dan kanan-bawah)

Lalu lintas jalan raya di kawasan Bekasi mulai dipadati kendaraan roda dua dan roda empat.





Bekasi Bersiap Adaptasi Kebiasaan Baru





Telkomsel Terus Bergerak Maju Tingkatkan Produktivitas di Tengah Kenormalan Baru





Adaptasi menjadi kunci bagi masyarakat dalam menghadapi kenormalan baru. Ya, masyarakat perlu melakukan penyesuaian diri terhadap situasi terkini dengan mengadopsi cara-cara baru dalam menjalani berbagai aspek dalam kehidupan. Salah satunya dilakukan dengan lebih memaksimalkan teknologi digital dalam bekerja, belajar, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Inovasi produk dan layanan telekomunikasi digital pun menjadi elemen pendukung yang penting. Pasalnya, masyarakat membutuhkan jaringan internet yang baik dalam menjalani, misalnya, *work from home* atau *school from home*. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa sektor industri telekomunikasi dan

infrastruktur telekomunikasi menjadi dasar terbentuknya ekosistem di era kenormalan baru.

Telkomsel sebagai digital telco company pun memahami hal tersebut. Maka dari itu, Telkomsel berkomitmen untuk terus bergerak maju bersama Indonesia dalam mendampingi masyarakat beradaptasi terhadap perubahan yang tak terhindarkan di berbagai sektor kehidupan dari waktu ke waktu.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, "Kenormalan baru dapat menjadi fondasi yang kuat bagi industri telekomunikasi di Tanah Air untuk terus tumbuh di masa depan, termasuk membantu masyarakat beradaptasi dalam menjalani kenormalan baru. Pasalnya, industri telekomunikasi menjadi

sektor yang mampu mendukung masyarakat dalam memenuhi pertumbuhan permintaan terhadap kebutuhan digital di berbagai sektor kehidupan di tengah berbagai keterbatasan."

Penyesuaian Internal dan Operasional Perusahaan

Telkomsel memahami, untuk memberikan layanan telekomunikasi yang dapat diandalkan khususnya selama kenormalan baru, Telkomsel juga perlu melakukan transformasi secara internal, termasuk dalam menjalankan operasional perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas karyawan walau perusahaan menjalani masa-masa sulit dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan melakukan penyesuaian terhadap kenormalan baru.

Sejak awal tahun, Telkomsel telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh karyawan mengenai pencegahan penularan COVID-19. Hal tersebut diperkuat dengan pemberlakuan sejumlah kebijakan internal, meliputi penyediaan sarana kesehatan tambahan, penyemprotan disinfektan di ruang kerja, digitalisasi prosedur kunjungan tamu ke kantor Telkomsel, hingga penyesuaian terhadap tugas dinas karyawan.

Selanjutnya, Telkomsel terus melakukan adaptasi dengan cara mengakselerasi digitalisasi di tengah pandemi. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan agar seluruh karyawan bekerja dari rumah sejak 17 Maret 2020, menyesuaikan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah wilayah. Kebijakan *work from home* diterapkan dengan memastikan layanan untuk pelanggan tetap terjaga sesuai prosedur standar yang berlaku.

Lebih lanjut, Telkomsel juga telah mengaktifkan kebijakan *Business Continuity Management* yang mengatur pengelolaan operasional perusahaan secara menyeluruh dalam menghadapi kenormalan baru akibat COVID-19. Protokol tersebut mencakup kebijakan

solusi penanganan untuk kenyamanan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan hingga jaminan penyediaan layanan yang prima untuk pelanggan.

Kebijakan *Business Continuity Management* sendiri bermanfaat untuk menyesuaikan operasional kerja sejumlah unit yang tidak memungkinkan dilakukan secara jarak jauh. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem waktu kerja bergantian (*shifting*), melengkapi para karyawan atau petugas lapangan dengan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD), serta memberlakukan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sesuai dengan standar protokol penanganan penyebaran COVID-19.

Penyesuaian operasional turut dilakukan oleh Telkomsel dalam mengawal kualitas jaringan pada Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2020. Sebagian besar proses pengawasan dan penanganan aktivitas pengamanan jaringan selama masa RAFI 2020 tersebut dilakukan secara virtual. Implementasi virtual monitoring tersebut didukung oleh 13 Posko Virtual eRAFI2020, 19 tim internal (1,578 anggota) dan 46 tim mitra strategis (803 anggota) yang bekerja secara efektif dan efisien.

“ Kenormalan baru dapat menjadi fondasi yang kuat bagi industri telekomunikasi di Tanah Air untuk terus tumbuh di masa depan, termasuk membantu masyarakat beradaptasi dalam menjalani kenormalan baru, memenuhi kebutuhan digital di berbagai sektor kehidupan di tengah berbagai keterbatasan. ”

Peningkatan Produktivitas Karyawan

Telkomsel melakukan riset internal untuk mengetahui respons karyawan terhadap sikap adaptasi perusahaan di tengah kenormalan baru, termasuk dalam menerapkan kebijakan *work from home*. Berdasarkan data riset tersebut, 94% karyawan Telkomsel mendukung kebijakan *work from home*. Ada lima hal yang membuat insan-insan Telkomsel memberikan respons positif terhadap keputusan tersebut.

Pertama, karyawan merasa lebih dekat dan memiliki kualitas waktu yang lebih baik dengan keluarga.

Kedua, kebijakan *work from home* mendukung implementasi budaya kerja *digital* dan mendorong terciptanya kreativitas dalam menemukan cara-cara kerja baru.

Ketiga, waktu yang biasa dihabiskan untuk perjalanan menuju ke kantor dan pulang ke rumah dapat difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kemudian, yang **keempat**, pemberlakuan *work from home* memberikan waktu lebih bagi karyawan untuk menjalankan hobi.

Kelima, berkurangnya pengeluaran untuk transportasi, makan siang, bersosialisasi, dan lainnya. Secara keseluruhan kelima hal tersebut mampu membantu karyawan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.

Hasil riset juga mengungkapkan bahwa 47% karyawan Telkomsel merasa lebih produktif selama bekerja dari rumah. Ada tiga hal yang membuat mereka menjadi lebih produktif, yaitu jam kerja yang lebih optimal, meningkatnya efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan, serta kualitas dan kuantitas pekerjaan yang lebih baik.

Tetap Berinovasi dan Berempati

Inovasi telah menjadi bagian dari setiap langkah Telkomsel selama beroperasi lebih dari 25 tahun. Telkomsel memahami, perusahaan perlu bekerja secara adaptif seiring dengan perkembangan teknologi digital dari waktu ke waktu. Maka dari itu, Telkomsel bergerak lebih dari sekadar operator telekomunikasi dan menjadi *digital telco company* yang menyediakan lebih banyak solusi untuk mendukung kebutuhan masyarakat di setiap fase kehidupannya.

Salah satu inovasi Telkomsel yang bermanfaat bagi berlangsungnya kenormalan baru saat ini adalah CloudX. Solusi berbasis cloud tersebut menyediakan layanan Virtual Private Automatic Branch Exchange (PABX), yaitu akses jaringan komunikasi telepon secara internal dan eksternal untuk optimalisasi operasional korporasi. Selama implementasi *work from home*, CloudX mampu menjadi platform penunjang produktivitas bagi karyawan Telkomsel untuk senantiasa terhubung dan berkolaborasi antara satu sama lain di mana pun dan kapan pun.

Tidak hanya konsisten untuk terus berinovasi, Telkomsel juga tidak lupa untuk tetap berempati terhadap situasi sulit yang melanda sejumlah masyarakat akibat dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Telkomsel menjalankan program Donasi Karyawan Telkomsel yang memungkinkan seluruh insan Telkomsel untuk menyisihkan uangnya untuk menyalurkan bantuan ke pihak-pihak yang membutuhkan.

Penerima bantuan tersebut meliputi para pekerja alih daya yang selama ini membantu operasional Telkomsel di seluruh Indonesia serta tenaga medis dan pekerja informal yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Seluruh donasi yang diberikan oleh karyawan Telkomsel dikumpulkan melalui LinkAja untuk mempercepat proses pengumpulan dana melalui teknologi digital serta mengurangi penggunaan uang tunai yang bisa menjadi medium penyebaran virus.

"Telkomsel akan terus berupaya menemani masyarakat dalam masa penyesuaian ini dengan konsisten melanjutkan adaptasi secara internal yang menyesuaikan kenormalan baru. Kami pun akan senantiasa bersinergi dengan Kominfo dan pemangku kepentingan lainnya agar berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Telkomsel dapat mendukung regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam membantu masyarakat beradaptasi terhadap tatanan kehidupan yang baru," tutup Setyanto.



Fokus Bukalapak dalam Membangun Talent dan UMKM Indonesia saat *New Normal*



Di masa pandemi COVID-19 ini, yang dialami oleh banyak perusahaan di seluruh dunia, salah satu tantangannya adalah mengubah dan beradaptasi dengan pengaturan kerja normal di kantor/tempat kerja seperti biasa ke pengaturan kerja dari rumah atau *work from home* serta adanya pembatasan interaksi dan pergerakan sosial atau *lockdown* atau di Indonesia dikenal dengan istilah PSBB sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah.

Hal ini tentunya juga merupakan tantangan tersendiri bagi karyawan, terutama dalam hal menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di rumah, dan juga menjaga keseimbangan atau harmonisasi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan bisa memunculkan situasi yang sering disebut sebagai "Cabin Fever".

Di Bukalapak, kesehatan dan keselamatan karyawan adalah prioritas. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bukalapak adalah dengan memberikan informasi dan edukasi dengan tujuan memberikan pemahaman kepada karyawan termasuk mengenai penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan dan bekerja dari rumah. Pemahaman mengenai penerapan protokol kesehatan terkait COVID-19 juga telah dimulai bahkan sejak sebelum WFH diterapkan, seperti pembersihan ruang kerja secara berkala dengan desinfektan, penerapan jarak interaksi sosial, pembatasan *meeting*, pengukuran suhu badan sebelum masuk area kerja, penyediaan *hand sanitizer* dan masker di area kerja, serta penting bagi perusahaan untuk menyiapkan dan membuat jalur komunikasi antara perusahaan dengan karyawan, dan antara karyawan yg satu dengan yang lain, melalui metode komunikasi virtual (*email, chats, call or video call*).

Selain itu, untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19, Bukalapak bekerja sama dengan para partner dan pemerintah melalui kampanye #BanggaBuatanIndonesia. Pentingnya menjaga ketahanan UMKM sebagai garda depan perekonomian menjadi fokus Bukalapak yang memiliki misi untuk menciptakan perekonomian yang adil untuk semua.

Sampai saat ini ratusan UMKM yang bergabung dalam program Bangga Buatan Indonesia, dan menawarkan lebih dari 40.000 produk atau SKU yang dapat diakses dan dibeli oleh 92 juta pengguna Bukalapak. Melalui semangat kebersamaan dalam mendorong ekonomi Indonesia, Bukalapak mengharapkan keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung gerakan ini, dengan bersama - sama menghargai, membeli, dan menggunakan produk - produk Tanah Air.



TRANSTV

TRANS TV Terapkan *New Normal*

Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak bulan Februari belum usai. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Indonesia kini ditetapkan sebagai negara dengan kasus infeksi corona tertinggi di Asia Tenggara, melampaui Singapura. Mengikuti saran pemerintah yang mengusulkan wacana hidup berdampingan dengan COVID-19, TRANSTV pun turut serta melakukan protokol *new normal* yang berlaku bagi seluruh karyawan, tanpa terkecuali.

Protokol pada Karyawan

Langkah pertama yang kami terapkan adalah, setiap karyawan yang akan memasuki gedung TRANSTV diarahkan menuju wastafel yang disediakan di depan lobi utama untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh, tentunya sambil menjaga jarak dengan mengikuti jalur antrian. Setelah itu, karyawan akan melewati *disinfectant room* berisi tiga unit *misty fan* yang sudah diisi dengan cairan disinfektan, yang berfungsi untuk mensterilkan seluruh permukaan tubuh dan barang yang dibawa karyawan dari luar.



Sebagai ketentuan suhu tubuh, karyawan dengan suhu antara 37,5°C dan di bawah 38°C akan diwawancarai oleh HRD & tim medis yang bertugas untuk diketahui kunjungan ke lokasi-lokasi sebelumnya. Jika suhu tubuh mencapai 38°C atau lebih, maka karyawan tersebut akan diminta untuk beristirahat di rumah dan memeriksakan diri ke rumah sakit. Bila karyawan tersebut dinyatakan negatif, maka ia dapat kembali bekerja dengan membawa surat keterangan resmi dari rumah sakit.

Sebelum memasuki gedung, seluruh karyawan diwajibkan untuk menggunakan masker, serta dianjurkan untuk membawa keperluan *new normal* masing-masing seperti *hand sanitizer*, alat makandan botol minum. Tetapi, karyawan tetap dapat menikmati makan siang di kantin karena TRANS TV telah menerapkan SOP baru yang mewajibkan seluruh tenant untuk ekstra menjaga kebersihan baik dari alat makan, proses masak hingga penyajian. Selain itu, *seating arrangement* pun diatur untuk menjaga jarak dengan pola zig-zag. Untuk karyawan yang memesan makanan dari luar pun kini tidak bisa diantar langsung ke lobi, namun harus mengambil di luar area CT Corp terpadu dengan menggunakan tas sendiri. Bagi karyawan yang menggunakan transportasi umum dianjurkan untuk membawa pakaian ganti.

Social distancing pun merupakan sebuah kebiasaan baru yang terus diterapkan. Tidak hanya ketika mengantre, namun juga ketika melakukan foto bersama. Posisi berdiri setiap partisipan diatur sedemikian rupa guna menjaga jarak, seperti saat pengambilan foto pemberian donasi Dompet Amal yang merupakan donasi dari pemirsa dan pembaca TRANS MEDIA.

Setiap meja kerja kini dilengkapi dengan sekat akrilik yang berguna untuk mengurangi kontak langsung antar-karyawan. Selain itu, setiap malam dijadwalkan penyemprotan disinfektan di seluruh lantai hingga area kerja karyawan yang dilakukan secara berkala. Masih menerapkan *social distancing*, kapasitas di dalam lift pun dibatasi dan terdapat petunjuk arah berdiri agar tidak kontak langsung dengan karyawan lain. *Hand sanitizer* pun disediakan di beberapa titik area lift.

Khusus untuk penerimaan tamu, TRANS TV menyediakan ruangan khusus di mana karyawan dapat bertemu dengan tamu atau klien. Ruangan tersebut dilengkapi dengan meja, kursi, pendingin ruangan, serta kontainer yang berfungsi sebagai wadah paket atau barang yang ingin diberikan kepada karyawan. Ruang penerimaan tamu tersebut terletak di samping lobi utama TRANS MEDIA.



NEW NORMAL TRANS 7





Sejak wabah COVID-19 muncul di Indonesia, TRANS7 selalu berupaya memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan untuk menimbulkan rasa aman dalam menjalankan tugas. Sejak 3 Maret 2020, TRANS7 sudah menerapkan Protokol COVID-19 kepada seluruh karyawan. *Screening temperature* suhu badan, penyediaan *hand sanitizer* dan penyemprotan disinfektan untuk ruang kerja dan studio, merupakan langkah awal yang dilakukan TRANS7 menghadapi pandemi COVID-19.

Kewajiban mencuci tangan, *physical distancing*, membawa makanan, alat makan dan alat sholat pribadi juga dilakukan, termasuk penyediaan masker dan vitamin bagi karyawan, serta melarang karyawan yang sedang sakit untuk bekerja.

Dari sisi produksi program, dilakukan pengurangan kegiatan *shooting* dan meniadakan penonton dalam aktivitas *shooting*. TRANS7 juga memastikan setiap karyawan, talent, narasumber atau *host* yang terlibat dalam kegiatan *shooting* mematuhi seluruh protokol kesehatan. TRANS7 juga meniadakan perjalanan dinas luar kota dan luar negeri untuk liputan maupun produksi program.

Pada 1 Juni 2020, Menteri Kesehatan menerbitkan Keputusan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Keran *new normal* mulai dibuka, seluruh pihak mulai bersiap menghadapi era tatanan kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Televisi merupakan salah satu dari 11 sektor usaha yang masih diperbolehkan beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejak awal PSBB, TRANS7 telah mengatur *flow* kerja dan kehadiran karyawan secara cermat, karena penerapan *work from home* (WFH) sepenuhnya dalam industri televisi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jumlah karyawan yang hadir bekerja di kantor pun dievaluasi dengan melakukan shift jam kerja dan *work from home* (WFH). Selain itu, TRANS7 mendata dan memonitor secara reguler karyawan-karyawan dengan penyakit comorbid dan berisiko tinggi mengalami penularan.

Jika ada karyawan yang terindikasi terpapar COVID-19, maka karyawan tersebut harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sampai dinyatakan non-reaktif terhadap virus COVID-19. Sementara untuk karyawan yang dipastikan positif, maka yang bersangkutan wajib menjalankan penyembuhan sampai dinyatakan sembuh total baru bisa bekerja kembali.

Selain memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan, TRANS7 juga berupaya untuk konsisten berperan aktif memberikan informasi dan edukasi, serta melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk dukungan atas upaya pemerintah menanggulangi persebaran COVID-19.

Bentuk dukungan itu berupa liputan yang informatif dan konstruktif, serta penayangan iklan Layanan Masyarakat baik dari pemerintah maupun versi korporasi yang

telah dibuat sebanyak 16 versi dan ditayangkan secara masif di layar serta *platform* digital TRANS7.

TRANS7 juga membentuk Tim Crisis Center yang bertanggung jawab mengkoordinasikan semua aktivitas terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan penularan COVID-19. Tim Crisis Center juga memonitor dan mensosialisasikan informasi dan peraturan terbaru dari pemerintah, termasuk aturan dan protokol Tatanan Kehidupan Baru. Peraturan yang awalnya hanya menjadi peraturan tertulis, kini menjadi gaya hidup setiap karyawan TRANS7. Di masa transisi ini setiap karyawan sudah harus mulai terbiasa dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Setiap karyawan diwajibkan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di halaman kantor sebelum memasuki gedung tempat bekerja, pembatasan jumlah orang di dalam lift dan pengukuran suhu tubuh setiap memasuki area kerja. Pembatasan intensitas karyawan yang masuk ke kantor di setiap lantainya juga dilakukan agar tidak terjadi kepadatan di area kerja.





Hal ini juga berlaku di studio. Juga pembatasan ruang *meeting* dan pertemuan tatap muka dengan menggunakan teknologi atau aplikasi *meeting virtual*. Nantinya karyawan yang akan melakukan perjalanan dinas luar kota maupun luar negeri harus melakukan pengecekan kesehatan untuk memastikan dirinya dalam keadaan sehat dan non-reaktif COVID-19. Setelah kembali dari perjalanan dinas, yang bersangkutan diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan pengecekan kesehatan kembali untuk memastikan non-reaktif COVID-19. Pemberian masker kepada seluruh karyawan juga menjadi atribut baru melengkapi seragam TRANS7 di era *New Normal*.

Sudah enam bulan masyarakat dunia dihantui pandemi COVID-19 dan belum terlihat tanda-tanda akan berakhir. Seluruh penduduk bumi memiliki doa dan harapan yang sama, agar wabah virus yang mengubah sebagian besar sendi kehidupan di dunia ini dapat segera berakhir. Semoga vaksin COVID-19 segera ditemukan agar semua kembali menjadi normal. Tetap optimis, waspada, jaga kesehatan, dan selalu terapkan protokol kesehatan.



Penulis:
Anita Wulandari
Kepala Divisi Marketing Public Relations
TRANS 7

NET.

Menularkan Semangat Positif di Tengah Pandemi



“

COVID-19 mengubah cara manusia menjalani rutinitas, sebuah dampak nyata dari pandemi yang mengenalkan masyarakat pada istilah *new normal* atau tatanan normal baru. Bagi NET., menjalani transformasi perilaku untuk tetap beraktivitas normal ditambah penerapan protokol kesehatan harus cepat diadaptasi.

Apalagi media termasuk dalam sektor usaha yang tetap beroperasi selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Lembaga penyiaran bahkan punya tanggung jawab dalam menjalankan fungsi esensialnya, yaitu menyediakan informasi yang memudahkan masyarakat dalam memahami cara menghadapi pandemi. Untuk itu, semangat untuk tetap sehat agar bisa bekerja dan memberi tontonan terbaik, menjadi semangat positif yang ingin dibagi NET. pada publik.

“Di tengah kondisi pandemi yang penuh keprihatinan dan tantangan ini, kami di NET. berkomitmen untuk tetap menjaga dan menularkan semangat positif dalam berbagai hal. Secara internal, seluruh jajaran manajemen dan karyawan melaksanakan berbagai inisiatif sesuai protokol kesehatan dan menyesuaikan pola kerja. Secara eksternal, kami berkomitmen untuk menularkan semangat positif ini kepada masyarakat melalui berbagai sajian program tayangan yang menghibur dan memberikan semangat dan inspirasi untuk berjuang melawan kondisi pandemi ini,” tegas Deddy Sudarijanto, CEO NET.

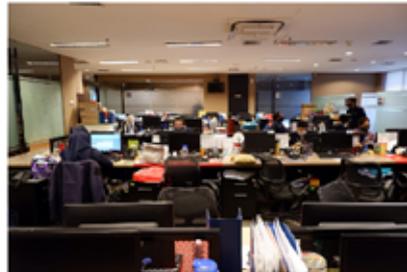
NET. berkomitmen untuk tetap menjaga & menularkan semangat positif, (salah satunya) melalui sajian program tayangan yang menghibur, memberikan semangat dan inspirasi untuk berjuang melawan kondisi pandemi ini”



Menjalankan kegiatan operasional di masa *new normal* menjadikan keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan, kru, tamu, dan narasumber, sebagai prioritas tertinggi. Cara yang paling jamak dilakukan untuk bekerja sesuai prinsip *physical distancing* adalah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Namun, industri media tak mungkin berjalan tanpa adanya kegiatan produksi program dan liputan berita. Kru dan karyawan yang bersangkutan harus tetap berada di lokasi kerja.

Seperti yang diserukan pemerintah, penggunaan masker wajib dipatuhi, baik oleh karyawan maupun tamu. Pengukuran suhu tubuh dilakukan di setiap titik akses masuk area kantor dan studio. Untuk sementara, tak ada penonton dilibatkan dalam proses syuting di studio. Para kru dan pengisi acara wajib menerapkan prinsip jaga jarak dalam berinteraksi. Semua juga dianjurkan sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* yang tersedia di seluruh area pintu masuk dan sejumlah titik lain di area gedung.

Untuk membatasi jumlah karyawan yang hadir di tempat kerja, pola bekerja dari rumah dan dari kantor dijalankan karyawan secara bergantian. Selain itu, jam masuk kantor dibuat lebih siang dan pulang kantor dibuat lebih awal menyesuaikan pembatasan operasional moda transportasi umum. Sementara bagi karyawan yang bekerja dengan sistem *shift*, penyesuaian khusus diberlakukan sesuai kebijakan di masing-masing unit kerja.



Kebiasaan baik yang menunjang kesehatan juga penting dibudayakan, misalnya membawa bekal makanan dari rumah. Kalau pun terpaksa beli, makanan harus dimasukkan *microwave* terlebih dulu yang tersedia di setiap lantai sebelum dimakan. Secara berkala, seluruh lokasi kerja yang mencakup area kantor dan studio disemprot disinfektan. Pegangan pintu, tangga, tombol lift, dan peralatan kantor yang digunakan bersama, paling sering dapat usapan lap pembersih.

Protokol kesehatan juga dijalankan karyawan dengan tingkat mobilitas tinggi, seperti tim liputan. Menjaga profesionalitas dalam menjalankan fungsi media secara bertanggung jawab sesuai kaidah jurnalistik, tetap yang utama. Mencari berita dengan keterbatasan gerak jadi tantangan luar biasa, mulai dari menghadapi narasumber yang belum terbiasa atau sulit diwawancarai secara daring, hingga akses menuju lokasi liputan yang tertutup karena terbentur aturan PSBB.



Di tengah pandemi, aktivitas bepergian sangat dibatasi. Perjalanan dinas, termasuk kegiatan liputan luar kota atau luar negeri untuk sementara ditiadakan. Demi mengejar kelengkapan unsur berita, koordinasi dengan tim kontributor di masing-masing wilayah harus berjalan lebih optimal. Namun bagi para karyawan yang telanjur bertugas ke sejumlah daerah sebelum status darurat COVID-19 diberlakukan, sepulangnya mereka wajib menjalani masa karantina diikuti kewajiban mengikuti rangkaian cek kesehatan sebelum kembali bekerja.

Kekhawatiran saat bekerja adalah hal wajar, terutama menyangkut kesehatan diri dan keluarga. Itu sebabnya, karyawan dan keluarganya juga diberikan vitamin C dan fasilitas untuk melakukan rapid test bahkan PCR secara gratis. Selain memastikan seluruh protokol kesehatan berjalan baik, memberi rasa tenang pada karyawan juga penting demi menjaga produktivitas dan meningkatkan motivasi kerja.

“Meski berisiko tinggi karena harus tetap bekerja di saat pandemi namun bila didasari dengan passion dan rasa gembira, kata para ahli kesehatan akan meningkatkan imunitas tubuh. Musibah selalu mengandung hikmah. Di balik krisis pasti ada peluang. COVID-19 meningkatkan kreativitas kru TV yang tidak akan dilakukan di saat normal,” kata Hery Kustanto, Vice President of Corporate Services NET.

Semangat positif dalam bekerja merupakan jurus jitu NET. untuk konsisten berkarya, apalagi di saat pandemi justru orang banyak berada di rumah menikmati tayangan televisi yang menarik. Hal ini membuat NET. semakin terpacu menyempurnakan program-program andalan, di antaranya *Tonight Show*, program *talkshow* berbalut candaan khas nan segar yang tayang setiap Senin-Jumat pukul 19.00 WIB dengan dipandu para host kesayangan, yaitu Desta Mahendra, Vincent Rompies, Hesti Purwadinata, dan Enzy Storia.

Menghangatkan waktu berkumpul bersama keluarga, NET. juga menyuguhkan pemirsa setia dengan aneka serial kartun berkualitas seperti *Zelly Go*, *Digimon Universe: App Monster*, tak ketinggalan animasi karya anak bangsa, *Super Neli*. Program berita Selamat Siang Indonesia setia menyajikan informasi terkini, hadir pula program edukatif yang dikemas menarik seperti *86*, *Teman Panji*, dan *Jatanras*.

NET. memiliki perhatian terhadap kebutuhan pemirsa dan keluarganya akan tayangan berkualitas. Tayangan dan pemberitaan ke arah yang lebih positif tentunya mampu memberikan dorongan moril kepada setiap individu dalam melakukan kegiatannya di tengah pandemi. Seruan agar masyarakat untuk tetap di rumah harus didukung, maka sudah menjadi kewajiban bagi NET. untuk menjadi sahabat baik masyarakat dengan menyuguhkan program yang menghibur dan informatif.





JNE Cegah Virus Corona Demi Pelanggan

Maret 2020 – Penyebaran virus corona atau COVID-19 masih terjadi dan pemerintah telah menghimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, khususnya tempat keramaian. Dalam menghadapi situasi tersebut JNE pun melakukan berbagai persiapan untuk mencegah penyebaran virus corona sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan.

Langkah pencegahan dimulai dengan peningkatan peralatan kesehatan dan kebersihan, khususnya untuk para karyawan *frontliner* yang bertemu langsung dengan pelanggan mau pun tim yang menangani paket selama dalam proses pengiriman. Para karyawan tersebut, seperti kurir, petugas *Sales Counter*, *receptionist*, tim keamanan, dan yang lainnya dalam bidang operasional.

Berbagai peralatan dan fasilitas ditambah serta disediakan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Gedung Operasional JNE, seperti alat cek suhu tubuh, masker, sarung tangan, cairan pencuci tangan steril, serta tempat mencuci tangan dengan air mengalir. Pelanggan yang datang pun akan diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dulu sebelum melakukan transaksi pengiriman paket.

JNE juga membentuk gugus tugas khusus untuk pengawasan di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang dan melakukan sterilisasi seluruh area kerja menggunakan cairan disinfektan. Penyemprotan cairan tersebut dilakukan di area-area di mana sering digunakan oleh karyawan mau pun pelanggan, seperti musholla, ruang tunggu, toilet, dan yang lainnya.



Proses pengiriman paket tetap berjalan dengan normal sampai ada informasi lebih lanjut pemerintah Republik Indonesia



Penyemprotan disinfektan untuk paket yang masuk & keluar



Tersedia hand sanitizer di Sales Counter JNE

Sterilisasi seluruh are kerja dan fasilitasnya dengan cairan disinfektan



M. Feriadi, Presiden Direktur JNE, mengatakan, "Langkah pencegahan penyebaran virus corona dijalankan dengan dimulai dari diri sendiri, yaitu internal perusahaan. Diawali dengan peningkatan kebersihan untuk menjaga kesehatan para ksatria dan srikandi JNE yang terus mengemban amanah pengiriman semua paket pelanggan di tengah situasi saat ini".

Feriadi pun menambahkan bahwa proses pengiriman JNE hingga saat ini masih berjalan normal. "Hal tersebut karena, selain pelanggan retail yang dihimbau pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, JNE pun harus selalu siap memenuhi kebutuhan banyak pelanggan perusahaan, termasuk perusahaan di bidang kesehatan dengan jenis paket berupa alat kesehatan mau pun obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat", jelasnya.

Walaupun belum ditemukan penularan virus corona lewat barang, seperti yang dijelaskan oleh berbagai pihak, yaitu Kementerian Kominfo, LIPI, WHO, dan yang lainnya, namun upaya pencegahan juga dapat dilakukan oleh tiap penerima paket. "Agar upaya pencegahan infeksi virus corona makin maksimal, maka JNE menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk membersihkan atau mencuci isi paket sebelum digunakan", tutur Feriadi.

Selain peningkatan fasilitas di bidang kesehatan, JNE pun terus menjaga kualitas sektor IT perusahaan agar dapat terus bekerja optimal. Feriadi juga menyampaikan bahwa JNE akan mematuhi pemerintah terkait himbauan Work From Home. "Ada sektor-sektor dalam perusahaan yang memungkinkan karyawan untuk bekerja di rumah. Untuk itu performa IT harus terus terjaga", ungkapnya.

Feriadi menjelaskan bahwa hal ini agar penyediaan seluruh data yang dibutuhkan secara real time terus berjalan dengan maksimal dalam situasi saat ini. "Bukan hanya untuk internal, pertukaran data dari JNE dengan *platform* milik semua mitra secara cepat dan akurat harus terus terjaga agar konetivitas antara *seller* dengan *buyer*, *e-commerce platform*, teknologi keuangan, serta yang lainnya, tetap lancar".

Seperti banyak perusahaan lainnya, JNE pun tetap semangat dan optimis dalam menghadapi penyebaran virus corona agar perekonomian dalam negeri tetap berjalan dengan optimal. "Berdasarkan data dari Asperindo, penurunan barang dari luar negeri terjadi sekitar 5% - 10%. Namun, ini menjadi momentum bagi UKM dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, demi Indonesia yang sehat dan kuat", pungkask Feriadi.



TIKI Siap Masuki Era Kenormalan Baru dengan Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19





Jakarta, 24 Juni 2020 –PT. Citra Van Titipan Kilat ("TIKI"), perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia, menjaga komitmennya untuk terus beroperasi melayani kebutuhan pengiriman korporasi maupun perorangan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan operasional dan gerai. Kebijakan tersebut telah dilakukan TIKI sejak ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan siap melayani masyarakat di era kenormalan baru sekarang ini.

Ahmad Ferwito, *Nasional Network Director* TIKI mengatakan "Era kenormalan baru berarti juga era untuk melakukan akselerasi bisnis bagi para pelaku usaha setelah beberapa bulan terakhir mengalami disrupsi. TIKI siap menjadi mitra dalam percepatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dengan mempersiapkan diri mulai dari protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 di area gerai dan area operasional, alokasi

sumber daya manusia hingga meluncurkan inovasi produk dan layanan. kami sangat menjaga kesiapan staf dan kurir kami agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan menjamin kebersihan dan keamanan dalam pengiriman paket ke pelanggan, dengan tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 serta mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah di tiap daerah."

Untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan operasional dan gerainya, TIKI telah menerapkan langkah-langkah preventif untuk melindungi para staf dan kurir TIKI serta para pelanggan. TIKI juga menghimbau para pelanggannya menggunakan layanan JEMPOL (Jemput Online) untuk menghindari antrian di gerai. Dengan layanan JEMPOL, kurir TIKI akan menjemput barang kiriman di lokasi yang telah ditetapkan pengirim tanpa dikenakan biaya.

Adapun protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan TIKI di lingkungan operasional dan gerainya mencakup:

- Melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara regular di gerai dan gudang operasional. TIKI juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada paket-paket kiriman yang diterima dan yang akan dikirimkan.
- Menyediakan *hand sanitizer* di seluruh gerai dan gudang operasional untuk dapat digunakan oleh staf maupun pelanggan yang datang ke gerai.
- Mewajibkan para staf dan kurir TIKI untuk menjaga kebersihan dan tetap steril dengan menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan ketika memasuki lingkungan kerja dan mengenakan masker dan sarung tangan latex ketika menerima dan mengirimkan paket.
- Memastikan kesehatan para staf dan kurir TIKI dengan melakukan pengukuran suhu badan dan akan memulangkan staf atau kurir yang melebihi suhu tubuh normal agar beristirahat.
- Menjaga jarak aman antara staf atau kurir TIKI dengan pelanggan ketika melakukan transaksi pengiriman.
- Pengaturan tempat duduk antrian dengan memperhatikan batas jarak yang ditetapkan.
- Menghimbau para pelanggan menggunakan layanan JEMPOL (Jemput Online) yang dapat diakses di aplikasi TIKI.

Tidak hanya kesiapan protokol kesehatan dan alokasi sumber daya manusia, TIKI juga memperluas pilihan produk dengan meluncurkan produk baru TIKI Jemput Antar (PUTAR)

TIKI PUTAR menawarkan pilihan pengiriman secara instan untuk wilayah pengantaran dalam kota yang sering disebut dengan istilah *city courier*. TIKI PUTAR semakin menambah pilihan layanan bagi para pelanggan untuk merencanakan pengiriman barang mereka secara lebih fleksibel dengan biaya yang kompetitif. Berbeda dengan produk *Same Day Service* dimana barang diantarkan pada hari yang sama namun tanpa komitmen waktu, TIKI PUTAR menekankan pada urgensi pengantaran dokumen/barang dengan waktu yang sangat cepat dalam hitungan jam sejak barang diserahkan kepada kurir kami.

“Peluncuran TIKI PUTAR diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengiriman para pelanggan kami yang terus menuntut kecepatan dan fleksibilitas. Untuk saat ini TIKI PUTAR baru dapat melayani wilayah DKI Jakarta, ke depannya kami berencana untuk memperluas cakupan produk ini di kota-kota lainnya.” Tutup Ahmad Ferwito.





TIKI
CEGAH COVID 19

“NEW NORMAL”

Pandemi korona ini mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan baru (New Normal), seperti menggunakan masker saat keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di keramaian.

Protokol Pelanggan

- Pelanggan wajib menggunakan masker
- Pemeriksaan suhu badan oleh petugas
- Menggunakan hand sanitizer sebelum masuk Sales Counter
- Menempati tempat duduk dalam counter sesuai protokol

Protokol Petugas Sales Counter

- Wajib menggunakan masker dan sarung tangan
- Menjaga jarak dengan pelanggan
- Memasukkan paket ke dalam kantong plastik TIKI



www.tiki.id



tiki.id



@idtiki



tiki_id



tiki ID

Customer Service Hotline

1500 125



Era COVID-19 Apa yang Berubah dari Produksi Jurnalis TV?

Oleh: Yadi Hendriana
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/Pemred INEWSTV

Setiap masa selalu menyimpan aneka perubahan. Tidak terkecuali di era digitalisasi. Semua serba cepat, semua serba terkoneksi, semua serba menggunakan teknologi. Digitalisasi media juga berdampak ke dunia televisi. Perilaku audience televisi pun berubah. Salah satunya, mereka lebih gemar melihat siaran atau cuplikan siaran televisi di media sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram, dibandingkan dengan siaran di televisi. Digitalisasi mendisrupsi banyak hal, tidak terkecuali di media mainstream seperti televisi.

Belum selesai kita membahas disrupsi digital, dunia tersentak dengan munculnya pandemi COVID-19. Secara ekstrem semua menjadi berubah, lebih cepat dibandingkan pola disrupsi digital. Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen, termasuk dalam hal mengkonsumsi media.

Hal ini sejalan dengan hasil riset Nielsen pada Maret 2020 silam. Saat Presiden Joko Widodo mengumumkan penemuan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, belum terlihat perubahan yang signifikan pada pola konsumsi media. Namun semakin intensnya pemberitaan membuat masyarakat mulai memantau setiap perkembangan terkait COVID-19 melalui

berbagai media, tak terkecuali televisi. Hasil pantauan Nielsen Television Audience Measurement (TAM) di 11 kota menunjukkan rata-rata kepemirsaaan TV mulai meningkat dalam seminggu terakhir, dari rata-rata rating 12 persen di tanggal 11 Maret menjadi 13,8 persen di tanggal 18 Maret atau setara dengan penambahan sekitar 1 juta pemirsa TV.

Durasi menonton TV pun mengalami lonjakan lebih dari 40 menit, dari rata-rata 4 jam 48 menit di tanggal 11 Maret menjadi 5 jam 29 menit di tanggal 18 Maret. Penonton dari Kelas Atas (Upper Class) menunjukkan kecenderungan lebih lama menonton televisi sejak 14 Maret dan jumlahnya juga terus meningkat. Peningkatan ini terlihat dari rata-rata rating 11.2 persen di tanggal 11 Maret menjadi 13.7 persen di tanggal 18 Maret.

Maraknya pemberitaan di sejumlah stasiun televisi terkait COVID-19 di sepanjang periode 1-18 Maret berkontribusi kepada kenaikan kepemirsaaan program berita. Kepemirsaaan televisi terhadap Program Berita naik signifikan (+25%), terutama pada penonton Kelas Atas. Kenaikan juga terlihat pada Program Anak-anak dan Series.

Kebijakan tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang diterapkan sejak pertengahan Maret juga mempengaruhi kepemirsaaan televisi. Segmen pemirsa Anak (usia 5-9 tahun) meningkat signifikan, dari



rata-rata rating 12 persen menjadi 15.8 persen di tanggal 18 Maret. Bahkan di Jakarta kepemirsaaan di segmen ini mencapai rating tertinggi yaitu 16,2 persen.

Proses Produksi Televisi

Di balik meningkatnya jumlah kepemirsaaan televisi, proses produksi terutama konten berita pun berubah. Banyak sekali penyesuaian yang dilakukan di tengah pandemi. Tim produksi konten, dalam hal ini jurnalis televisi, harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang jelas sekali menyarankan: jaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, menggunakan handsanitizer, *work from home*, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian membuat jurnalis televisi mengubah pola kerjanya untuk memproduksi konten berita.

Secara sederhana proses produksi konten meliputi aspek gathering, editing, distributing, dan evaluating (GEDE). Proses gathering atau pencarian berita adalah bagian yang sangat krusial, karena dimaksudkan untuk mencari berita sebagai raw material sebelum kemudian masuk ke proses selanjutnya. Proses gathering di televisi tentu saja memiliki penekanan khusus pada aspek visual dibandingkan dengan jenis media lainnya. Tak heran, jika kemudian visual ini seolah menjadi “momok” bagi jurnalis pemula televisi.

Proses gathering di televisi sebagaimana media lainnya, selalu diawali dengan proses perencanaan peliputan melalui

rapat agenda *setting* dan penyusunan daftar narsum, daftar pertanyaan, wish list, penyiapan peralatan seperti kamera atau peralatan laive (SNG, Live U, atau TV U) dan juga penyiapan reporter/kameramen yang akan bertugas ke lapangan. Setelah semuanya sudah disepakati, maka akan masuk ke tahapan penugasan ke lapangan. Proses penugasan ini dilakukan oleh koordinator liputan baik korlip nasional ataupun korlip daerah (sering disebut korda).

Jika proses gathering sudah selesai maka materi dari reporter akan masuk ke tahap berikutnya yakni proses editing, yang di sana melibatkan produser maupun editor video. Tahap berikutnya adalah proses distributing (distribusi), dalam hal ini memancarkan/mentransmisikan materi berita tersebut ke khalayak melalui sistem broadcasting. Tahap ini sudah melibatkan bagian lain termasuk tim studio, presenter, dan tim teknis lainnya.

Tahap akhir yang dilakukan adalah proses evaluating (evaluasi). Biasanya setelah proses tayangan maka akan dilakukan evaluasi oleh tim yang bertugas. Evaluasi yang dilakukan usai tayangan live akan mengupas seputar kendala saat tayangan live baik peralatan, narasumber atau lainnya. Selain itu bisa juga evaluasi dilakukan di hari berikutnya atau dalam rapat mingguan, dengan melihat data-data pendukung termasuk perolehan share/rating yang dikeluarkan oleh Nielsen.

Proses GEDE di televisi boleh dibilang sangat ketat dan melalui serangkaian tahapan yang sedemikian ketat, dengan tujuan tidak ada kesalahan sekecil apapun di layar pada saat tayangan tersebut live. Hal ini menjadi penting, karena trust atau kepercayaan pemirsaa menjadi kata kunci untuk mendapatkan share/rating

yang bagus. Jika, media televisi dianggap tidak kredibel dalam pemberitaannya, maka seketika share/rating tersebut menjadi anjlok. Demikian juga terkait dengan look and feel show tayangan, jika dirasakan kurang menarik visualnya, maka pemirsaa juga akan memindahkan ke televisi lain yang lebih menarik. Tak heran jika sekarang ini visual grafis menjadi penting, untuk mempercantik show tayangan.

Pola Produksi Konten yang Berubah

Hal yang menarik dalam proses produksi konten oleh jurnalis televisi di era pandemi COVID-19 adalah mereka tidak bisa bertatap muka langsung dengan narasumber. Sejumlah agenda jumpa pers pun dilakukan dengan menggunakan *video conference*. Bahkan, sejumlah instansi sudah memberikan link di media sosial terkait dengan jumpa pers tersebut. Hal ini tentunya memudahkan stasiun televisi untuk menarik materi untuk kemudian disiarkan kembali. Tidak jarang ada kesepakatan di antara pengelola media televisi menggunakan TV Pool. Misalnya saja di Istana Negara, maka pelaksana TV Pool adalah MNC yang kemudian akan di-relay oleh stasiun televisi lainnya. Demikian juga di instansi-instansi lainnya seperti BNPB. Hal itu dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan selama COVID-19.

Tentang hal ini, fungsi dari broadcast diposisikan oleh beberapa sosiolog sebagai berkontribusi pada pemeliharaan tatanan sosial. (David Holmes, 2012: 440). Fungsi televisi menjadi sangat penting peranannya karena cara virtual ini bisa mendekatkan publik dan informasi yang dibutuhkan.

Meskipun demikian, era COVID-19 ini bukan halangan bagi seorang Jurnalis televisi dan newsroom televisi untuk berkarya. Sebagai prasyarat utama, karya jurnalistik harus berasal dari verifikasi lapangan dan memiliki news value tinggi. Untuk poin ini sudah tidak bisa ditawar, tanpa atau dengan COVID-19, proses kerja jurnalistik harus berdasarkan pada konsep awal yang memiliki nilai tinggi, akurat dan berguna untuk publik.

Bincang Ekosistem

Transformasi Digital

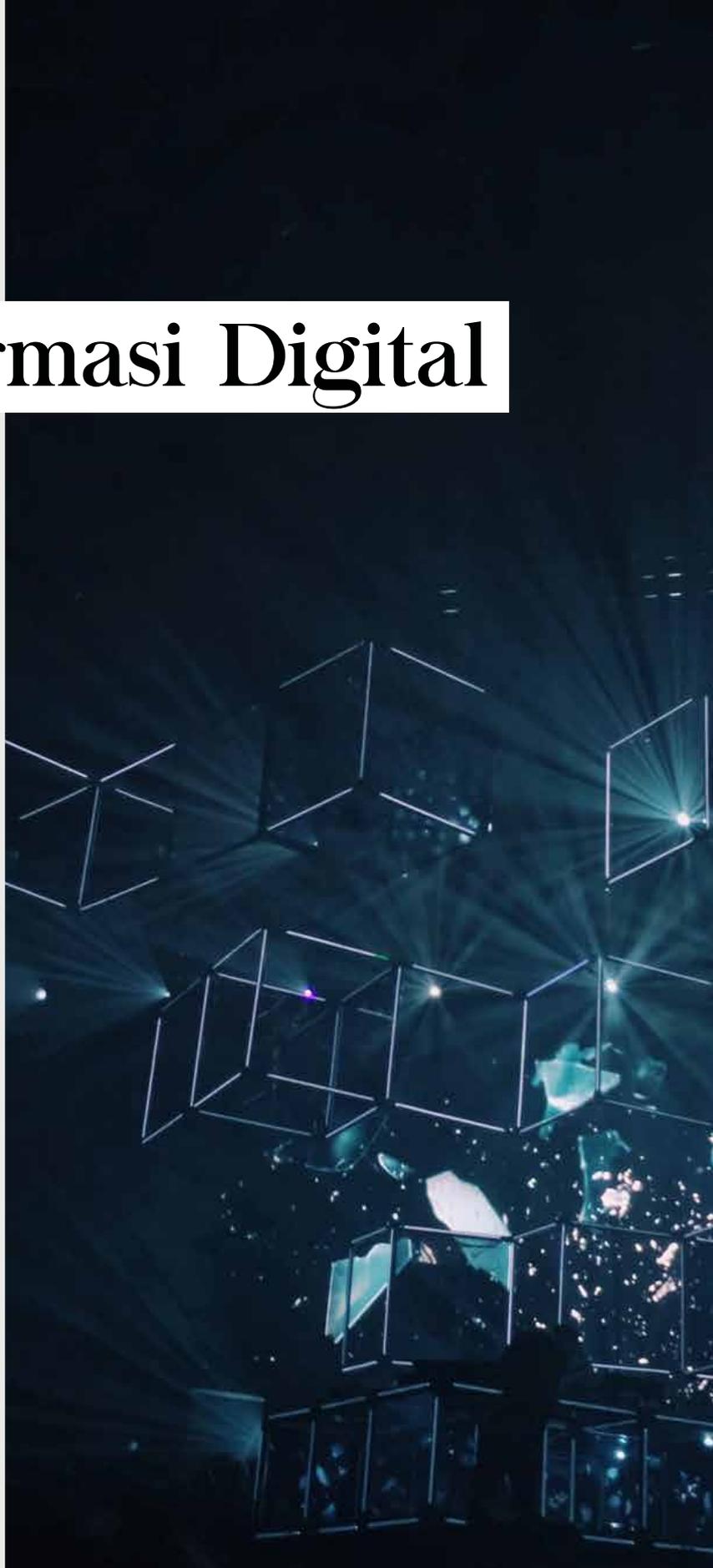
Memanfaatkan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan pertemuan virtual di tengah situasi pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu pilihan untuk tetap produktif, mengganti pertemuan tatap muka dan menghindari kerumunan dalam jumlah banyak. Pertemuan virtual memang tidak sebaik pertemuan secara langsung, namun tentu hal ini tidak melepaskan esensi dari tujuannya.

Era COVID-19 dengan sendirinya memaksa kita bermigrasi dari *offline* ke *online*, dari sekadar menggunakan ruang digital “sekadarnya” ketika dibutuhkan, menjadi instrumen utama yang kita gunakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Dari belanja kebutuhan harian, pertemuan rutin dengan rekan kerja, hingga agenda seminar virtual dalam skala besar.

Dalam tiga bulan terakhir, sudah banyak agenda-agenda virtual yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari pemerintahan, lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa. bahkan perkumpulan alumni sekolah maupun perguruan tinggi. Agenda virtual yang sering kita dengar salah satunya adalah *Web Seminar* atau *Webinar*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika pun turut memanfaatkan seminar virtual ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya, melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat tentang wabah Corona berikut upaya pencegahannya, hingga peluncuran program-program yang bertujuan untuk menstimulus keahlian dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital.

Sumber Berita : Unsplash



New Normal dan Transformasi Digital

Sebagai *Government Publik Relation (GPR)*, Kementerian Kominfo memiliki andil besar dalam upaya memutus rantai pandemi COVID-19 melalui sosialisasi hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) sebagai pelaksana tugas dan fungsi GPR pun rutin mengadakan Webinar yang menghadirkan masyarakat umum, hingga kalangan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah. Berikut beberapa Webinar yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP selama bulan Juni 2020.

○ **05/06/2020**

Persiapan dalam Menghadapi Tatanan Kehidupan Baru

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo mengatakan, pengemasan pesan komunikasi publik menjadi tantangan untuk meyakinkan masyarakat. Beberapa kata kunci dalam komunikasi publik yang digunakan pemerintah antara lain disiplin, gotong royong, optimis dan positif.

Menurut Dirjen Widodo, pandemi COVID-19 juga dengan sendirinya menyatukan masyarakat dalam dunia virtual, wilayah komunikasi publik yang memperlihatkan semangat gotong-royong. "Kita saksikan di tangan kondisi ekonomi, sosial dan psikologi, kita betul-betul mengalami cobaan, maka gotong royong kita atau *emphatic society* menjadi kelihatan," ujar Dirjen Widodo dalam webinar yang berlangsung secara virtual tersebut di Jakarta, Jumat (05/06/2020).

○ **13/06/2020**

Peluang dan Tantangan dalam Menghadapi Tatanan Kehidupan Normal Baru.

Webinar ini menelaah perspektif peluang dan tantangan dalam tatanan normal baru, dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal IKP Kementerian Kominfo Widodo Muktiyo, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, serta Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Komunikasi dan Kemitraan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.

Menurut Dirjen Widodo Muktiyo, kenormalan baru adalah membuka seluruh aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. "Masyarakat diminta untuk melakukan adaptasi perubahan perilaku di masa pelonggaran PSBB. Namun, masyarakat tidak boleh salah mengartikan normal baru dengan menganggap penularan pandemi COVID-19 sudah mereda," tegasnya, Sabtu (13/06/2020).

○ Menyiapkan Sumber Daya Digital

Webinar di sektor komunikasi dan informatika selama masa pandemi COVID-19 juga mengkaji seputar persiapan Indonesia menuju transformasi digital. Syarat utama dalam menghadapi transformasi digital adalah sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, para talenta-talenta digital yang terus didorong untuk mengasah kemampuan di bidang teknologi. Pemerintah tidak mungkin berjalan sendirian, butuh ekosistem masyarakat dan mitra kerja dalam menjawab tantangan tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai program *Digital Talent Scholarship* (DTS). Program inilah yang nantinya menjadi cikal bakal menjawab kebutuhan Indonesia di bidang teknologi. Bagaimana persiapan itu dimulai?

Webinar yang diselenggarakan DTS Kominfo di tahun 2020 bekerja sama dengan perusahaan global di Indonesia, dua di antaranya adalah Google dan Facebook Group. Sejak Indonesia terkonfirmasi COVID-19 awal maret lalu, pelatihan DTS yang awalnya berjalan secara tatap muka kini beralih ke *online*. Melalui Webinar yang diselenggarakan *Digital Talent Scholarship*, mitra kerja Google dan Facebook Group menjelaskan jenis-jenis pelatihan yang berlangsung.

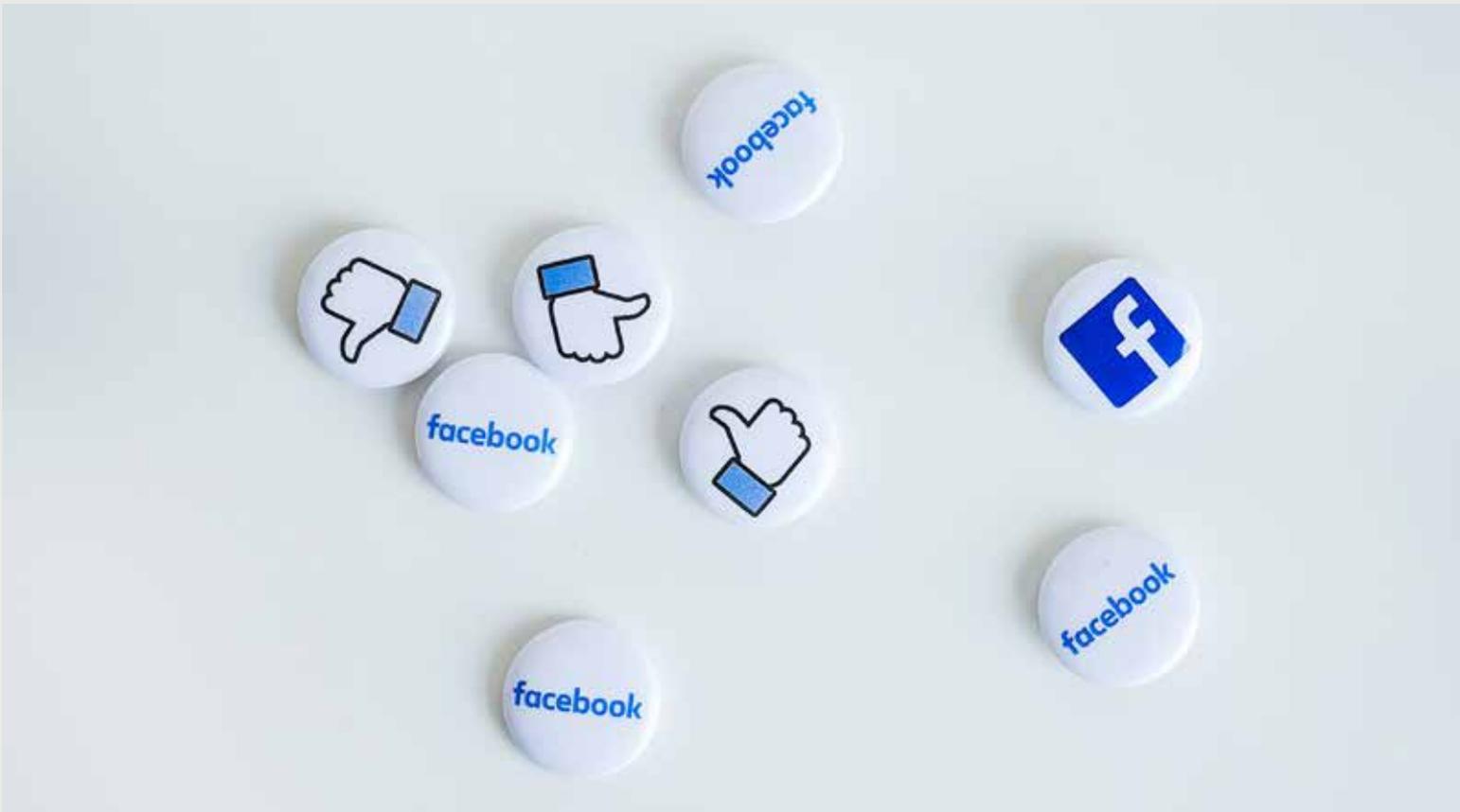
DTS Bersama Google

Public Policy & Government Manager Google Danny Ardianto mengatakan, Google adalah salah satu mitra *Digital Talent Scholarship* sejak tahun 2019. Sebagai mitra yang berkomitmen menciptakan SDM unggul di bidang teknologi, Google merasa bangga bisa bermitra dan berkolaborasi dengan Kominfo dalam menawarkan program-program pelatihan bagi warga Indonesia. Apalagi di tahun 2020, banyak sekali tantangan maupun hambatan terkait ekonomi serta upaya meningkatkan skill. Dengan adanya DTS, justru semakin lebih penting lagi upaya meningkatkan kapasitas SDM untuk mencari kesempatan dan peluang kerja baru. Inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus Google di Indonesia.

Untuk DTS 2020, ada dua program yang ditawarkan. **Pertama**, *Digital Entrepreneurship*. Pelatihan ini sifatnya lebih umum untuk seluruh latar belakang profesi, syarat penting adalah antusiasme, semangat dan punya keingintahuan yang besar untuk belajar *digital entrepreneurship* atau wirausaha digital. Dalam *Digital Entrepreneurship*, ada dua jenis pelatihan yakni untuk kelas umum dan khusus bagi ibu rumah tangga. Nah, di *batch* kedua ini.



Kedua, Associate Cloud Engineer adalah pelatihan bagi digiers atau yang mempunyai *interest* latar belakang secara teknis dengan teknologi informasi, juga familiar dengan basis operasional komputer, termasuk *operating system*, *programming* dan *database* yang sifatnya secara *general*, karena yang dipelajari dan dilatih dalam tema pelatihan *Associate Cloud Engineer* lebih kepada infrastruktur *cloud* atau komputasi awan yang merupakan sistem melatarbelakangi teknologi digital.



DTS Bersama Facebook

Kerjasama antara DTS Kominfo dan Facebook Group merupakan yang pertama kali di tahun 2020. Meski baru bermitra, *Policy Programs Manager* Facebook Indonesia Dessy Septiane Sukendar mengatakan bahwa Facebook Group sangat antusias. Diluncurkan pertama kali di Aceh pada awal tahun, kelas-kelas dalam program bersama Facebook Group ini memperkenalkan kursus bisnis yang secara gratis maupun berbayar, untuk memahami perbedaannya agar menguasai *digital marketing di platform* media sosial seperti Facebook dan Instagram.

Modul pelatihan yang ditawarkan ada tiga fase. **Pertama**, Facebook akan memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk bermedia sosial yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Pada halaman bisnis, ada suatu fitur khusus dari Facebook untuk orang-orang yang ingin mempunyai halaman bisnis. Kemudian tentang perbedaan antara fitur beriklan dan berbayar serta dasar-dasar *marketing skill* yang perlu diketahui ketika menggunakan aplikasi tersebut.

Fase **kedua** dan **ketiga** adalah tips-tips membuat konten dan juga berkomunikasi. Selain mengunggah konten yang super keren, peserta juga harus memahami cara berkomunikasi dengan pelanggan. Menurut Dessy, pasar di Facebook dan Instagram sangat besar. Jumlah pasar tersebut ditambah dengan aplikasi lain di bawah naungan Facebook, seperti WhatsApp. Melalui tiga aplikasi tersebut Digiers yang mengikuti DTS bisa menemukan audiens dan pelanggan yang tepat, dengan menggunakan tiga fase di atas agar lebih banyak orang tahu tentang produk yang ditawarkan.

Jalani Kenormalan Baru, Kominfo Terus Pantau

Kualitas Jaringan Telekomunikasi

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penuh atas jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan masyarakat dalam menjalani tatanan hidup baru atau *New Normal*.

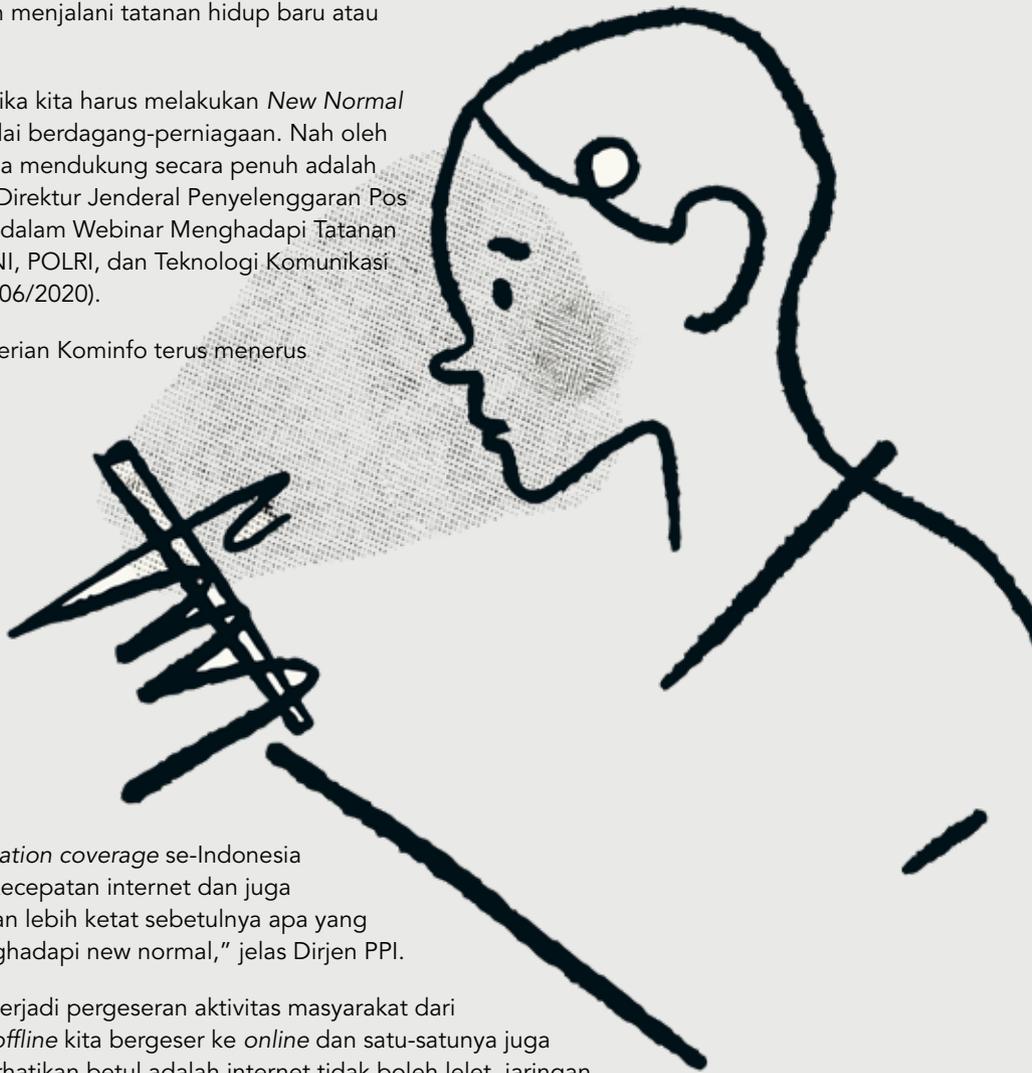
"Kami menyadari betul bahwa ketika kita harus melakukan *New Normal* kita harus mulai bekerja orang mulai berdagang-perniagaan. Nah oleh karena itu salah satu yang juga bisa mendukung secara penuh adalah layanan telekomunikasi," ungkap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli dalam Webinar Menghadapi Tatanan Kehidupan Normal Baru: Peran TNI, POLRI, dan Teknologi Komunikasi Informasi, dari Jakarta, Jumat (19/06/2020).

Dirjen Ramli menegaskan Kementerian Kominfo terus menerus

melakukan pemantauan *quality of service* dan *quality of experience* jaringan telekomunikasi. Pengecekan itu, menurut Dirjen PPI dilakukan karena penggunaan data yang tadinya lebih banyak di kantor dan sekolah-sekolah sekarang beralih ke perumahan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota.

"Ketika PSBB itu dari pengguna dan juga kemudian *telecommunication coverage* se-Indonesia kita juga petakan lagi, kemudian kecepatan internet dan juga kami ingin mempelajari lagi dengan lebih ketat sebetulnya apa yang dibutuhkan negara ini ketika menghadapi *new normal*," jelas Dirjen PPI.

Dirjen Ramli mengatakan saat ini terjadi pergeseran aktivitas masyarakat dari *offline* menjadi *online*. "Jadi dari *offline* kita bergeser ke *online* dan satu-satunya juga yang pendukung yang harus diperhatikan betul adalah internet tidak boleh lelet, jaringan telekomunikasi mesti baik," ujarnya.





Menurut Dirjen PPI, selama awal pandemi COVID-19 hampir semua masyarakat bekerja dari rumah atau *work from home*. "Pemerintah melakukan *remote* pekerjaan dari rumah webinar dengan *video conference*. Kemudian setelah masuk sekarang Pemerintah juga menetapkan ada *flexible work space*, bagaimana *working place* itu dibuat *flexible*, tidak selalu di kantor tapi boleh ada dua tiga hari di rumah," tuturnya menjelaskan aktivitas masyarakat yang banyak membutuhkan dukungan jaringan telekomunikasi.

Tak hanya itu, belajar pun juga berlangsung dari rumah dan membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memadai. "Di bidang pendidikan juga universitas, malah saya mendengar sampai akhir tahun itu akan tetap *lecture from home*," ungkapnya.

Bahkan, Dirjen Ramli menyebutkan tahun ini, umat muslim pun menggelar lebaran virtual. "Kemudian bagaimana juga *social relation* kita akan tetap terjalin, ada silaturahmi digital kita tidak lebaran pulang ke kampung tetapi semuanya bisa terlaksana dengan jaringan telekomunikasi," papar Dirjen PPI.

Dari semua peristiwa itu, Dirjen PPI menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. "Ketika kita melakukan *online shop*, ketika kita tidak mau datang langsung bertemu dengan para penjual, kemudian (menggunakan, red) *telemedicine* untuk berobat dan juga *e-psychology*," ungkapnya.

Dirjen Ramli menegaskan Kementerian Koinfo terus menerus melakukan pemantauan *quality of service* dan *quality of experience* jaringan telekomunikasi. Pengecekan itu, menurut Dirjen PPI dilakukan karena penggunaan data yang tadinya lebih banyak di kantor dan sekolah-sekolah sekarang beralih ke perumahan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota.

"Ketika PSBB itu dari pengguna dan juga kemudian *telecommunication coverage* se-Indonesia kita juga petakan lagi, kemudian kecepatan internet dan juga kami ingin mempelajari lagi dengan lebih ketat sebetulnya apa yang dibutuhkan negara ini ketika menghadapi *New Normal*," jelas Dirjen PPI.



Optimasi TIK saat Kenormalan Baru

Tak hanya PSBB, Dirjen Ramli mengungkapkan sejumlah bidang akan terus membutuhkan peran TIK, termasuk pertahanan dan keamanan. Bahkan dalam keseharian, TIK dapat dimanfaatkan untuk mencegah penularan COVID-19.

"Kami menyadari betul bahwa ketika mall dibuka maka yang tadinya *online shop* itu bergerak *offline shop* lagi. Tetapi salah satu yang kami dorong adalah juga memanfaatkan TIK ketika mall itu dibuka dalam keadaan *New Normal*," jelasnya.

Dirjen PPI menjelaskan, pengelola mall bisa membatasi pengunjung berdasarkan nomor ponsel. "Misalnya, mall bisa membatasi orang yang boleh masuk itu berdasarkan ganjil genapnya nomor handphone. Kalau nomor hp saya ujungnya ganjil maka seharusnya saya boleh datang di tanggal ganjil dst," kata Dirjen Ramli.

Dirjen PPI juga mengapresiasi peran TNI dan POLRI dan semua unsur bangsa untuk saling bahu membahu dalam kondisi perekonomian Indonesia yang mulai merosot akibat pandemi COVID-19.

Sumber Berita :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/27228/jalani-kenormalan-baru-kominfo-terus-pantau-kualitas-jaringan-telekomunikasi/0/berita_satker

Sumber Foto : Unsplash | Antarafoto

Suasana “new normal” di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bekasi menjadi salah satu kota yang pertama kali dikunjungi Presiden Joko Widodo dalam rangka meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru di sarana publik.

(kiri)

Penumpang memadati KRL Commuterline tujuan Bekasi.

(tengah)

Pengunjung terlihat bersantai di sebuah kafe di kawasan Bekasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak (*physical distancing*).

(atas dan kanan-bawah)

Lalu lintas jalan raya di kawasan Bekasi mulai dipadati kendaraan roda dua dan roda empat.





Bekasi Bersiap Adaptasi Kebiasaan Baru





Sejumlah bus jemputan pegawai Kementerian Kominfo menerapkan protokol *New Normal* dalam menghadapi COVID-19 yang diatur dalam Kep. MenKes Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Pada Situasi Pandemi.

New Normal

Jemputan Kemkominfo



Bersiap untuk kembali

Sholat Jumat

Sejumlah pegawai melaksanakan salat jumat berjemaah di Masjid At-Taqwa Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Sesuai ketentuan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru, pelaksanaan salat tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, membawa peralatan salat sendiri, serta menjaga jarak aman.





Kriteria Risiko Daerah Berdasarkan Warna



Kriteria Risiko Daerah Kategori: **Hijau**

Kategori Risiko — Tidak terdampak

Tingkat Transmisi COVID-19:

- Tidak ditemukannya kasus positif COVID-19
- Pengawasan ketat dan berkala dilakukan untuk mencegah timbulnya potensi kasus baru
- Penyebaran COVID-19 terkontrol
- Risiko penyebaran tetap ada di tempat isolasi



Kriteria Risiko Daerah Kategori: **Kuning**

Kategori Risiko — Risiko Sedang

Tingkat Transmisi COVID-19:

- Ditemukannya kasus positif COVID-19
- Transmisi dan imported case bisa terjadi
- Transmisi tingkat rumah tangga bisa terjadi
- Kluster penyebaran terkendali dan tidak bertambah



Kriteria Risiko Daerah Kategori: **Oranye**

Kategori Risiko — Risiko Sedang

Tingkat Transmisi COVID-19:

- Transmisi lokal mungkin bisa terjadi dengan cepat
- Transmisi dari imported case mungkin terjadi secara cepat
- Kluster-kluster baru harus terpantau dan dikontrol melalui *testing* dan *tracing* agresif

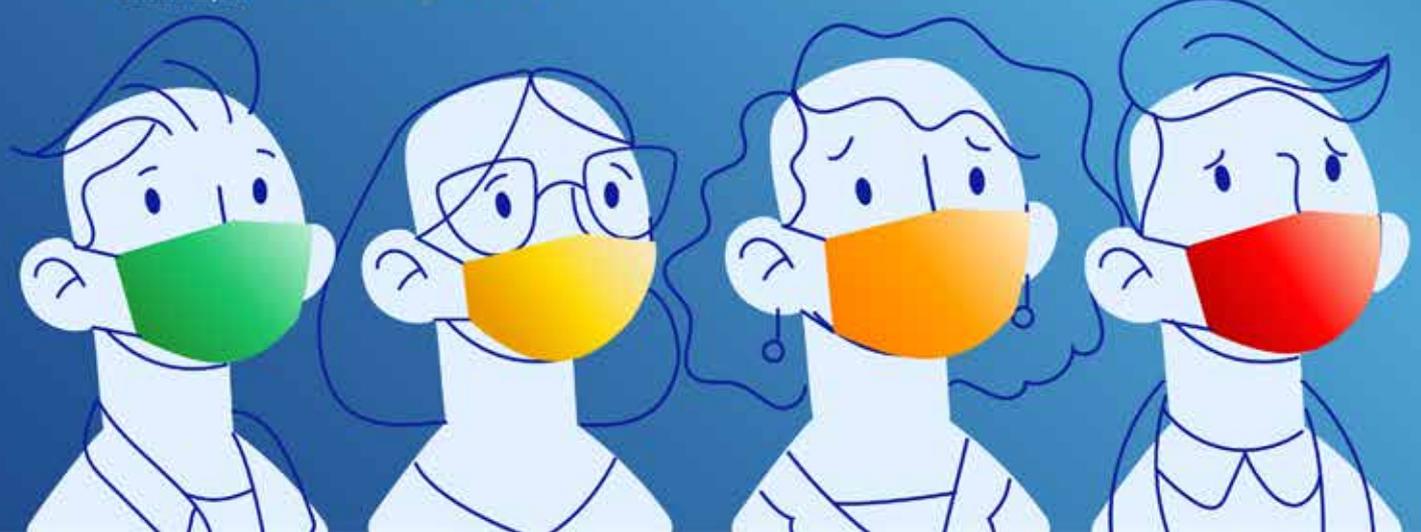


Kriteria Risiko Daerah Kategori: **Merah**

Kategori Risiko — Risiko Tinggi

Tingkat Transmisi COVID-19:

- Transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat
- Wabah menyebar secara luas & banyak kluster-kluster baru



Disiplin

menerapkan protokol kesehatan
harus menjadi

Kebiasaan baru kita

Presiden Joko Widodo

